

PERINGATAN PROKLAMASI 17 AGUSTUS 2024 HYBRID DI IKN DAN ISTANA JAKARTA

MEDIA INFORMASI DAN KOMUNIKASI KONSTITUSI



MAJELIS

MPR RUMAH KEBANGSAAN

EDISI NO.08/TH.XVIII/VIII/2024

Sidang Tahunan MPR Tahun 2024 **TETAP SATU RANGKAIAN DENGAN** **Sidang Bersama DPR-DPD**

ISSN 0854-6371
9 770854 637158

30 Nasional
Koperasi Kembali Menjadi
'Soko Guru' Perekonomian Nasional

32 Kajian MPR
Pentingnya Edukasi Politik
Berbasis Politik Kewargaan

39 Selingan
Sejarah Panjang Orang
India Menetap di Medan

62 Sosialisasi
Sosialisasi Empat Pilar Untuk
Menumbuhkan Cinta Tanah Ar



MPR
RUMAH KEBANGSAAN
PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA
DAN KEDAULATAN RAKYAT



Buku Digital MPR RI
SETJEN MPR RI

Daftar Isi

EDISI NO.08/TH.XVIII/VIII/ 2024



08 BERITA UTAMA

Sidang Tahunan MPR Tahun 2024

Format pelaksanaan Sidang Tahunan MPR Tahun 2024 tidak berbeda dengan pelaksanaan Sidang Tahunan MPR sebelumnya (Tahun 2020, 2021, 2022, dan 2023). Pelaksanaan Sidang Tahunan MPR dalam satu rangkaian (bersamaan) dengan Sidang Bersama DPR-DPD.



18 Nasional

Peringatan Proklamasi 17 Agustus 2024 Hybrid di IKN dan Istana Jakarta



62 Sosialisasi

Sosialisasi Empat Pilar untuk Menumbuhkan Cinta Tanah Air



39 SELINGAN

Kampung 'Keling' Majadi 'Madras'



80 Wawancara

Riyanta, SH

Pengantar Redaksi	04
Perspektif	06
Kolom	36
Aspirasi Masyarakat	47
Gema Pancasila	48
Varia MPR	66
Wawancara	74
Figur	76
Ragam	78
Dari Rumah Kebangsaan	80
Rehal	82



COVER

Edisi No.08/TH.XVIII/VIII/ 2024

Kreatif: Jonni Yasrul - Foto: Istimewa

Pengantar Redaksi

Sidang Tahunan MPR Tahun 2024 dan Agenda MPR RI di Bulan Agustus

PADA bulan Agustus ini, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) melaksanakan tiga agenda nasional yang penting. Ketiga agenda nasional yang penting itu adalah: Pertama, Sidang Tahunan MPR pada 16 Agustus yang dirangkai dengan Sidang Bersama DPR-DPD; Kedua, peringatan Hari Konstitusi pada 18 Agustus; Dan, ketiga, peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) MPR pada 29 Agustus. Ketiga agenda penting nasional itu dilaksanakan berurutan di bulan Agustus.

Untuk menyiapkan ketiga agenda penting MPR itu, Pimpinan MPR telah menggelar Rapat Pimpinan (Rapim) pada Senin, 29 Juli 2024. Rapim dipimpin Ketua MPR Bambang Soesatyo ini dihadiri Wakil Ketua MPR RI, yaitu Ahmad Basarah, Lestari Moerdijat, Amir Uskara, dan Fadel Muhammad. Sedangkan Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid mengikuti Rapim secara virtual melalui zoom. Rapim MPR dihadiri juga Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal MPR, Siti Fauziah, dan Deputi Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi, Hentoro Cahyono, serta jajaran pejabat di Sekretariat Jenderal MPR.

Usai Rapim, Bambang Soesatyo mengungkapkan bahwa format pelaksanaan Sidang Tahunan MPR Tahun 2024 tidak berbeda dengan pelaksanaan Sidang Tahunan MPR sebelumnya (Tahun 2020, 2021, 2022, dan 2023). Pelaksanaan Sidang Tahunan MPR dalam satu rangkaian (bersamaan) dengan Sidang Bersama DPR-DPD. Dengan format seperti ini, Presiden Joko Widodo akan menyampaikan pidato mengenai laporan kinerja lembaga negara dalam Sidang Tahunan MPR, dan menyampaikan pidato kenegaraan Peringatan Hari Kemerdekaan dalam Sidang Bersama DPR-DPD.

Sidang Tahunan MPR sebagai sebuah konvensi ketatanegaraan sudah diselenggarakan sejak tahun 2015. Sidang Tahunan MPR ini memang dimaksudkan sebagai forum bagi lembaga negara untuk menyampaikan laporan kinerja masing-masing selama setahun terakhir.

MPR memfasilitasi penyampaian laporan kinerja lembaga negara melalui Sidang Tahunan MPR ini. Lembaga negara yang dimaksud adalah lembaga negara yang diberi kewenangan langsung dalam UUD NRI Tahun 1945, yaitu: MPR, DPR, DPD, Lembaga Kepresidenan, Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Ada dua makna penting Sidang Tahunan MPR RI, yaitu: Pertama, Sidang Tahunan MPR digunakan oleh para pelaksana kedaulatan rakyat, yakni lembaga negara untuk menyampaikan laporan kinerja pelaksanaan wewenang dan tugasnya kepada rakyat; Kedua, Sidang Tahunan MPR sebagai bentuk akuntabilitas kinerja lembaga negara kepada rakyat sebagai pemberi mandat.

Namun, ada yang istimewa dalam penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR tahun 2024. Sidang Tahunan MPR ini merupakan Sidang Tahunan MPR terakhir bagi MPR periode 2019-2024. Penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR tahun 2024 ini pun setelah penyelenggaraan Pemilu Serentak tahun 2024, dan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029. Dalam Sidang Tahunan MPR ini pun, pimpinan MPR telah menyiapkan legacy-legacy untuk MPR periode berikutnya, satu di antaranya adalah Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

Selain Sidang Tahunan MPR, Rapim MPR juga membahas persiapan berbagai kegiatan di bulan Agustus 2024, antara lain Seminar Konstitusi tentang “Quo Vadis MPR RI”, Peringatan Hari Konstitusi 18 Agustus, dan Fun Walk pada 31 Agustus 2024. Juga lomba karya jurnalistik MPR RI 2024. Dalam Fun Walk memperingati HUT MPR RI terdapat beragam acara hiburan, seperti Stand Up Comedy Kebangsaan. Stand Up Comedy ini sudah menjadi ciri khas dalam peringatan HUT MPR. □



PENASEHAT

Pimpinan MPR-RI

PEMIMPIN REDAKSI

Siti Fauziah

REDAKTUR PELAKSANA

Anies Mayangsari Muninggar

KOORDINATOR REPORTASE

Djarot Widiarto

FOTOGRAFER

Tim Medvis

TIM AHLI

Syahril Chili, Jonni Yasrul,
Ardi Winangun, Budi Sucahyo,
Derry Irawan, M. Budiono

STAF DISTRIBUSI

Amelia Rubinta, Ikhwani Bimo F

ALAMAT REDAKSI

Biro Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi,
Sekretariat Jenderal MPR-RI
Gedung Nusantara III, Lt. 5
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 6,
Senayan, Jakarta 10270.
Telp. (021) 57895237, 57895238,
57895251 Fax.: (021) 57895237
Email: pemberitaan@setjen.mpr.go.id

DIRGAHAYU REPUBLIK INDONESIA



**NUSANTARA
BARU
INDONESIA
MAJU**

17 AGUSTUS 1945 - 17 AGUSTUS 2024



Fakta Kemiskinan, PHK dan Urgensi Food Safety Nets

GAGASAN presiden terpilih Prabowo Subianto tentang Food Safety Nets menjadi sangat relevan dan urgen jika dihadapkan pada ekspek ketidakpastian saat ini, utamanya terhadap komunitas yang lemah dan berkekurangan.

Dengan meningkatnya jumlah warga miskin akibat gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK), realisasi Food Safety Nets harus dipastikan efektif untuk memenuhi kebutuhan individu atau komunitas warga yang rentan dari kerawanan pangan.

Segera setelah naiknya harga minyak mentah di pasar dunia dan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS (Amerika Serikat), sebagian besar publik paham bahwa perekonomian nasional pun menerima ekspek dari fluktuasi dua indikator itu. Banyak orang pun mengatakan, perekonomian Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Harga barang dan jasa naik, daya beli pun menurun. Bahkan, komunitas kelas menengah pun mengeluh karena tabungan keluarga menipis, dikuras untuk menutup kebutuhan sehari-hari. Perekonomian nasional yang sedang tidak baik-baik saja itu semakin terkonfirmasi dengan laporan dan pemberitaan tentang masifnya PHK.

Berbagai kalangan sudah coba memprediksi apa yang akan dihadapi masyarakat dalam bulan-bulan mendatang. Namun, dari pemberitaan tentang PHK yang masif —dan juga fakta tentang jutaan remaja komunitas Gen-Z yang tidak bekerja— bisa ditarik kesimpulan bahwa jumlah warga yang butuh bantuan sosial dari negara akan terus dan terus bertambah. Maka, gagasan dan program prioritas dari Prabowo tentang food safety nets menjadi sangat relevan, bahkan urgen. Sebab, ketika semakin banyak orang yang kesulitan mendapatkan bahan pangan, negara harus hadir. Intervensi negara menjadi keniscayaan sebagai wujud penghormatan terhadap martabat manusia yang lemah, berkekurangan dan difabel (penyandang disabilitas).

Dalam praktiknya, Food safety nets dipahami sebagai program yang dirancang untuk melindungi individu maupun komunitas yang rentan dari kerawanan pangan. Realisasi program ini bisa dalam

bentuk bantuan pangan, subsidi harga pangan, atau pendekatan lain yang fokus pada target yang memastikan semua orang — utamanya yang paling rentan — memiliki akses ke pangan yang cukup dan bergizi.

Sejumlah negara pernah dan telah menerapkan program Food Safety Nets dengan sukses. India merancang Public Distribution System (PDS) yang bertugas menyediakan makanan pokok dengan harga subsidi kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Di Brazil, program Bolsa Família memberikan transfer tunai kepada keluarga miskin dengan syarat anak-anak mereka bersekolah dan mendapatkan imunisasi. Dengan begitu, dalam konteks penerapan food safety nets di Indonesia nantinya sudah tersedia contoh kasus yang bisa dipelajari.

Sebenarnya, dalam skala yang lebih kecil, esensi food safety nets hingga hari-hari ini pun masih dipraktikkan sejumlah komunitas di Indonesia. Terpanggil karena peduli pada mereka yang lemah, kepada warga yang berkekurangan hingga peduli pada komunitas difabel, sejumlah komunitas berinisiatif membantu mereka dengan memasak, menyediakan dan membagikan makanan. Di sepanjang durasi krisis kesehatan akibat pandemi Covid-19 (2020-2022), inisiatif yang sama sangat marak, karena banyak komunitas di berbagai daerah mempraktikkan food safety nets itu.

Kini, ketika perekonomian nasional sedang tidak baik-baik saja — yang ditandai oleh meningkatnya jumlah pengangguran akibat masifnya PHK — intervensi negara melalui food safety nets yang digagas Prabowo selaku presiden terpilih semakin nyata urgensinya. Ketika gagasan itu direalisasikan, program itu setidaknya dapat meringankan beban kehidupan bagi mereka yang lemah dan berkekurangan akibat PHK, serta membantu komunitas difabel.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2024 mencapai 25,22 juta orang. Karena itu, jumlah penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahun 2024 dinaikkan menjadi sekitar 22 juta keluarga, dari sebelumnya 21,3

Dr. H. Bambang Soesatyo, SE., SH., MBA.
Ketua MPR RI



juta keluarga.

PHK yang terjadi di berbagai sektor dan sub-sektor perekonomian Indonesia dalam beberapa bulan terakhir sudah pasti menyebabkan daya beli sebagian masyarakat melemah, termasuk untuk membeli bahan pangan. Menurut catatan Kementerian Ketenagakerjaan RI, sepanjang periode Januari-Mei 2024, sedikitnya 27.222 orang tenaga kerja terdampak PHK. Dibanding periode yang sama tahun lalu, jumlah pekerja yang di-PHK tahun ini meningkat 48,48%.

Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) melaporkan bahwa PHK di sektor industri itu telah mencapai 10.800 tenaga kerja per Mei 2024. Industri padat karya pun telah mem-PHK puluhan ribu karyawan dalam dua tahun terakhir. Agar gambarnya lebih komprehensif, data Badan Pusat Statistik (BPS) layak dihadirkan, yakni data tentang 10 juta komunitas Gen-Z yang tidak melanjutkan dan tidak bekerja. Tambahan jumlah pengangguran di kota-kota besar pun setidaknya tergambar dari sejumlah pusat belanja atau mal yang kosong. Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia bahkan memperkirakan PHK akan berlanjut pada bulan-bulan mendatang.

Hari-hari ini, apa yang sedang dihadapi masyarakat pada delapan kelurahan di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta, semakin memperjelas pentingnya kepedulian dan intervensi negara membantu mereka yang sedang menghadapi kesulitan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Gunung Kidul telah mengeluarkan status siaga kekeringan sejak 1 Juni hingga 30 Agustus 2024.

Hingga pekan ini, sudah delapan kelurahan yang

mengajukan permintaan air bersih, meliputi Kelurahan Girisuko dan Giriharjo di Kecamatan (Kapenawon) Panggang, Kelurahan Giripanggung dan Tepus di Kecamatan Tepus, kelurahan Semugih di Kecamatan Rongkop, serta Kelurahan Jepitu, Karangwuni, dan Jerukwudel di Kecamatan Girisubo. Pemda setempat bergerak cepat dengan memasok air bersih. Kalau air bersih tidak tersedia, bahkan masyarakat setempat pun tidak bisa memasak makanan dan menyediakan air minum. Dalam situasi seperti itulah negara harus hadir dengan model program food safety nets.

Semua tentu berharap kinerja perekonomian nasional hari-hari mendatang bisa membaik. Tetapi, berpijak pada situasi dan data terkini, negara memang harus menyiapkan langkah-langkah intervensi dengan model program seperti food safety nets itu. Utamanya karena jumlah warga yang butuh bantuan sosial dari negara terus bertambah.

Tantangannya adalah ketika program food safety nets itu direalisasikan di lapangan. Realisasi program ini patut dirancang sedemikian rupa untuk meminimalisir masalah, termasuk penyalahgunaan. Pemerintahan baru nanti patut belajar dari fakta kasus tentang korupsi bantuan sosial. Maka, akurasi data tentang mereka yang berhak menerima manfaat program hendaknya menjadi perhatian utama..

Banyak komunitas di berbagai daerah memiliki pengalaman yang mumpuni dan bisa diandalkan untuk melaksanakan program food safety nets itu. Akan ideal dan produktif jika pemerintah mau berkolaborasi dengan komunitas-komunitas dimaksud. □

Sidang Tahunan MPR Tahun 2024

Tetap Satu Rangkaian dengan Sidang Bersama DPR-DPD



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Format pelaksanaan Sidang Tahunan MPR Tahun 2024 tidak berbeda dengan pelaksanaan Sidang Tahunan MPR sebelumnya (Tahun 2020, 2021, 2022, dan 2023). Pelaksanaan Sidang Tahunan MPR dalam satu rangkaian (bersamaan) dengan Sidang Bersama DPR-DPD.

PIMPINAN MPR RI menggelar Rapat Pimpinan (Rapim) membahas persiapan pelaksanaan Sidang Tahunan MPR Tahun 2024 di Ruang Rapat Pimpinan, Gedung Nusantara III, Lantai 9, pada Senin, 29 Juli 2024. Rapim ini dipimpin oleh Ketua MPR Bambang Soesatyo dan dihadiri para Wakil Ketua MPR RI, yaitu Ahmad Basarah, Lestari Moerdijat, Amir Uskara, dan Fadel Muhammad. Sedangkan Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid mengikuti Rapim secara virtual melalui zoom. Rapim MPR dihadiri juga Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal MPR, Siti Fauziah, dan Deputi Bidang Pengkajian dan Pemasarakatan Konstitusi, Hentoro Cahyono, serta jajaran pejabat di Sekretariat Jenderal MPR.

Sidang Tahunan MPR Tahun 2024, sesuai rencana, digelar pada 16 Agustus 2024 di Ruang Sidang Paripurna Gedung Nusantara atau dikenal dengan Gedung Hijau, Komplek Parlemen, Jakarta. Seperti Sidang Tahunan MPR sebelumnya, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin akan menghadiri Sidang Tahunan MPR ini. Sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju dan undangan VVIP juga akan hadir dan mengikuti jalannya Sidang Tahunan MPR ini.

Usai Rapim, Bambang Soesatyo mengungkapkan bahwa format pelaksanaan Sidang Tahunan MPR Tahun 2024 tidak berbeda dengan pelaksanaan Sidang Tahunan MPR sebelumnya (Tahun 2020, 2021, 2022, dan 2023). Pelaksanaan Sidang Tahunan MPR berlangsung dalam satu rangkaian (bersamaan) dengan Sidang Bersama DPR-

DPD. Dengan format seperti ini, dalam Sidang Tahunan MPR ini, Presiden Joko Widodo menyampaikan pidatonya, yang di dalamnya juga memuat laporan kinerja lembaga-lembaga Negara. Pada hari yang sama (16 Agustus 2024), setelah jeda beberapa saat pada siang hari usai Sidang Tahunan MPR, Presiden Joko Widodo juga kembali hadir dalam Sidang Bersama DPR-DPD, dan di forum ini Kepala Negara menyampaikan Pidato Kenegaraan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

Bamsuet, sapaan Bambang Soesatyo, mengatakan, dasar hukum penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dan pasal 152 ayat (1) Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib MPR. Sidang Tahunan MPR bertujuan untuk memperkuat kedaulatan rakyat dan mendengarkan laporan kinerja lembaga-lembaga negara tentang pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945. Lebih rinci, Pasal 2 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 berbunyi: "Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibu kota negara".

Sedangkan Pasal 152 ayat (1) Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib MPR menyatakan: "Untuk menjaga dan memperkuat kedaulatan rakyat, MPR dapat menyelenggarakan sidang tahunan dalam rangka mendengarkan laporan kinerja lembaga-lembaga negara kepada publik tentang pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".



Bamsuet mengharapkan, format Sidang Tahunan MPR dalam satu rangkaian dengan Sidang Bersama DPR-DPD ini menjadi format terakhir dalam pelaksanaan Sidang Tahunan MPR di akhir masa jabatan MPR RI 2019-2024. Dia berharap, pada masa jabatan MPR 2024-2029, format Sidang Tahunan MPR kembali kepada format sebelum pandemi Covid-19, yaitu pelaksanaan Sidang Tahunan MPR diadakan terpisah dengan Sidang Bersama DPR-DPD. "Sesuai ketentuan Tata Tertib, ke depan Sidang Tahunan MPR bisa fokus mendengarkan laporan tahunan kinerja lembaga Kepresidenan, MPR, DPR, DPD, BPK, MA, MK dan KY, sebagaimana pernah dilakukan dalam Sidang Tahunan MPR Tahun 2004," ujarnya.

Sebenarnya, format pelaksanaan Sidang Tahunan MPR tahun 2024 yang dirangkaikan dengan Sidang Bersama DPR-DPD juga merupakan permintaan Presiden Joko Widodo. Permintaan itu disampaikan Presiden dalam Rapat Konsultasi Pimpinan MPR dengan Presiden di Istana Merdeka pada Jumat, 28 Juni 2024. Sidang Tahunan MPR Tahun 2024 ini akan menjadi yang terakhir untuk Presiden Jokowi sebagai

Kepala Negara RI. Sebab, Jokowi akan menyelesaikan masa tugasnya sebagai Presiden pada Oktober 2024.

"Bapak Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa sidang-sidang dalam Peringatan Kemerdekaan HUT RI agar tetap seperti tahun-tahun lalu, yaitu Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, serta Sidang Paripurna DPR RI tentang RAPBN 2025," kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno dalam keterangannya, usai mendampingi Presiden pada pertemuan itu.

Dalam pertemuan konsultasi tersebut hadir Ketua MPR Bambang Soesatyo, didampingi delapan Wakil Ketua MPR, yakni Ahmad Basarah, Ahmad Muzani, Jazilul Fawaid, Sjarifuddin Hasan, Hidayat Nur Wahid, Yandri Susanto, Muhammad Amir Uskara, dan Fadel Muhammad, serta Plt. Sekretaris Jenderal MPR Siti Fauziah. Sementara itu, hadir mendampingi Presiden Jokowi adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Hadi Tjahjanto; Menteri Sekretaris Negara Pratikno; dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Di tempat yang sama, Wakil Ketua MPR

Ahmad Basarah menyampaikan pernyataan serupa bahwa Sidang Tahunan MPR Tahun 2024 digelar sama seperti Sidang Tahunan MPR tahun-tahun sebelumnya. "Proses atau metode persidangannya telah diputuskan sama dengan Sidang Tahunan MPR di tahun sebelumnya," jelas Basarah.

Basarah juga menyebutkan, Presiden Joko Widodo akan menghadiri Sidang Tahunan MPR yang digelar 16 Agustus 2024. Presiden dan Pimpinan MPR sepakat bahwa pelaksanaan Sidang Tahunan MPR pada 16 Agustus 2024 digelar di Gedung MPR/DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat. "Kami bicarakan tentang hal itu, Presiden bersama DPR sepakat akan menghadiri Sidang Tahunan MPR pada tanggal 16 Agustus 2024 di Gedung MPR/DPR Senayan, Jakarta," ujar Wakil Ketua MPR dari Fraksi PDI Perjuangan ini.

Lebih lanjut Basarah menerangkan bahwa Sidang Tahunan MPR yang rutin diselenggarakan menjelang peringatan HUT Kemerdekaan RI berisi tentang laporan pimpinan lembaga-lembaga negara yang bersifat konstitusional. Laporan terkait capaian kinerja eksekutif diwakili Presiden Jokowi selaku Kepala Negara. "Sesuai Tata

Tertib MPR, MPR melaksanakan Sidang Tahunan MPR dalam rangka mendengarkan hal itu,” kata Basarah.

Forum Bagi Rakyat

Sidang Tahunan MPR sudah diselenggarakan sejak masa jabatan MPR RI periode 2014-2019 sebagai konvensi ketatanegaraan. Sidang Tahunan MPR sudah menjadi kesepakatan politik ketatanegaraan untuk memfasilitasi lembaga-lembaga negara menyampaikan laporan kerjanya kepada masyarakat. Sidang Tahunan MPR ini digelar agar masyarakat mendapatkan informasi tentang perkembangan pelaksanaan tugas lembaga-lembaga negara selama kurun waktu satu tahun. Ada delapan lembaga negara yang menyampaikan laporan kerjanya, yaitu: MPR, DPR, DPD, Lembaga Kepresidenan, BPK, MK, MA, dan KY. Rakyat berhak mengetahui apa dan bagaimana kinerja lembaga negara itu selama satu tahun.

Sidang Tahunan MPR merupakan kreasi ketatanegaraan yang diinisiasi oleh MPR dengan harapan setiap lembaga negara yang diberikan tugas dan wewenang oleh undang-undang dasar dapat menyampaikan laporan kerjanya kepada rakyat. Walaupun pidato disampaikan dalam forum Sidang Tahunan MPR, laporan kinerja tidak ditujukan kepada MPR, tetapi kepada rakyat.

Ada dua makna penting Sidang Tahunan MPR RI, yaitu: Pertama, Sidang Tahunan MPR digunakan oleh para pelaksana kedaulatan rakyat, yakni lembaga negara untuk menyampaikan laporan kinerja pelaksanaan wewenang dan tugasnya kepada rakyat; Kedua, Sidang Tahunan MPR sebagai bentuk akuntabilitas kinerja lembaga negara kepada rakyat sebagai pemberi mandat.

Diawali Sidang Tahunan MPR pada tanggal 14 Agustus 2015 sebagai satu konvensi ketatanegaraan baru dengan agenda pidato Presiden selaku Kepala Negara yang memuat laporan kinerja lembaga-lembaga negara (lihat bagian kedua *Sidang Tahunan MPR dari Tahun ke Tahun*). Sidang Tahunan MPR pada waktu itu diselenggarakan dalam rangka melaksanakan ketentuan Keputusan MPR Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib MPR. Sejak itu, setiap tahun MPR selalu menggelar Sidang Tahunan MPR. Sidang Tahunan MPR Tahun 2024 merupakan Sidang



Hendrawan Supratikno

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Tahunan MPR terakhir untuk MPR periode masa jabatan 2019-2024.

Pertanyaannya, apakah pelaksanaan Sidang Tahunan MPR sejak tahun 2015 hingga saat ini telah sesuai dengan tujuan dan makna semula penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR? Anggota MPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Prof. Hendrawan Supratikno, tidak menepis adanya pandangan yang melihat bahwa penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR ini menjadi rutinitas dan formalitas belaka. “Dalam persepsi banyak pihak, harus diakui bahwa penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR masih dianggap sebagai rutinitas dan formalitas saja,” katanya kepada *Majelis*.

Karena adanya persepsi dari banyak pihak tersebut, menurut Hendrawan, Sidang Tahunan MPR masih “jalan di tempat”. Pelaksanaan Sidang Tahunan MPR dari tahun ke tahun hampir sama tanpa perkembangan dan perubahan. Dalam bahasa Hendrawan,

karena persepsi dari berbagai pihak itu, “kita belum bisa beranjak dari konvensi yang selama ini terjadi atau berlangsung,” katanya.

Mengapa hal itu bisa terjadi, Hendrawan melihat akar persoalannya adalah karena UUD 1945 hasil amandemen telah menempatkan MPR sebagai lembaga negara dengan kewenangan yang berkurang (dibandingkan dengan MPR sebelum UUD 1945 diamandemen). “Akarnya adalah UUD 1945 hasil amandemen yang menempatkan MPR sebagai lembaga negara dengan kewenangan yang berkurang. Dengan amandemen UUD 1945 terjadi pergeseran dari supresmasi institusi (yang semula ada di MPR) menjadi supremasi konstitusi. Konstitusi hasil amandemen telah menggeser kewenangan besar kepada DPR. Karena itu, dalam konstitusi tersebut, peran MPR dan DPD ada di bawah bayang-bayang DPR,” jelas anggota Badan Pengkajian MPR ini.



Jimly Asshiddiqie

Dalam konteks itu, Hendrawan mengakui, ada yang perlu dibenahi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Untuk menata kembali sistem ketatanegaraan diperlukan adanya amandemen UUD. Namun, upaya untuk melakukan amandemen UUD sampai saat ini belum membuahkan hasil. “Kita menyadari ada yang tidak pas dalam sistem ketatanegaraan kita. Karena itu, sejak tahun 2004, usulan untuk melakukan amandemen kembali terus digaungkan. Namun, sampai hari ini belum membuahkan hasil,” imbuhnya.

Karena itu, Hendrawan berpendapat, selama belum ada amandemen kembali UUD untuk penataan sistem ketatanegaraan maka praktik ketatanegaraan yang berlangsung saat ini akan terus berlanjut. “Apalagi MK bahkan membuat putusan yang menyatakan MPR tidak berwenang membuat ketetapan yang sifatnya mengatur keluar (regelling),” tuturnya.

Meski demikian, bukan berarti tidak ada yang bisa dilakukan untuk perbaikan. Hendrawan meyakini masih ada jalan untuk melakukan perbaikan. “Tentu perbaikan bisa dilakukan di sana sini melalui Tata Tertib (Tatib) MPR yang berlaku ke dalam,” ujarnya.

Pendapat serupa juga disampaikan anggota MPR dari Kelompok DPD, Jimly Asshiddiqie. Dalam diskusi bertajuk “Penataan MPR, DPR, DPD RI di Masa Depan” di Ruang Delegasi, Komplek Parlemen, Jakarta, pada Senin, 29 Juli 2024, Jimly menilai, Sidang Tahunan MPR yang dirangkai dengan Sidang Bersama DPR-DPD yang diselenggarakan pada 16 Agustus, seharusnya dapat menjadi ajang bagi MPR menyerap aspirasi rakyat dan mendengar pidato kenegaraan Presiden. “Sidang Tahunan MPR itu penting, untuk laporan kepada rakyat melalui forum MPR,” katanya.

Namun, Jimly mempertanyakan Sidang Tahunan MPR yang dirangkai (bersamaan) dengan Sidang Bersama DPR-DPD, dan Sidang Paripurna DPR tentang Nota Keuangan RAPBN 2025. “Saya juga melihat Sidang Tahunan yang sekarang ini, seperti giliran. Saya kalau nonton ini, (jadi bertanya-tanya) kenapa jadi begini. Itu pemerintah juga repot,” katanya.

“Jadi, kuncinya itu di tanggal 16 Agustus, Sidang Paripurna RAPBN itu harus dievaluasi. RAPBN itu kan kaitannya dengan DPR, enggak ada kaitannya dengan MPR, (RAPBN) itu kaitannya dengan jadwal tahun

anggaran,” sambungnya.

Jimly membandingkan dengan masa pemerintahan Presiden Soeharto. Pada masa itu tahun anggaran dimulai pada bulan Mei, lalu sidang pada bulan Agustus sehingga cukup waktu untuk pembahasan. Sedangkan pada era reformasi, tahun anggaran diubah menjadi Januari, tetapi sidang tetap dilakukan pada 16 Agustus. “Ini menurut saya harus dievaluasi. Seharusnya Sidang Paripurna tentang RAPBN bukan 16 Agustus, jadi kebutuhan untuk persiapan APBN tahun berikutnya itu harus dihitung. Saya tidak tahu bulan apa sebaiknya, tapi jangan Agustus. Bulan Agustus itu lebih baik fokus untuk peringatan Hari Kemerdekaan,” tegas senator DKI Jakarta ini.

Maka, lanjut Jimly, seharusnya Sidang

Tapi agenda yang pakai pidato untuk rakyat, dan ini yang penting, tempatnya di MPR,” tegasnya.

Sementara itu, anggota MPR dari Fraks PDI Perjuangan, Riyanta, berharap, melalui Sidang Tahunan MPR bisa disampaikan hal-hal yang substansif, seperti mengembalikan fungsi lembaga MPR untuk membuat haluan negara. Selain itu, melalui Sidang Tahunan MPR, diharapkan MPR bisa mendapat kewenangan untuk membuat keputusan penting (langkah politis) yang mendesak. “Agar MPR diberikan satu ruang untuk bisa membuat keputusan-keputusan politik demi menjaga NKRI,” katanya kepada *Majelis*.

Riyanta berpendapat, dalam Sidang Tahunan MPR, semestinya lembaga-lembaga negara melaporkan kinerjanya masing-



Riyanta

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Tahunan MPR menjadi forum bagi rakyat. “Itulah sebetulnya makna dari Sidang Tahunan MPR ini. Sambil nanti lembaga-lembaga negara itu menyampaikan laporan kepada rakyat, ada pidato kenegaraan. Kayak Presiden Amerika Serikat. Setiap Juli (Hari Kemerdekaan Amerika Serikat), dia pidato. Nah, ini juga pidato kenegaraan, tapi bukan pidato teknis RAPBN, itu tempatnya mestinya di forum lain,” terangnya.

Untuk itu, Jimly mengusulkan agar Pimpinan MPR memperbaiki teknis Sidang Tahunan MPR, lalu jadwal kenegaraan juga berubah, jangan seperti sekarang ini. “Jadi, inti dari tanggal 16 Agustus itu hanya pidato presiden. Peringatan tanggal 17 Agustus tidak pakai pidato, hanya upacara bendera.

masing dan tidak diwakilkan Presiden sebagai Kepala Negara, melainkan langsung ke rakyat melalui forum Sidang Tahunan MPR. “Lembaga-lembaga negara harus produktif untuk membangun negara ini. Itulah tujuan dari Sidang Tahunan MPR, yaitu memberikan laporan kinerjanya kepada masyarakat,” ujar anggota Komisi II DPR RI ini.

Sidang Tahunan MPR sebagai tradisi atau konvensi ketatanegaraan, tambah Riyanta, perlu diteruskan pada periode jabatan MPR selanjutnya. “Saya berharap, Sidang Tahunan MPR ini menjadi forum untuk membangun satu konsensus nasional yang bermanfaat untuk membangun bangsa dan negara ini,” pungkasnya. □

DER/MBO/BSC

Sidang Tahunan MPR dari Tahun ke Tahun

Pada era kepemimpinan Presiden Joko Widodo - Jusuf Kalla, periode 2014 - 2019, merupakan awal mula tradisi penyelenggaraan Sidang Tahunan sebagai konvensi ketatanegaraan. Jadi, mulai tahun 2015 sampai saat ini, MPR secara rutin setiap tahun menyelenggarakan Sidang Tahunan MPR. Agenda Sidang Tahunan MPR ini adalah pidato presiden sebagai kepala negara yang di dalamnya juga memuat laporan kinerja lembaga-lembaga negara.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

PADA era kepemimpinan Presiden Joko Widodo – Jusuf Kalla, periode 2014 – 2019, tradisi penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR sebagai konvensi ketatanegaraan dimulai. Pada tanggal 14 Agustus 2015, MPR menyelenggarakan Sidang Tahunan MPR dengan agenda pidato presiden sebagai kepala negara yang juga memuat laporan kinerja lembaga-lembaga negara.

Pelaksanaan Sidang Tahunan MPR ini didasarkan pada Keputusan MPR Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib MPR. Terkait Sidang Tahunan ini diatur dan diakomodir dalam pasal 155 ayat (1) Peraturan MPR No. 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib MPR RI yang menyatakan: “Untuk menjaga dan memperkokoh kedaulatan rakyat, MPR dapat menyelenggarakan Sidang Tahunan dalam rangka mendengarkan laporan kinerja lembaga-lembaga negara kepada publik tentang pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Lembaga negara yang dimaksud adalah lembaga negara utama (*main state body*),

yaitu lembaga negara yang masing-masing tugas dan kewenangannya telah ditentukan dalam UUD NRI Tahun 1945. *Main State Body* ini terdiri dari MPR, DPR, DPD, Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Komisi Yudisial. Oleh sebab itu, sidang tahunan yang diselenggarakan oleh MPR ini semata-mata merupakan forum formal untuk menyampaikan laporan kinerja lembaga tinggi negara sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap rakyat.

Pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2015, untuk pertama kalinya MPR periode 2014-2019 menyelenggarakan Sidang Tahunan sebagai satu konvensi ketatanegaraan di Ruang Rapat Paripurna I, Komplek Parleman, Senayan, Jakarta. Sidang Paripurna ini dihadiri Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Selain itu, juga hadir Presiden Ketiga BJ. Habibie dan Presiden Kelima Megawati Soekarnoputri, Wakil Presiden periode 2001-2004 Hamzah Haz. Sidang Tahunan MPR juga dihadiri seluruh pimpinan lembaga negara, para menteri

Kabinet Kerja, di antaranya Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menkopolkam Luhut B. Panjaitan, Mensos Khofifah Indar Parawansa, dan Menag Lukman Hakim Saifuddin.

Ketua MPR Zulkifli Hasan membuka Sidang Tahunan MPR yang dihadiri sebanyak 470 anggota MPR. Dalam pidato pembukaan, Ketua MPR mengungkapkan bahwa terselenggaranya Sidang Tahunan MPR melalui proses yang panjang, dimulai dengan rapat gabungan antara Pimpinan MPR dengan Pimpinan Fraksi dan kelompok DPD. Rapat gabungan menyepakati pelaksanaan Sidang Tahun MPR kemudian ditindaklanjuti dengan bersilaturahim kepada Presiden Joko Widodo pada 3 Juli 2015, dan pada 9 Juli 2015 dilakukan pula pertemuan dengan pimpinan lembaga-lembaga negara, yaitu DPR, DPD, BPK, MA, MK, dan KY.

Masih dalam format yang sama, Sidang Tahunan MPR Tahun 2016 digelar pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016, di ruang Paripurna I. Sidang Tahunan dibuka oleh

Ketua MPR Zulkifli Hasan dan dihadiri 445 anggota dari 686 anggota MPR. Selain Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, di antara undangan hadir Presiden Kelima Megawati Soekarnoputri, mantan Wakil Presiden Try Sutrisno dan Boediono, serta Ibu Sinta Nuriyah, istri Presiden Keempat K.H. Abdurrahman Wahid (alm). Pimpinan lembaga negara yang hadir di antaranya Ketua DPR Ade Komaruddin, Ketua DPD Irman Gusman, Ketua MK Arief Hidayat, Ketua MA Hatta Ali, dan Ketua BPK Harry Azhar Aziz, hadir pula para Menteri Kabinet Kerja.

Pakaian Adat

Sidang Tahunan MPR tahun 2017 berlangsung di Ruang Sidang Paripurna pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017. Dihadiri Presiden Kelima Megawati Soekarnoputri, Presiden Ketiga B.J. Habibie, istri (alm) Presiden Keempat K.H. Abdurrahman Wahid, Sinta Nuriyah Wahid, Wakil Presiden Keenam Try Sutrisno, dan Wakil Presiden Kesebelas Boediono. Juga hadir para Menteri Kabinet Kerja dan pimpinan lembaga negara. Selain itu, Sidang Paripurna MPR juga diikuti para teladan nasional yang terdiri dari para guru, pelajar, kepala desa, tenaga kesehatan, dan komponen masyarakat lainnya. Ketua MPR Zulkifli Hasan membuka Sidang Paripurna MPR yang dihadiri 401 dari 689 anggota MPR.

Berbeda dengan Sidang Tahunan MPR sebelumnya, pada sidang tahunan ini



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengenakan pakaian adat. Presiden memakai baju daerah dari Sulawesi Selatan, sedangkan Wakil Presiden mengenakan pakaian adat Jawa. Presiden mengenakan jas warna hitam dengan lilitan kain sebagai bawahannya. Pakaian ini dinamakan paroci (celana), lipa garasuk (kain sarung), dan passapu (tutup kepala). Ibu negara, Iriana Joko Widodo, mengenakan pakaian adat Bali. Kebaya berwarna merah dan hiasan berwarna keemasan di kepala.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengenakan baju tradisional Sikepan asal Jawa. Untuk bawahannya, Jusuf Kalla memadukan dengan kain batik panjang yang disebut

sinjang, kemudian memakai blangkon dan sandal selop. Sang Istri, Mufidah Kalla, mengenakan kebaya warna biru panjang dipadukan dengan kain batik hitam cokelat sebagai selendang.

MPR, pada tahun 2018, kembali menggelar sidang paripurna dalam rangka Sidang Tahunan MPR di Ruang Rapat Paripurna Gedung Nusantara, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta. Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla menghadiri Sidang Tahunan MPR. Ketua MPR membuka Sidang Paripurna MPR yang dihadiri oleh total anggota MPR sebanyak 463 anggota.

Pakaian yang dikenakan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla





FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

berbeda dibandingkan tahun sebelumnya. Kini, Jokowi dan Jusuf Kalla hanya mengenakan jas. Jokowi mengenakan setelan jas berwarna biru dongker. Sementara Kalla mengenakan setelan jas berwarna hitam.

Hal penting pada Sidang Tahunan 2018, yakni Ketua MPR mengesahkan dua Panitia Ad Hoc (PAH) dalam Sidang Paripurna dalam rangka Sidang Tahunan MPR. "Panitia Ad Hoc bertugas: Pertama, mempersiapkan materi Pokok-Pokok Haluan Negara; Kedua, mempersiapkan materi tentang Rekomendasi MPR, Perubahan Tata Tertib MPR, serta Ketetapan MPR," katanya.

Panitia Ad Hoc I membahas materi Pokok-pokok Haluan Negara yang diketuai Ahmad Basarah, Wakil Ketua MPR dari Fraksi PDI Perjuangan. Panitia Ad Hoc II bertugas membahas materi Rekomendasi MPR, Perubahan Tata Tertib MPR dan Ketetapan MPR diketuai oleh Rambe Kamarul Zaman dari Fraksi Golkar.

MPR kembali menggelar Sidang Tahunan MPR pada Jumat, 16 Agustus 2019, dalam rangka memfasilitasi lembaga-lembaga negara untuk menyampaikan laporan kinerja (progress report) kepada publik. Sidang Tahunan MPR ini dihadiri Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Sebagai Kepala Negara, Presiden Joko Widodo menyampaikan secara langsung laporan kinerja lembaga-lembaga negara itu

dalam pidato kenegaraan.

Hal yang baru dan berbeda pada Sidang Tahunan MPR 2019 ini dibanding tahun-tahun sebelumnya adalah Sidang Tahunan MPR 2019 ini merupakan masa sidang terakhir bagi anggota MPR periode 2014 – 2019, dan digelar usai pelaksanaan — untuk pertama kali dalam sejarah— Pemilu Serentak atau Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden secara serentak. Pelaksanaan Pemilu Serentak berjalan agak keras dan terjadi polarisasi atau dua kubu di masyarakat.

Sidang Tahunan MPR Tahun 2019 dihadiri para pimpinan MPR, pimpinan lembaga negara, menteri kabinet kerja serta pimpinan lembaga non kementerian. Presiden Jokowi tak menyebut satu per satu nama para pejabat yang hadir. Presiden hanya menyapa Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri, Wakil Presiden keenam Try Sutrisno, hingga istri Presiden keempat Abdurrahman Wahid, Sinta Nuriyah. Jokowi kemudian menyapa pasangannya di Pilpres 2019 lalu Ma'ruf Amin sebagai wapres terpilih 2019-2024. Terakhir, menyapa Sandiaga Uno, rival dalam Pilpres 2019. Sidang Tahunan ini tidak dihadiri Prabowo Subianto.

Pandemi Covid-19

Dalam tiga tahun, yaitu tahun 2020, 2021, dan 2022, Sidang Tahunan MPR digelar di tengah pandemi Covid-19. Karena itu, Sidang Paripurna MPR pada waktu itu masih

diberlakukan pembatasan pembatasan, antara lain jumlah anggota MPR yang hadir secara fisik dibatasi, Sidang Tahunan digelar secara hybrid, dan masih diterapkannya protokol kesehatan yang ketat, seperti mencuci tangan, mengenakan masker, dan menjaga jarak.

MPR menggelar Sidang Tahunan MPR 2020 di Gedung Nusantara, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, pada Jumat, 14 Agustus 2020. Sidang Tahunan MPR kali ini digelar di tengah pandemi Covid-19 (Corona Viruse Disease 2019). Pandemi Covid-19 telah mengubah tata cara pelaksanaan Sidang Tahunan MPR secara drastis. Perubahan dapat dilihat dari jumlah anggota yang hadir secara fisik sangat dibatasi hingga syarat ketat protokol kesehatan.

Sidang Tahunan MPR ini dihadiri Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin. Presiden mengenakan baju adat Sabu dari Nusa Tenggara Timur. Peserta sidang semuanya menggunakan masker. Hadir beberapa menteri, Panglima TNI, Kapolri, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, para pimpinan lembaga-lembaga negara. Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri dan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono mengikuti jalannya Sidang Tahunan secara virtual.

Pada Senin, 16 Agustus 2021, MPR menggelar Sidang Tahunan MPR. Ada yang berbeda dengan penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR tahun ini dibanding tahun



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

sebelumnya. Pada tahun ini, penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR disatukan dalam satu rangkaian dengan Sidang Bersama DPR – DPD. Pun Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR – DPD dilaksanakan secara terbatas dari aspek kehadiran dan durasi sidang. Kondisi pandemi Covid-19 menjadi alasan penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR 2021 ini digelar secara sederhana dan terbatas.

Berlangsung secara hybrid, yaitu Daring dan Luring, Sidang Tahunan MPR hanya dihadiri 60 orang secara fisik, di antaranya Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin, Ketua MPR Bambang Soesatyo dan para Wakil Ketua MPR, Ketua DPR Puan Maharani dan para Wakil Ketua DPR, Ketua DPD La Nyala Mattalitti dan para

Wakil Ketua DPD, Pimpinan Fraksi, Ketua Fraksi di DPR, Ketua Fraksi di MPR, beberapa menteri Kabinet Indonesia Maju, Panglima TNI, Kapolri, Ketua MA, Ketua MK, Ketua KY, dan Ketua BPK. Tamu undangan VVIP mengikuti agenda Sidang Tahunan MPR secara virtual.

Dalam Sidang Tahunan MPR 2021, Presiden Joko Widodo yang mengenakan pakaian adat suku Baduy dan Wakil Presiden yang mengenakan pakaian adat Mandar, Sulawesi Barat, menjadi pusat perhatian. Begitu pun dengan Ketua DPR Puan Maharani yang mengenakan pakaian adat Bali.

MPR kembali menggelar Sidang Tahunan Tahun 2022 yang dirangkai dengan Sidang Bersama DPR-DPD pada Selasa, 16 Agustus 2022. Sidang Tahunan MPR kali ini memang berbeda dibanding dua Sidang Tahunan

sebelumnya, tahun 2020 dan 2021. Jika pada tahun 2020 dan 2021 ada pembatasan jumlah anggota dan tamu undangan, pada tahun 2022 pandemi Covid-19 telah melewati gelombang kedua dan memperlihatkan penurunan jumlah kasus positif. Pemerintah memberikan kelonggaran-kelonggaran sehingga masyarakat bisa melakukan berbagai aktivitas seperti sediakala.

Sidang Tahunan MPR pun dihadiri mayoritas anggota MPR. Tercatat sebanyak 435 anggota menghadiri Sidang Tahunan MPR 2022. Di antaranya Presiden Kelima Megawati Soekarnoputri, para mantan Wakil Presiden Try Sutrisno, Hamzah Haz, Jusuf Kalla, Boediono, para ketua umum partai politik, Panglima TNI, Kapolri, Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, para duta besar negara sahabat.

Dalam Sidang Tahunan MPR 2022 ini, Presiden Joko Widodo mengenakan pakaian adat daerah Bangka Belitung. Ibu Negara Iriana Joko Widodo mengenakan kebaya dominan merah muda. Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin mengenakan pakaian khas keraton Surakarta dan Ibu Wury Ma'ruf Amin mengenakan pakaian nasional kebaya berwarna hijau.

Sidang Tahunan MPR dalam satu rangkaian dengan Sidang Bersama DPR – DPD pada 16 Agustus 2023 digelar secara normal seperti sebelum pandemi Covid-19. Selain digelar tanpa pembatasan-pembatasan, Sidang Tahunan MPR pada 16 Agustus 2023 merupakan Sidang Tahunan MPR yang digelar di tahun politik sebelum pemilihan anggota legislatif (Pileg) dan pemilihan presiden – wakil presiden (Pilpres) Pemilu 2024.

Sidang Tahunan MPR yang digelar secara sederhana dan simpel ini dihadiri Presiden RI Joko Widodo yang mengenakan pakaian adat Tanimbar dari Maluku didampingi Iriana Joko Widodo. Sementara Wakil Presiden RI K.H. Ma'ruf Amin hadir mengenakan baju adat Demang khas Betawi didampingi Wurry Estu Handayani. Pimpinan MPR hadir secara lengkap, yaitu Ketua MPR Bambang Soesatyo, dan para Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah, Ahmad Muzani, Lestari Moerdijat, Jazilul Fawaid, Sjarifuddin Hasan, Hidayat Nur Wahid, Yandri Susanto, dan Fadel Muhammad. □

BSC





FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Prof. Dr. Ir. H. Fadel Muhammad, Wakil Ketua MPR RI

Masih Banyak PR yang Ditinggalkan untuk MPR Periode Berikutnya

MAJELIS Permusyawaratan Rakyat (MPR) kembali menggelar Sidang Tahunan MPR tahun 2024 pada 16 Agustus 2024. Seperti penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR tahun-tahun sebelumnya, tidak ada perubahan dalam format Sidang Tahunan MPR tahun 2024 ini. Sidang Tahunan MPR digelar satu rangkaian dengan Sidang Bersama DPR – DPD. Pada Sidang Tahunan MPR, Presiden Joko Widodo sebagai Kepala Negara menyampaikan pidato berisi progress report (kinerja) lembaga-lembaga negara.

Sidang Tahunan MPR sebagai sebuah konvensi ketatanegaraan memang dimaksudkan sebagai forum bagi lembaga-lembaga negara untuk menyampaikan laporan kinerja masing-masing selama setahun terakhir. MPR memfasilitasi penyampaian laporan kinerja lembaga negara melalui Sidang Tahunan MPR ini. Lembaga negara yang dimaksud adalah lembaga negara yang diberi kewenangan langsung dalam UUD NRI Tahun 1945, yaitu:

MPR, DPR, DPD, Lembaga Kepresidenan, Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Namun, ada yang istimewa dalam penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR tahun 2024. Sidang Tahunan MPR ini merupakan Sidang Tahunan MPR terakhir bagi masa bakti MPR periode 2019-2024. Penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR tahun 2024 ini pun berlangsung setelah penyelenggaraan Pemilu Serentak tahun 2024, dan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029. Dalam Sidang Tahunan MPR ini pun, pimpinan MPR telah menyiapkan legacy-legacy untuk MPR periode berikutnya, misalnya Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

Berkaitan dengan penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR tahun 2024 dan berbagai legacy yang ditinggalkan MPR di akhir periode 2019-2024 ini, Majelis mewawancarai Wakil Ketua MPR Prof. Dr.

Ir. H. Fadel Muhammad, dalam satu kesempatan. Berikut perbincangan dengan Wakil Ketua MPR dari Kelompok DPD ini. Petikannya.

MPR akan menggelar Sidang Tahunan MPR terakhir di era MPR periode 2019-2024 pada 16 Agustus 2024. Apa yang menjadi pokok perhatian dan apa harapan Bapak dengan penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR tahun 2024 ini?

Pada Sidang Tahunan MPR nanti, kita dari Pimpinan MPR akan menyampaikan bahwa selama periode ini (2019-2024), MPR banyak mendapat masukan dari berbagai kalangan. Terhadap masukan-masukan itu, MPR perlu mengambil sikap, yaitu perlu ada amandemen (perubahan) terhadap UUD NRI Tahun 1945. Akan tetapi, amandemen terhadap UUD NRI Tahun 1945 itu akan dibicarakan MPR pada periode berikutnya (MPR periode 2024-2029) setelah terbentuknya Pimpinan MPR pada periode mendatang.

Berbeda dengan Pimpinan MPR

sebelumnya (MPR periode 2014-2019), kali ini kita tidak hanya merekomendasikan soal amandemen konstitusi. Kita juga akan melampirkan beberapa pikiran yang berkembang, data-data yang ada, dan hasil kajian yang selama ini telah dilaksanakan oleh MPR (Badan Pengkajian MPR dan Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR). Kami juga akan menyampaikan kesimpulan dari pembahasan yang sudah dilaksanakan seputar PPHN.

Juga kita membahas wacana-wacana yang sudah sama-sama kita ketahui selama ini. Misalnya, soal adanya kekhawatiran kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) pada periode yang akan datang. Bagaimana MPR melihat persoalan ini.

Dari rapat konsultasi Pimpinan MPR dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara beberapa waktu lalu, Presiden mengatakan bahwa pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Paser, Penajam, Kalimantan Timur, itu masih memerlukan waktu. Meskipun sekarang Presiden menginginkan upacara Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus diselenggarakan di IKN. Presiden ingin di akhir kepemimpinannya, upacara 17 Agustus diadakan di IKN.

Tapi saya kira sebuah pembangunan ibu kota tidak bisa dilakukan serta merta, sebagaimana bahasa dalam Alqur'an, "kun fayakun". Pembangunan tidak seperti Ratu Balkis yang membangun istana hanya dalam sekejap mata. Pembangunan harus melewati proses dan bersifat teknis. Jadi kita lihat nanti bagaimana perkembangan pembangunan IKN.

Sampai saat ini pembangunan IKN masih berlangsung. Apakah pembangunan IKN ini bisa mangkrak atau tidak berlanjut?

Mudah-mudahan tidak mangkrak seperti itu. Saya berharap, pembangunan di IKN tetap jalan terus. Tetapi, pembangunan harus direncanakan lebih matang, dan perencanaan waktu yang lebih panjang, agar semua bisa berjalan dengan mulus. Bila dibandingkan dengan pembangunan sarana olahraga di Hambalang yang mangkrak, tentu berbeda dengan IKN. Perencanaan pembangunan sarana olahraga di Hambalang masih ada yang tidak matang. Tetapi, perencanaan pembangunan IKN sangat matang sekali. Pembangunan IKN sudah dirancang secara matang.

Sidang Tahunan MPR nanti juga

menyebutkan beberapa legacy dari MPR periode 2019-2024. Semua legacy ini berujung pada penguatan peran dan kelembagaan MPR RI. Bagaimana menurut Bapak?

Untuk penguatan kelembagaan MPR RI saya kira harus sampai pada titik di mana MPR memiliki undang-undang tersendiri. Selama ini pengaturan tugas dan fungsi MPR ada di UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Kita sedang mengupayakan untuk membuat UU tersendiri untuk MPR. Hal yang sama juga UU tersendiri untuk DPR dan DPD. Dengan demikian kita harus membuat MPR itu memiliki UU sendiri yang baru. Dalam UU inilah diatur tentang kewenangan, fungsi, dan tugas MPR, sehingga kelembagaan MPR

MPR periode 2019-2024 di akhir masa jabatannya untuk kemudian disampaikan kepada MPR periode yang akan datang?

Terutama bahan-bahan diskusi dan kajian yang sudah kita lakukan selama ini, misalnya diskusi dan kajian tentang Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Ini kita akan serahkan. Tentang PPHN, kita sudah mempunyai bahan-bahannya. Juga bahan-bahan dan hasil kajian menyangkut amandemen UUD. Jadi, semua sudah ada, dan nanti diserahkan Pimpinan MPR kepada MPR periode mendatang.

Secara pribadi, apakah ada pendapat atau masukan dari Bapak untuk MPR periode mendatang?



pun semakin kuat.

Artinya, setelah berakhirnya MPR periode 2019-2024, masih banyak pekerjaan dan tugas MPR yang belum selesai, dan dilanjutkan MPR pada periode selanjutnya?

Benar. Memang masih banyak Pekerjaan Rumah (PR) yang ditinggalkan MPR periode 2019-2024 untuk MPR periode berikutnya (MPR periode 2024-2029). Saya yakin, MPR periode mendatang (MPR periode 2024-2029) dapat mengerjakan tugas yang belum selesai ini dengan lebih baik. Karena, MPR periode sekarang telah menyiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan, termasuk hasil-hasil diskusi dan kajian yang telah dilakukan MPR periode 2019-2024.

Apa saja yang sudah dipersiapkan

Kita sudah sampaikan kepada Presiden ketika bertemu pada saat rapat konsultasi Pimpinan MPR dengan Presiden beberapa waktu lalu. Kita sampaikan bahwa kita ingin mengadakan amandemen UUD. Tetapi Presiden beberapa kali mengatakan, 'jangan dulu melakukan amandemen UUD'. Jangan dulu membuat kegaduhan politik karena ekonomi masih dalam keadaan sulit.

Presiden mengatakan, bila recovery dari Covid-19 sudah selesai, silakan kalau masih tertarik untuk melaksanakan amandemen UUD. Kami dapat mengerti dan memahami apa yang disampaikan oleh Presiden. Karena itu, kita tidak mau membuat perubahan UU dan UUD. Tetapi, ke depan, saya kira sudah bisa untuk melakukan amandemen UUD. □

Rapat Konsultasi dengan Presiden Joko Widodo

Bamsoet Pastikan Sidang Tahunan **MPR** 16 Agustus di Jakarta

Peringatan Proklamasi 17 Agustus Hybrid di IKN dan Istana Jakarta



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Sidang Tahunan MPR tahun ini adalah Sidang Tahunan MPR yang terakhir bagi MPR masa jabatan 2019-2024.

KETUA MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo, memastikan Presiden Joko Widodo akan hadir dan menyampaikan pidato laporan kinerja lembaga-lembaga negara dalam Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2024 di Gedung Nusantara MPR RI pada tanggal 16 Agustus 2024. Kemudian, Perayaan HUT ke-79 Republik Indonesia

Diselenggarakan secara hybrid di IKN dipimpin Presiden Jokowi didampingi Presiden terpilih Prabowo. Sementara pada saat yang sama Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka melaksanakannya di Istana Jakarta.

Sidang Tahunan MPR tahun ini adalah Sidang Tahunan MPR yang terakhir bagi MPR masa jabatan 2019-2024. "Sidang Tahunan MPR merupakan forum untuk menegakkan kedaulatan rakyat, membangun komunikasi, sekaligus wahana untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat, melalui penyampaian laporan kinerja pelaksanaan wewenang dan tugas masing-masing lembaga negara," ujar Bamsoet usai melakukan Rapat Konsultasi antara Pimpinan MPR RI dengan Presiden Joko Widodo, di Istana Negara, Jakarta, Jumat (28/6/24).

Turut hadir Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah, Ahmad Muzani, Jazilul Fawaid, Sjarifuddin Hasan, Yandri Susanto, Hidayat Nur

Wahid, Amir Uskara, dan Fadel Muhammad. Hadir pula Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, selain membahas persiapan Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2024, dibahas pula persiapan Peringatan Hari Konstitusi dan Hari Lahir MPR RI. Peringatan Hari Konstitusi akan diselenggarakan pada tanggal 18 Agustus 2024 di Gedung Nusantara IV dengan mengundang presiden, wakil presiden, pimpinan lembaga negara, menteri kabinet, dan anggota MPR RI. Sedangkan Hari Lahir MPR akan diperingati secara seremonial pada tanggal 29 Agustus 2024, dan dirayakan secara internal oleh MPR tanggal 31 Agustus 2024.

"Peringatan Hari Konstitusi merupakan rangkaian kesejarahan yang tidak terpisahkan dengan Hari Lahir Pancasila tanggal 1 Juni, dan Hari Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Tanggal 18 Agustus adalah momentum yuridis konstitusional atas kelahiran Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di tanggal yang sama, Bung Karno dan Bung Hatta dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama," kata Bamsoet.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini juga menyampaikan kepada presiden bahwa pimpinan MPR melakukan kegiatan Silaturahmi Kebangsaan untuk menyerap aspirasi dari para tokoh bangsa. Silaturahmi Kebangsaan merupakan implementasi dari visi kelembagaan MPR

sebagai “rumah kebangsaan” yang mawadahi dan menjembatani berbagai arus pemikiran.

“Beberapa tokoh bangsa yang sudah ditemui Pimpinan MPR, antara lain Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden RI ke-6 Try Sutrisno, Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla, Wakil Presiden RI ke-11 Boediono, Ketua MPR RI

ke-11 Amien Rais, Ketua MPR RI ke-14 Sidarto Danusubroto, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaemin Iskandar,” papar Bamsuet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum FKPPi ini menguraikan, dari rangkaian pertemuan Silaturahmi Kebangsaan yang telah dilaksanakan, terdapat benang merah dari pandangan para tokoh bangsa tersebut. Di mana setelah 26 tahun era Reformasi dijalani, ternyata masih ada persoalan-persoalan kebangsaan yang harus disikapi bersama.

“Persoalan-persoalan itu antara lain implementasi sistem demokrasi yang belum ideal serta belum seimbang antara aspek prosedural dan substansial. Selain, masih adanya celah dalam Konstitusi yang belum memberikan jalan keluar ketika dihadapkan pada keadaan-keadaan yang luar biasa extra ordinary yang berpotensi mengancam keutuhan bangsa dan negara,” pungkas Bamsuet. □

Silaturahmi Kebangsaan

Bertemu Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan Bamsoet Apresiasi Dukungan PAN Terhadap Pentingnya PPHN

Zulkifli Hasan menekankan, pentingnya mempertahankan pemilihan langsung oleh rakyat. Namun juga perlu dilakukan evaluasi, perbaikan, dan penyempurnaan agar pemilihan langsung tidak menghasilkan beban politik berbiaya tinggi.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KETUA MPR RI ke-16 sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengapresiasi pandangan dan dukungan Ketua Umum PAN sekaligus Ketua MPR RI ke-15 Zulkifli Hasan mengenai pentingnya Indonesia memiliki Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) sebagai road map pembangunan jangka panjang bangsa. Sehingga siapapun presidennya, tinggal melanjutkan program pembangunan yang sudah terdapat di dalam PPHN. Karena, pada prinsipnya pembangunan tidak boleh berhenti hanya karena perbedaan selera dari satu presiden ke presiden penggantinya.

“Pak Zul tadi menggambarkan tentang betapa hebatnya India, karena negaranya memiliki rencana pembangunan jangka panjang yang konsisten dijalankan oleh siapapun yang memimpin India. Pemimpin boleh berganti, namun pembangunan tidak boleh berhenti. Hasilnya, India bisa maju pesat. Bahkan bisa menjadi negara keempat

yang mencapai Bulan, setelah Amerika Serikat, Cina dan Uni Soviet,” ujar Bamsoet usai Silaturahmi Kebangsaan Pimpinan MPR dengan Ketua Umum PAN sekaligus Ketua MPR RI ke-15 Zulkifli Hasan, di kantor DPP PAN, Jakarta, Rabu (3/7/24).

Hadir para Wakil Ketua MPR RI, antara lain Ahmad Basarah, Jazilul Fawaid, Yandri Susanto, Amir Uskara, dan Fadel Muhammad. Turut Hadir jajaran pengurus DPP PAN, antara lain Sekjen Eddy Soeparno, Bendahara Umum Totok Daryanto, Wakil Ketua Umum Asman Abnur dan Viva Yoga Mauladi. Hadir pula Ketua DPW PAN Jakarta Eko Patrio.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI Bidang Hukum & Keamanan ke-7 ini menjelaskan, selain tentang PPHN, Ketua Umum PAN sekaligus Ketua MPR RI ke-15 Zulkifli Hasan juga menekankan tentang pentingnya mempertahankan pemilihan langsung oleh rakyat. Namun juga

perlu dilakukan evaluasi, perbaikan, dan penyempurnaan agar pemilihan langsung tidak menghasilkan beban politik berbiaya tinggi.

Semangat pemilihan langsung adalah untuk menegakkan kedaulatan rakyat, sehingga rakyat bisa memilih langsung pemimpinnya, dan bisa terjadi ikatan emosional yang kuat antara rakyat dengan pemimpin yang dipilih. Namun, yang terjadi saat ini justru membuat politik uang menjadi merajalela.

“Agar pemilihan langsung tidak menimbulkan politik biaya tinggi, perlu dipertimbangkan penggunaan sistem pemilu campuran terbuka dan tertutup sebagaimana diterapkan di Jerman. Pemilih bisa tetap memilih calon legislatif secara langsung, namun partai politik juga punya peran besar dan juga dapat mengajukan kader terbaiknya duduk di Parlemen,” jelas Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI (Ormas Pendiri Partai Golkar) dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menerangkan, selain bertemu Ketua Umum PAN sekaligus Ketua MPR RI ke-15 Zulkifli Hasan, pimpinan MPR sudah bertemu Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden RI ke-6 Try Sutrisno, Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla, Wakil Presiden RI ke-11 Boediono, Ketua MPR RI ke-11 Amien Rais, Ketua MPR RI ke-14 Sidarto Danusubroto, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Serta telah bertemu Presiden Joko Widodo.

Para tokoh tersebut akan membuat catatan yang berisi saran, masukan, dan evaluasi terhadap perjalanan bangsa yang sudah memasuki usia kemerdekaan ke-79



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

tahun, khususnya terkait demokrasi dan pembangunan. Catatan tersebut akan dikompilasikan dalam semacam Dokumen Kearifan Bangsa, yang akan diserahkan oleh Pimpinan MPR RI kepada Presiden Terpilih Prabowo Subianto, sebagai penutup rangkaian Silaturahmi Kebangsaan MPR RI.

“Dokumen Kearifan Bangsa masih dalam tahap penyusunan. Meskipun aspirasi dan masukan dari para tokoh bangsa tersebut sangat beragam, namun semuanya mengerucut pada kesepakatan tentang pentingnya Indonesia memiliki haluan negara, serta pentingnya melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem Pemilu. Serta

menekankan bahwa untuk melangkah ke depan menuju Indonesia Maju, kita membutuhkan komitmen kolektif dari setiap elemen bangsa, untuk bahu-membahu, bergotong-royong, bersama-sama membangun bangsa, serta memperbaiki tata kehidupan berbangsa dan bernegara,” pungkas Bamsuet. □



Bertemu Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan

Amir Uskara: Kita Sepakat Indonesia Harus Ada Roadmap Pembangunan Nasional



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

WAKIL Ketua MPR RI Amir Uskara bersama lima Pimpinan MPR RI lainnya, yakni: Ketua MPR Bambang Soesatyo, Ahmad Basarah, Yandri Susanto, Jazilul Fawaid, dan Fadel Muhammad melakukan Silaturahmi Kebangsaan kepada Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) dan Ketua MPR Periode 2014-2019, Zulkifli Hasan, di Gedung DPP PAN, Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu (3/7/2024).

Turut hadir mendampingi para Pimpinan MPR adalah Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Jenderal MPR RI Siti Fauziah beserta Deputi Bidang Pengkajian dan Pemasarakatan Konstitusi Setjen MPR, Hentoro Cahyono.

Kedatangan para Pimpinan MPR RI disambut langsung oleh tuan rumah, Sekjen DPP PAN Eddy Soeparno, dan diterima di ruang pertemuan di lantai III Gedung DPP PAN. Saat kemudian, Zulkifli Hasan tiba dan menemui para Pimpinan MPR dan langsung melakukan pembicaraan.

Usai pertemuan, kepada awak media, Amir Uskara menyampaikan bahwa dialog dengan Ketum PAN yang saat ini menjabat Menteri Perdagangan RI ini, berlangsung akrab dan hangat. “Banyak hal yang kita diskusikandengan Pak Zul, pada pertemuan hari ini, termasuk gimana arah pembangunan bangsa ini ke depan. Ada satu hal, dalam diskusi itu yang kita sama-sama sepakat, yakni memang harus ada roadmap dalam rencana pembangunan nasional kita ke depan,” ujar Pimpinan MPR dari Fraksi PPP ini.

Selaku pribadi, dia menangkap, kegiatan silaturahmi kebangsaan ini sangatlah dibutuhkan kita semua, karena berdampak baik. Pertama, kita berharap ada kesamaan pandangan dan ada benang merah dari pemikiran para petinggi dan para tokoh bangsa ini. Yaitu, Indonesia harus memiliki target mau kemana Indonesia ke depan. Tidak lagi seperti sekarang ini setiap saat selalu ada perubahan.

“Terkait PPHN, saya kira itu sudah menjadi satu kesatuan pandang, dan tidak ada yang tidak setuju akan hal itu,” terangnya.

Dalam kesempatan itu, Waketum PPP ini menjelaskan, dalam silaturahmi kebangsaan ini, Zulkifli Hasan menyinggung sedikit soal amendemen dan kaitannya dengan sistem pemilu. Zulkifli Hasan berharap, agar pemilu tetap langsung oleh rakyat.

“Ini pendapat beliau, walaupun ada beberapa alternatif tadi disampaikan Ketua MPR, berdasar dari aspirasi masyarakat yang kita serap selama ini terkait amendemen UUD NRI Tahun 1945. Diantaranya, ada yang minta kembali ke UUD 1945 asli, lalu ada yang ingin kembali ke Dekrit 1959, dan ada juga yang minta perubahan terbatas,” katanya.

Serap aspirasi kepada elemen bangsa, salah satunya melalui kegiatan Silaturahmi Kebangsaan ini, yang menurut Amir Uskara, akan terus digencarkan untuk mencari formula yang tepat terkait amendemen ini. □

Bertemua Watimpres Wiranto

Bamsoet Ingatkan Pesan Wiranto; 'Jika Kita Tersesat Maka Kembalilah ke Pangkal Jalan'

Jajaran Wantimpres yang diisi para senior bangsa yang sudah memiliki rekam jejak dalam pergulatan perjalanan bangsa sejak dari zaman Orde Lama, Orde Baru, Reformasi, hingga pemerintahan saat ini. Tidak heran jika dalam melihat permasalahan bangsa, mereka memiliki analisis sekaligus solusi yang tajam.

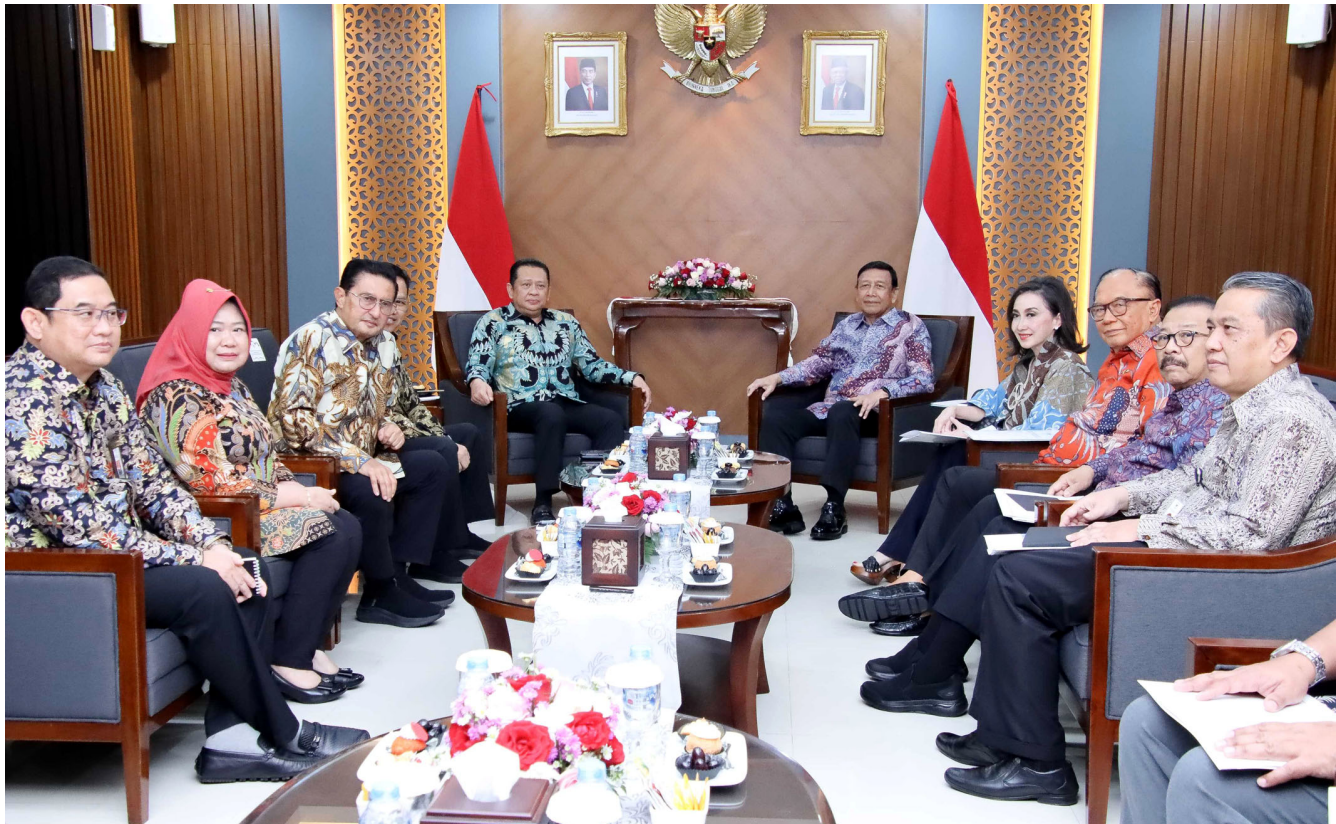


FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KETUA MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengapresiasi berbagai pandangan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Jenderal TNI (Purn) Wiranto bersama jajaran Wantimpres lainnya dalam hal penyempurnaan sistem ketatanegaraan dan sistem politik bangsa. Misalnya, terkait maraknya politik uang dalam pemilihan langsung yang tidak lepas karena masih rendahnya pendapatan perkapita bangsa yang baru mencapai sekitar USD 4.919.

"Sedangkan Amerika, negara kampiunnya demokrasi, memiliki pendapatan perkapita

sebesar USD 80.412, maupun Korea Selatan sebesar USD 35.569. Data lain berdasarkan kajian Prof. Boediono, menunjukkan bahwa pada penghasilan per kapita di atas USD 6.000, daya hidup sistem demokrasi jauh lebih besar dan probabilitas kegagalannya hanya 1/500. Artinya, pendapatan perkapita Indonesia masih di bawah batas kritis demokrasi sebesar USD 6.000," ujar Bamsoet usai Silaturahmi Kebangsaan Pimpinan MPR dengan Jajaran Wantimpres, di Kantor Wantimpres, Jakarta, Jumat (5/7/24).

Silaturahmi Kebangsaan ini sekaligus sebagai kunjungan balasan atas kedatangan Wantimpres ke MPR RI beberapa waktu lalu.

Turut hadir para Wakil Ketua MPR RI, antara lain Amir Uskara dan Fadel Muhammad. Hadir jajaran Wantimpres, antara lain: Ketua Wiranto, serta para anggota yakni Putri Kus Wisnu Wardani, Sidarto Danusubroto, dan Sukarwo.

Ketua DPR RI ke-20 dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7 bidang Hukum & Keamanan ini menjelaskan, sebagaimana disampaikan Ketua Wantimpres Jenderal TNI (purn) Wiranto, bahwa 'jika kita tersesat, maka kembalilah ke pangkal jalan'. Artinya, jika saat ini bangsa Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan maka tidak ada salahnya bangsa Indonesia kembali kepada



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

jati diri bangsa.

“Seperti dalam menghadapi karut marutnya sistem Pemilu langsung yang berefek pada politik uang, maka tidak ada salahnya jika kita kembali kepada semangat jati diri demokrasi yang dimiliki bangsa ini. Kita lihat lagi semangat sila ke-4 Pancasila

yang merupakan basis demokrasi Pancasila yang sesuai jati diri bangsa. Sehingga kita bisa meluruskan kembali jalan demokrasi agar sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi Pancasila, bukan lagi berdasarkan demokrasi angka-angka atau juga dikenal dengan Demokrasi NPWP

(nomor piro wani piro),” jelas Bamsuet.

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI (Ormas Pendiri Partai Golkar) dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menerangkan, jajaran Wantimpres yang diisi para senior bangsa, sudah memiliki rekam jejak dalam pergulatan perjalanan bangsa sejak dari zaman Orde Lama, Orde Baru, Reformasi, hingga pemerintahan saat ini. Tidak heran jika dalam melihat permasalahan bangsa, mereka memiliki analisis sekaligus solusi yang tajam.

“Dalam diskusi yang berlangsung hangat tadi, kita juga bahas tentang sistem ketatanegaraan dengan tidak adanya lembaga tertinggi negara. Karena itu, sangat penting bagi bangsa Indonesia untuk mengembalikan kembali posisi MPR sebagai lembaga tertinggi berdasarkan sejarah dan basis kultural bangsa. Sehingga kembali memiliki kewenangan subyektif superlatif dan kewajiban untuk mengambil keputusan atau penetapan yang bersifat pengaturan, guna mengatasi dampak dari suatu keadaan kahar fiskal maupun kahar politik yang tidak dapat diantisipasi dan tidak bisa dikendalikan secara wajar,” pungkas Bamsuet. □

Bertemu Presiden PKS Ahmad Syaikh

Bamsuet Terima Aspirasi Pimpinan DPR Diisi Seluruh Perwakilan Partai Politik di DPR

Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo menyatakan, menurut pendapat pribadi, usulan Presiden PKS, Ahmad Syaikh, agar semua partai politik yang ada di DPR bisa memiliki wakil di pimpinan DPR periode mendatang patut dipertimbangkan.

KETUA MPR RI dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo menerima aspirasi usulan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Syaikh, agar pimpinan DPR mendatang diisi oleh seluruh perwakilan partai politik yang ada di DPR RI. Saat ini Pimpinan DPR terdiri atas satu orang ketua dan empat orang wakil ketua yang berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPR. Sementara, total partai politik yang berada di parlemen periode 2019-2024 sebanyak sembilan partai politik.

“Usulan Presiden PKS, Ahmad Syaikh, agar semua partai politik yang ada di DPR bisa memiliki wakil di pimpinan DPR periode mendatang, menurut pendapat pribadi saya, patut dipertimbangkan. Sehingga, dengan adanya perwakilan setiap partai politik di pimpinan DPR akan memiliki manfaat yang besar dalam memperlancar komunikasi antarpolitical di Senayan. Hal ini sudah diterapkan dan dibuktikan oleh MPR periode sekarang, di mana semua partai politik dan perwakilan DPD memiliki satu wakil di pimpinan MPR,” ujar Bamsuet saat

Silaturahmi Kebangsaan Pimpinan MPR dengan Pengurus DPP PKS di Jakarta, Senin (8/7/24).

Hadir, antara lain Wakil Ketua MPR yang juga Ketua MPR RI ke-12 dan Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid, Presiden PKS Ahmad Syaikh, Sekjen Aboe Bakar Al Habsyi, Bendum Mahfudz Abdurrohman, Ketua Fraksi PKS MPR Tifatul Sembiring, Kabid Kepemudaan Gamal Albin Syaid, serta Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga Kurniasih Mufidayati.

Ketua DPR RI ke-20 dan Ketua Komisi III



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

DPR RI ke-7 bidang Hukum & Keamanan ini menjelaskan, pengurus DPP PKS juga sepakat untuk dilakukan kajian mendalam terhadap UUD NRI Tahun 1945. Konstitusi terikat oleh realitas zaman, karenanya konstitusi tidak boleh 'anti' terhadap perubahan. Perubahan zaman adalah sebuah keniscayaan yang tidak akan mungkin dihindarkan.

"Konstitusi yang dimiliki bangsa Indonesia harus berupa konstitusi yang hidup (living constitution) dan bekerja (working constitution). Konstitusi yang hidup adalah konstitusi yang mampu menjawab segala

tantangan dan dinamika zaman. Sementara, konstitusi yang 'bekerja' adalah konstitusi yang benar-benar dijadikan rujukan dan dilaksanakan dalam praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara," kata Bamsuet.

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI (Ormas Pendiri Partai Golkar) dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menerangkan, dari tahun 1999 hingga 2002, MPR telah melakukan empat kali amendemen. Namun, sejumlah kalangan menilai masih terdapat kelemahan sistematis dan substansi pada konstitusi pasca amendemen.

Persoalan mengenai kedudukan dan kewenangan lembaga negara, tidak adanya lagi garis besar haluan negara serta sistem demokrasi pemilihan langsung yang kebablasan, masih menyisakan problematika tersendiri. Ditambah lagi, kenyataan bahwa perubahan konstitusi tidak serta-merta menumbuhkan budaya taat berkonstitusi, atau menjamin segala peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar sudah sejalan dengan konstitusi.

"Pimpinan MPR sepakat dengan Pengurus DPP PKS bahwa nantinya apabila dilakukan amendemen UUD NRI Tahun 1945, perubahan yang dilakukan adalah perubahan menuju arah perbaikan. Semisal, kembali menghadirkan pokok-pokok haluan negara sebagai bintang arah pembangunan nasional, mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara sehingga memiliki kewenangan subjektif superlatif, perbaikan sistem demokrasi pemilihan langsung yang bebas dari praktik transaksional ataupun menghadirkan kembali utusan golongan masuk ke dalam MPR RI," urai Bamsuet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum FKPPi ini menambahkan, sebelum bertemu Presiden PKS Ahmad Syaikh, pimpinan MPR sudah bertemu Presiden Joko Widodo, Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden



RI ke-6 Try Sutrisno, Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla dan Wakil Presiden RI ke-11 Boediono.

Pimpinan MPR juga telah bertemu Ketua MPR RI ke-11 Amien Rais, Ketua MPR RI ke-14 Sidarto Danusubroto, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai

Amanat Nasional sekaligus Ketua MPR RI ke-15 Zulkifli Hasan, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Jenderal TNI (Purn) Wiranto, dan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono.

Pimpinan MPR akan bertemu dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

Kemudian dilanjutkan bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan. Terakhir, pimpinan MPR akan bertemu dengan Presiden Terpilih Prabowo Subianto, sebagai penutup rangkaian Silaturahmi Kebangsaan MPR RI serta menyerahkan 'Dokumen Kearifan Bangsa' sebagai masukan untuk pemerintahan mendatang," pungkas Bamsuet. □

Bertemu Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono

Bamsuet Terima Aspirasi Evaluasi Sistem Pemilu dan Demokrasi

Sistem demokrasi langsung yang saat ini berlaku memungkinkan terjadinya demokrasi transaksional, dan salah satu faktor terpilihnya seorang pemimpin justru berdasarkan modal biaya dibandingkan faktor lainnya.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KETUA MPR RI dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo menyampaikan, diskusi hangat pimpinan MPR RI dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono terkait agenda kebangsaan ke depan, termasuk sistem politik dan kondisi demokrasi. Perlu evaluasi dan koreksi

sepanjang untuk memperbaiki masa depan Indonesia. Termasuk, apakah kehidupan demokrasi Indonesia saat ini sudah berada di dalam track yang benar atau sebaliknya.

“Salah satu hasil Silaturahmi Kebangsaan yang di lakukan Pimpinan MPR kepada para tokoh bangsa dan ketua partai politik,

semuanya mengeluhkan pelaksanaan pemilu yang sangat sarat money politic dan berbiaya sangat tinggi. Bahkan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono menilai, biaya politik semakin mahal. Karena itulah perlu dilakukan perbakikan,” ujar Bamsuet usai Silaturahmi Kebangsaan Pimpinan MPR dengan Pengurus DPP Partai Demokrat di Jakarta,



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Selasa (16/7/24).

Hadir para Wakil Ketua MPR, antara lain Jazilul Fawaid, Syarifuddin Hasan, Hidayat Nur Wahid, dan Amir Uskara. Sementara Pengurus Partai Demokrat hadir Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono, Sekjen Teuku Riefky Harsya, Bendahara Umum Renville Antonio, Waketum Benny K. Harman, Wasekjen Jovan Latuconsina, dan Kepala BPOKK Herman Khaeron.

Ketua DPR RI ke-20 dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7 bidang Hukum & Keamanan ini menjelaskan, perbaikan sistem Pemilu

diharapkan bisa dilaksanakan dan diselesaikan pada awal pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka. Beberapa perbaikan dan penyempurnaan tersebut selain mengenai sistem Pemilu juga sebaiknya pemilihan legislatif (Pileg) dan pemilihan presiden (Pilpres) dilaksanakan secara terpisah.

“Mas AHY tadi mengusulkan agar pelaksanaan Pileg dan Pilpres jangan dilakukan serentak. Pelaksanaan Pileg harus dilakukan sebelum Pilpres. Sehingga yang dijadikan acuan dalam mengajukan

pasangan Capres adalah hasil Pileg terbaru dengan mengikuti dinamika politik yang ada. Pada Pilres 2024 yang baru kita lalui bersama, acuan pengajuan pasangan Capres adalah hasil Pileg lima tahun sebelumnya, yaitu tahun 2019, sehingga dinilai sudah tidak up to date,” kata Bamsuet.

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI (Ormas Pendiri Partai Golkar) dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menerangkan, sistem demokrasi pemilihan langsung yang mengakibatkan maraknya politik uang juga perlu dievaluasi kembali. Negara harus menilai apakah demokrasi saat ini lebih banyak manfaat atau malah mudarat bagi masyarakat.

“Sistem demokrasi langsung yang saat ini berlaku sudah memungkinkan terjadinya demokrasi transaksional dan salah satu faktor terpilihnya seorang pemimpin justru berdasarkan modal biaya dibandingkan dengan faktor lainnya. Harapan saya agar pemimpin kita lahir karena integritas dan kapasitas. Bukan karena isi tasnya,” urai Bamsuet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum FKPPi ini menambahkan, pemerintah juga perlu hadir untuk memberikan pendanaan yang layak bagi partai politik. Pendanaan negara kepada parpol penting karena parpol merupakan salah satu institusi demokrasi yang penting dan strategis, karena memiliki fungsi, tugas, dan tanggung jawab melakukan rekrutmen politik.

Saat ini, berdasarkan PP Nomor 1 Tahun 2018, negara hanya bisa memberikan bantuan pendanaan kepada partai politik sebesar Rp 1.000 per suara sah. Jumlah tersebut sangat kecil untuk pendanaan partai politik. Menurut hasil kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan LIPI beberapa waktu lalu, idealnya negara membiayai partai politik sebesar Rp 10.000 per suara sah.

“Hasil kajian KPK dan LIPI tersebut sangat menarik untuk diekspansi lebih jauh, sehingga partai politik tidak lagi terjebak dalam oligarki. Membersihkan partai politik dari torpedo oligarki kekuatan uang akan berefek pada kualitas pengambilan keputusan politik dalam melayani kepentingan rakyat yang lebih besar,” pungkas Bamsuet. □



Peringatan Hari Kebaya Nasional, 24 Juli

Kebaya Warisan Budaya Bersama Antar-Bangsa

Kebaya merupakan warisan kebudayaan bersama antarbangsa yang berpotensi menjadi instrumen perdamaian dunia.

KEBAYA berkembang melintasi berbagai suku bangsa dan etnis sehingga berpotensi menjadi karya yang mampu menjadi pemersatu dan mewujudkan perdamaian antarbangsa,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam sambutannya saat membuka diskusi daring bertema: ‘Perjalanan Kebaya Indonesia untuk Perdamaian Dunia’ yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12 bersama Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Kongres Wanita Indonesia (Kowani), Rabu (10/7).

Diskusi yang dimoderatori Luthfi Assyaukanie, Ph.D., (Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI) itu menghadirkan Dr. Ir. Giwo Rubianto Wiyogo, M.Pd., (Ketua Kowani), Ms. Hanako Ikeno (Presiden Global Peace Women), Prof. Ismunandar, Ph.D., (Delegasi Tetap Republik Indonesia untuk UNESCO di Paris), dan Penny Herasati (Direktur Sosial Budaya & Organisasi Internasional Negara - Negara Berkembang, Kementerian Luar Negeri RI) sebagai narasumber.

Selain itu, hadir pula Ir. Indiah Marsaban, MBA., (Dosen FIB Universitas Indonesia) sebagai penanggap.

Secara historis, jelas Lestari, kebaya merupakan kebudayaan bersama, yang tidak hanya dimiliki satu negara saja. Dalam perspektif sejarah, jelas dia, kebaya berkembang dalam peradaban manusia, mempertemukan ragam suku bangsa dan etnis.

Kebaya juga, tambah Rerie, sapaan akrab Lestari, merepresentasi budaya dan bahasa tertentu, serta dapat diterima sebagai budaya bersama.

Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu mengungkapkan, berdasarkan catatan sejarah, kebaya terhubung dengan banyak negara pada periode modern. Seperti, antara lain Tiongkok, Arab, India, Portugal, Belanda dan negara-negara sekawasan.

Keterhubungan masa lalu itu terjadi,



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

tambah dia, karena perdagangan rempah dan kerja sama perdagangan lainnya, sehingga menciptakan akulturasi budaya yang diteruskan lintas generasi dalam bentuk fesyen dan bahasa.

Atribut keterhubungan tersebut, tegas Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, menguatkan kebaya sebagai alat diplomasi budaya untuk perdamaian dunia.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Kowani Giwo Rubianto Wiyogo mengungkapkan, peringatan Hari Kebaya Nasional yang pertama diselenggarakan pada 24 Juli 2024 di Istora Senayan, Jakarta.

Peringatan Hari Kebaya Nasional itu, tegas Giwo, harus dimanfaatkan sebagai momentum meningkatkan persatuan dan perjuangan perempuan Indonesia agar semakin berdaya dan naik kelas. “Jadikan kebaya sebagai alat pemersatu bangsa dan negara-negara sekawasan,” tegas Giwo.

Presiden Global Peace Women, Hanako Ikeno, mengungkapkan, sampai akhir tahun lalu dia tidak tahu apa itu kebaya. Hingga akhirnya, ujar Hanako, dia menyukai kebaya. Kebaya, menurut dia, merupakan metafora dalam pembicaraan di global peace foundation yang selalu berupaya membangun

persatuan.

Karena, tegas Hanako, hampir di sejumlah negara sudah menggunakan kebaya, seperti di Indonesia, Singapura, Brunei, Malaysia, dan Thailand, yang saat ini sedang bersama mengajukan kebaya sebagai warisan budaya tak benda ke UNESCO. Kebaya itu, tegas dia, melampaui batas agama dan etnis, terbukti dengan adanya pengajuan bersama kebaya oleh sejumlah negara ke UNESCO.

Delegasi Tetap Republik Indonesia untuk UNESCO di Paris, Ismunandar, mengungkapkan, secara resmi kebaya diajukan bersama menjadi warisan budaya tak benda ke UNESCO pada Maret 2023, prosesnya diperkirakan sekitar dua tahun. Bila prosesnya lancar, jelas Ismunandar, pengajuan bersama kebaya itu akan disidangkan UNESCO pada Desember tahun ini.

Menurut dia, hingga saat ini, 13 warisan budaya Indonesia sudah tercatat di UNESCO. Selain itu, jelas Ismunandar, saat ini Indonesia juga berupaya menginskrripsikan Kolintang yang mirip Balafon, alat musik kayu dari Afrika dan Mali yang sudah diakui UNESCO sebagai warisan budaya dunia.

Ismunandar berpendapat, upaya untuk

mendaftarkan warisan budaya ke UNESCO penting bagi sebuah negara. Selain sebagai bagian tanggung jawab negara dalam melestarikan budaya, jelas dia, juga bisa dimanfaatkan sebagai alat diplomasi hingga ekonomi.

Dosen FIB Universitas Indonesia, Indiah Marsaban berpendapat kebaya itu mempersatukan untuk mewujudkan perdamaian. Di Indonesia, tegas Indiah, mulai mbok jamu sampai Ibu Negara memakai kebaya, sehingga kebaya itu egaliter dan inklusif.

Siapa saja bisa memakai kebaya.

Sebuah warisan budaya yang sudah tercatat di UNESCO, tambah dia, jika tidak dijaga, dirawat, dan dilestarikan, bisa tidak diakui bila budaya itu tidak hidup lagi.

Pada kesempatan itu, wartawan senior Saur Hutabarat, berpendapat, diskusi tentang kebaya menambah pengetahuan kita. Memakai kebaya, menurut Saur, selain mencerminkan sikap egaliter dan inklusif, juga estetik.

Bergabungnya Indonesia dengan empat

negara lain dalam pengajuan kebaya sebagai warisan budaya tak benda, jelas Saur, jelas memperlihatkan solidaritas dan memperkuat kebaya sebagai alat diplomasi.

Saur berharap, dengan adanya peringatan Hari Kebaya Nasional pada 24 Juli banyak orang yang berkebaya dan menjadikan kebaya pakaian keseharian.

Dengan didaftarkan kebaya ke UNESCO dan ditetapkan Hari Kebaya Nasional, tegas Suar, memperkuat makna kebaya dalam kehidupan berbangsa. □

Dari Green Climate Internasional

Yandri Susanto Raih Penghargaan Tokoh Peduli Lingkungan Hidup

Penghargaan yang diberikan kepada salah seorang tokoh di Indonesia dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia serta masyarakat global.

WAKIL Ketua MPR RI Yandri Susanto mendapatkan penghargaan dari Green Climate International (GCI). Penghargaan ini diberikan atas kontribusinya dalam mendukung perlindungan hutan, lingkungan hidup, pengurangan polusi udara, serta penciptaan desa wisata yang ramah lingkungan.

Sebagai orang Indonesia pertama yang mendapatkan penghargaan dari GCI, Yandri berharap hal ini dapat membawa berkah bagi masyarakat Indonesia.

"Penghargaan ini saya terima sebagai bentuk dukungan masyarakat Internasional atas pelestarian lingkungan hidup di Indonesia," jelas Yandri saat menerima penghargaan di Dusseldorf Jerman, Jum'at, 12 Juli 2024. Penghargaan diberikan langsung oleh Ketua GCI, Fahad Attamimi, serta Ketua Cabang Jerman GCI, Mohamad Lazaar.

Atas penghargaan ini, Yandri mengaku semakin terpacu untuk terus berkonsentrasi dan berkontribusi kepada lingkungan. Dia memanggil kepada seluruh anak bangsa untuk satu nafas, gerakan, dan jiwa bahwa sejatinya lingkungan itu harus diselamatkan.

"Lingkungan bukan untuk kita prakporandakan. Bila kita menyelamatkan



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

lingkungan sejatinya menyelamatkan diri kita sendiri," pesan Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP PAN ini. Yandri mengingatkan, bila tidak ada orang yang peduli untuk perbaikan lingkungan maka dunia akan menuju ke kegelapan.

Selain itu, Yandri juga mendorong lahirnya

desa wisata yang ramah lingkungan sehingga menjadi daya tarik wisatawan asing untuk datang ke Indonesia. Kehadiran desa wisata ramah lingkungan, lanjut dia, bisa mendatangkan wisatawan mancanegara sehingga menambah pemasukan negara dari sektor pariwisata.

“Para wisatawan mancanegara juga bisa menikmati lingkungan yang sustainable di Indonesia,” kata dia.

Sementara itu, Ketua GCI Fahad Attamimi memuji sepak terjang Yandri dalam memberikan dukungan perlindungan hutan serta pelestarian mangrove di beberapa wilayah Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. “Pak Yandri sangat perhatian dalam melakukan gerakan pelestarian lingkungan hidup,” puji Fahad

Fahad berharap, dengan adanya penghargaan yang diberikan kepada salah seorang tokoh di Indonesia dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia serta masyarakat global. “Negara-

negara industri di Eropa membutuhkan Indonesia menjadi paru-paru dunia untuk mengurangi polusi udara,” kata Fahad

Tentunya, lanjut Fahad, program pelestarian lingkungan yang sudah berjalan ini akan memberikan manfaat kepada masyarakat Indonesia dan mendorong negara-negara di Eropa untuk membangun industri di Indonesia. “Sehingga hasil industrinya sudah lolos kualifikasi ramah lingkungan,” ucap Fahad.

Selain itu, Fahad mendorong agar lebih banyak lagi perusahaan Eropa, khususnya Jerman, bisa melakukan produksi di Indonesia. Apalagi, saat ini sudah banyak sarana dan prasarana yang mendukung

perusahaan agar ramah lingkungan. “Jadi, silakan order produk dari Indonesia yang berkelanjutan dan ramah lingkungan,” ajak Fahad.

Lebih lanjut, Fahad menjelaskan, GCI dibentuk untuk mendukung kelestarian lingkungan hidup di dunia. Dia mengakui, kerusakan lingkungan hidup yang ada sudah demikian parah. Untuk itu, GCI bergerak agar bagaimana masalah recovery hutan, air, dan yang lainnya bisa tercipta.

“Kami senang ketika pemerintah tengah membangun green energy, mobil listrik, dan langkah-langkah penyelamatan lainnya yang semuanya bertujuan untuk mengurangi atau menghilangkan polusi,” tutup Fahad. □

Peringatan Hari Koperasi ke-77

Bamsoet Dorong Koperasi Kembali Menjadi ‘Soko Guru’ Perekonomian Nasional

Pada tataran realita, implementasi kebijakan pembangunan ekonomi nasional belum sepenuhnya mampu mewujudkan kondisi ideal yang sepenuhnya berpihak pada koperasi.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KETUA MPR RI ke-16 sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo menuturkan, sejatinya kedudukan koperasi dalam sistem perekonomian nasional sangat kuat. Sebagaimana diatur pada Pasal 33 ayat (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.” Di mana bangun perekonomian yang paling nyata dan paling

sesuai dengan amanat Konstitusi tersebut adalah koperasi.

“Kita juga dapat merujuk pada Ketetapan MPR Nomor 16/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi, sebagai salah satu Ketetapan MPR yang



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

dinyatakan masih berlaku. Ketetapan MPR RI tersebut menjadi arah kebijakan, strategi, dan pelaksanaan pembangunan sistem perekonomian nasional yang kuat, dan lebih memberikan kesempatan, dukungan dan pengembangan ekonomi rakyat yang mencakup koperasi, usaha kecil dan menengah sebagai pilar utama pembangunan ekonomi nasional,” ujar Bamsoet dalam sambutan secara daring pada Seminar Nasional Peringatan Hari Koperasi ke-77 yang diselenggarakan Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN) di Batam, Kamis (11/7/24).

Ketua DPR RI ke-20 dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7 bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, dalam konteks perekonomian nasional, memajukan koperasi adalah tugas dan amanat sejarah. Cikal bakal gerakan koperasi diperkenalkan pertama kali pada tahun 1896 oleh Raden Arya Wiriaatmaja untuk menolong pegawai pribumi, pedagang kecil, dan petani dari jeratan lintah darat. Gagasan semangat kebersamaan untuk membantu perekonomian rakyat, terutama golongan ekonomi lemah inilah yang menjadi inti dari

gerakan koperasi.

“Bung Hatta mengungkapkan bahwa filosofi koperasi pada hakikatnya sudah mengakar dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang gemar bergotong-royong, tolong-menolong, memelihara toleransi, dan rasa tanggung jawab bersama. Lebih jauh lagi, koperasi dimaksudkan untuk menempa ekonomi rakyat yang lemah agar menjadi kuat. Ketika pertama kali organisasi Koperasi Indonesia didirikan pada tanggal 12 Juli 1960, beliau menegaskan bahwa ekonomi kerakyatanlah yang bisa menyejahterakan rakyat Indonesia,” kata Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI (Ormas Pendiri Partai Golkar) dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menerangkan, seiring dinamika zaman kiprah koperasi dirasa belum optimal. Pada tataran realita, implementasi kebijakan pembangunan ekonomi nasional belum sepenuhnya mampu mewujudkan kondisi ideal yang sepenuhnya berpihak pada koperasi. Koperasi sebagai manifestasi kebersamaan dalam demokrasi ekonomi masih belum mampu berkembang dan maju sejajar dengan sektor pemerintah dan swasta.

“Di sinilah pentingnya memaknai kembali koperasi secara komprehensif. Tidak hanya mengenai tata kelola koperasi, melainkan juga dari aspek filosofi, prinsip, kaidah, serta ide yang diharapkan menjadi solusi bagi kemajuan perkoperasian di Indonesia,” urai Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum FKPPi ini menambahkan, untuk mendudukkan kembali peran, kedudukan, dan marwah Koperasi sebagai ‘soko guru’ perekonomian nasional, dapat merujuk pada tujuan pokok didirikannya koperasi. Yaitu memajukan kesejahteraan anggota dan kesejahteraan masyarakat, serta berpartisipasi untuk membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur.

“Untuk mencapai tujuan tersebut, di satu sisi koperasi harus mampu membangun dirinya sendiri. Di sisi lain, harus ada keberpihakan dari segenap pemangku kepentingan agar koperasi menjadi kuat dan mandiri, mampu memberdayakan potensi ekonomi para anggotanya dan masyarakat pada umumnya,” pungkas Bamsoet. □

Pentingnya Edukasi **Politik** Berbasis Politik Kewargaan



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Kondisi demokrasi di Indonesia menjadi bahan kajian yang cukup menarik dalam forum Focus Group Discussion (FGD) di Kota Surabaya, Jawa Timur, 19 Juni 2024. Para akademisi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga (Unair), yang menjadi peserta FGD itu, antara lain membahas soal peran oligarki. “Agar oligarki tidak muncul kembali perlu memperkuat basis masyarakat sipil, kebutuhan akan lahirnya partai politik yang progresif, dan mendorong edukasi politik berbasis politik kewargaan,” begitu antara lain pendapat yang mengemuka.

BADAN Pengkajian MPR adalah menyelenggara FGD itu bekerjasama dengan FISIP Unair. FGD yang bertema: ‘Penguatan Demokrasi Indonesia’ ini dihadiri oleh pimpinan dan anggota Badan Pengkajian MPR dan Dekan FISIP beserta para akademisi FISIP Unair lainnya. Dari Badan Pengkajian MPR hadir: Drs. H. Djarot Saiful Hidayat, M.S., dari Fraksi PDI Perjuangan; H. Mustafa Kamal, SS., dari Fraksi PKS; dan Filep Wamafma, S.H., M.Hum., anggota MPR dari Kelompok DPD.

Sedang dari pihak FISIP Unair hadir, antara lain: Dekan FISIP Unair Prof. Dr. Drs. Bagong Suyanto, M.Si.; Dosen Luar Biasa Prof. Dr. Ramlan Surbakti, M.A., Ph.D.; para dosen Airlangga Pribadi Kusman S.IP., M.A., Ph.D.; Dr. Drs. Kris Nugroho M.A.; dan Dr. Dra. Dwi Widyastuti Budi Hendrarti, M.A.

Dosen Unair, Airlangga Pribadi, dalam makalahnya yang berjudul: ‘Penguatan Demokrasi Indonesia: Antara Sistem Demokrasi dan Relasi Kuasa,’ memaparkan soal problem pelemahan demokrasi di Indonesia. Menurut Airlangga Pribadi, ada tiga hal yang menjadi factor pelemahan demokrasi di Indonesia, yakni: sistem politik dan ketatanegaraan yang tidak sesuai dengan semangat demokrasi Pancasila; corak relasi kekuasaan yang tidak sejalan dengan

semangat demokrasi Pancasila; problem etika dari subyek-subyek politik yang tidak sejalan dengan semangat demokrasi Pancasila.

Pemakalah lalu mengutip pandangan dan nilai demokrasi menurut para pendiri republik. Bung Hatta misalnya, pernah mengatakan, sekarang kalau kita hendak memperbaiki kembali penghidupan rakyat maka haruslah kita menerbitkan semangatnya dengan mengemukakan kebenaran, bahwa rakyatlah yang mempunyai kedaulatan (*Kata Pendahuluan buat Daulat Rakyat, Daulat Rakyat, 20 September 1931*). Tiga fasal sendi Indonesia Merdeka, yakni: 1). Cita-cita rapat. 2). Cita-cita massa-protest. 3). Cita-cita saling tolong-menolong (gotong royong). Kita harus melanjutkan “demokrasi asli” menjadi “kedaulatan rakyat,” kalau tidak maka atas dasar “demokrasi asli” kaum ningrat dapat mempertahankan feodalisme atas nama demokrasi asli (*Demokrasi Asli Indonesia dan Kedaulatan Rakyat, Daulat Rakyat No. 12, 10 Januari 1932*).

Sedang pandangan dan nilai demokrasi, menurut Bung Karno, adalah: Pancasila sebagai *leitstar* (bintang) dinamis dan meja statis. Demokrasi-Masyarakat (Sosio-Demokrasi) adalah timbul karena Sosio-nasionalisme. Sosio-demokrasi tidak ingin mengabdikan kepada kepentingan sesuatu gundukan kecil saja, tetapi kepentingan



masyarakat (Fikiran Ra'jat 1932). Serta ungkapan, kalau kita hendak mencari demokrasi hendaknya bukan demokrasi barat, tetapi permusyawaratan yang memberi hidup, yakni politik-ekonomishe democratie yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial! Rakyat Indonesia sudah lama bicara tentang hal ini. Apa yang dimaksud dengan Ratu Adil? Ia adalah *sociale rechtvaardigheid* (Lahirnya Pancasila, 1 Juni 1945).

Airlangga Pribadi pun memaparkan hasil amandemen UUD Tahun 1945 yang bisa jadi penyebab terjadinya perubahan tatanan politik. Dia menyebut hasil amandemen itu adalah: (a). Penguatan sistem presidensial dengan Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat (Pasal 6A ayat (1), UUD NRI Tahun 1945); (b). MPR sebagai lembaga negara bersifat super legislatif dengan kewenangan khusus mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar (Pasal 3 ayat (1), UUD NRI Tahun 1945); (c). Penegasan fungsi legislatif yang lebih efektif, terutama dalam hal penyusunan undang-undang melalui DPR dan mekanisme hubungan legislatif dan eksekutif (Pasal 20 Ayat (1), UUD NRI Tahun 1945);

Berikutnya, (d). Pembentukan Mahkamah Konstitusi sebagai wadah yudikatif untuk memutuskan perkara yang menyangkut konstitusi, di antaranya: *Judicial Review* undang-undang terhadap UUD dan penyelesaian sengketa pemilihan umum (Pasal 24C, UUD NRI Tahun 1945); (e). Memperkuat perangkat-perangkat demokrasi, seperti pengaturan pemilihan umum (Pemilu) dan pembentukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat tetap (Pasal 22E, UUD NRI Tahun 1945); (f). Adanya pembatasan masa jabatan Presiden/Wakil Presiden (Pasal 7, UUD NRI Tahun 1945) dan penyusunan mekanisme demokratis dalam pemakzulan Presiden (Pasal 3 ayat (3), UUD NRI Tahun 1945); (g). Pengakuan tentang Hak Asasi Manusia (Pasal 28, UUD NRI Tahun 1945); (h). Penguatan otonomi daerah (Pasal 22C, UUD NRI Tahun 1945) dan Pembentukan DPD sebagai perwakilan daerah untuk perumusan kebijakan-kebijakan legislatif yang berkaitan dengan otonomi daerah (Pasal 22D, UUD NRI Tahun 1945).

Selanjutnya, Airlangga Pribadi menyebutkan, problem ekonomi-politik *post-authoritarianism*. Menurutnya, ada beberapa hal,

yakni: terjadinya perubahan pelembagaan ekonomi-politik menuju demokratisasi, desentralisasi dan ekonomi pasar. Namun, corak kekuasaan memperlihatkan akses pada kontrol terhadap institusi negara masih menjadi sarana untuk akumulasi kemakmuran dan kekuasaan. Dan, bertahannya agensi era Orde Baru yang masih menguasai arena ekonomi dan politik di era *post-authoritarianism* dan terserapnya kekuatan yang pada awalnya bagian dari kubu reformis ke dalam aliansi bisnis-politik *predator* yang menunggangi demokrasi.

Lebih lanjutnya, dia menganalisis *critical political economy* atas transisi demokrasi, bahwa proses perubahan kelembagaan ekonomi maupun politik menuju demokrasi tidak dengan serta merta mengubah watak kekuasaan yang berurat akar di suatu negara. "Proses transformasi kelembagaan menuju demokrasi dan ekonomi pasar tidak serta merta mendorong transformasi sosial menuju politik dan ekonomi liberal yang bercirikan supremasi hukum, transparansi kekuasaan dan perlindungan hak-hak warga oleh negara," ujarnya.

"Kuasai dan kepentingan yang tertanam

pada rezim terdahulu tidak serta merta hilang seiring dengan jatuhnya pemimpin dari rezim tersebut. Contohnya: Arab spring di Mesir, tumbuhnya fasisme di Italia dan Jerman mengajarkan potensi menuju liberalisasi politik dan demokrasi terganjal oleh lemahnya kekuatan sosial yang menopangnya,” tambahnya.

Dosen yang kerap menulis di berbagai media itu, kemudian mengupas tentang apa itu oligarki. Dia menyatakan, *oligarchy is a system of power relation that enables the concentration of wealth and authority and its collective defend of dominant politico-business alliance through occupy the state institution*. Sistem oligarki seperti ini berkembang dalam tatanan kapitalisme di Indonesia sebagai hasil dari pertemuan antara akumulasi privat dan *corporate wealth* yang bertemu dengan penguasaan institusi publik dan otoritas negara sejak era Soeharto.

Dalam konteks sejarah Orde Baru, metamorphosis kekuasaan mengambil corak *bonapartis state* menuju oligarki. Dari kuasa negara yang menciptakan tatanan kapitalisme menuju terbentuknya aliansi bisnis-politik birokrasi dengan lahirnya konglomerasi berbasis keluarga.

“Setelah jatuhnya Orde Baru, kekuatan sosial lama tidak jatuh namun bertahan dalam kelembagaan baru dan memperluas aliansinya sampai ke tingkat lokal. Partai politik menjadi instrument baru dari oligarki untuk menguasai negara,” tuturnya.

Terkait *oligarchy* dan Indonesia *post-authoritarian*, dia menyebut, adanya kemampuan adaptasi kekuatan bisnis-politik yang mengalami inkubasi pada era Soeharto untuk memanfaatkan kelembagaan demokrasi. Relasi aliansi sosial bisnis-politik birokrasi dominan dengan kekuatan sosial di luar dirinya (*liberal, progressive dan populisme*) dan ketegangan dan negosiasi antara oligarki dan teknokrasi.

Dalam masalah oligarki, Airlangga Pribadi mengatakan, kemampuan bertahan oligarki di era pasca-Soeharto. Di sini ada 3 hal menurutnya, yakni: oligarki dan tantangan neoliberalisme, bagaimana kekuatan ekonomi oligarki bertahan dalam krisis, oligarki dan tantangan politik liberal, serta bagaimana



reorganisasi kekuatan lokal dalam konstruksi kekuasaan oligarki.

Berikutnya, dia mengungkap mengenai *the structural condition of Indonesian post-authoritarianism*. Airlangga Pribadi menyebut problem ketimpangan social, dengan memaparkan contoh 4 orang terkaya memiliki kemakmuran lebih dari (\$25 billion) 40% orang termiskin di Indonesia (\$24 billion), yaitu 100 juta manusia; 1 % orang terkaya memiliki kemakmuran lebih dari 50% kemakmuran di Indonesia dan memiliki 75% lahan di Indonesia,” ujarnya.

Setelah Gerakan Reformasi 1998 muncul apa yang disebut oleh Airlangga Pribadi sebagai fase-fase Indonesia pasca-otoritarianisme. Hal ini ditandai oleh musim semi kebebasan dan reformasi yang berjalan pendek (Hegemoni: demokrasi), proses pelembagaan institusi governance yang bersitegang dengan corak kekuasaan warisan Orde Baru (Hegemoni: Governance), dan proses konsolidasi demokrasi illiberal (Hegemoni: Pancasila) melalui regulasi anti-demokrasi.

Untuk mencegah oligarki atau anti-thesis kuasa Oligarki adalah membangun demokrasi. Menurut Airlangga Pribadi, ada beberapa langkah yang mesti dilakukan, yakni memperkuat basis masyarakat sipil berorientasi progresif, kebutuhan akan lahirnya partai politik progresif di Indonesia, dan mendorong edukasi politik berbasis politik kewargaan. □

Dalam Demokrasi Perlu Kesetaraan

Masih ada problem dalam demokrasi, yakni penyusunan peraturan tanpa partisipasi warga. Warga hanya menerima dan melaksanakan saja, ditambah dengan semburan disinformasi, hoaks, ujaran kebencian melalui berbagai media sosial yang tidak mengedukasi menjadi warganegara yang bertanggung jawab.

DI AWAL makalahnya, Dwi Windyastuti Budi Hendrarti bertanya, mengapa (perlu) demokrasi? Pertanyaan itu dijawabnya dengan menyatakan, demokrasi adalah sebuah tipe sistem politik di mana pemerintahan tertinggi dan kekuasaan politik terletak di tangan rakyat, baik secara langsung maupun tidak langsung. “Demokrasi sebagai tatanan alamiah karena

sebagai bentuk pemerintahan di mana aturan masyarakat diputuskan oleh rakyat yang akan mengikat mereka. “Rakyat memerintah dirinya sendiri (*people governing themselves*),” ujarnya.

Selanjutnya, ia mengupas tentang dimensi demokrasi. Dia menyebut, dimensi demokrasi terdiri dari kontestasi di mana ada kompetisi bebas dan jujur antarkandidat. Ada partisipasi, semua warga negara mempunyai hak

untuk memilih. Untuk menuju adanya kompetisi dan partisipasi perlunya kebebasan dalam berekspresi, yakni berbicara di depan umum dan memublikasikan pandangan orang. *Assembly* sebagai sarana berkumpul untuk tujuan politik, dan *association* untuk membentuk organisasi politik.

Selanjutnya (juga dalam makalahnya), dia menyodorkan beberapa hal terkait dimensi demokrasi, yakni: (1). Perlunya Partisipasi



Warga Negara dalam Pembuatan Keputusan; (2). Perlunya, Sistem Representasi; (3). Perlunya Aturan Hukum; (4). Perlunya Sistem Pemilu; (5). Perlunya Persamaan WN; Dan (6). Perlunya Kebebasan dan Kemerdekaan.

Selanjutnya, tentang partisipasi warganegara dalam model demokrasi rakyat. Di sini pentingnya: (a). Mengharapkan dan membutuhkan partisipasi politik warga negara: - mengasumsikan rakyat pada umumnya ingin berpartisipasi dalam urusan politik, - menjadi atau menjadi terdidik tentang isu-isu politik besar, - menetapkan arah masa depan politik bangsa. (b). Pemilihan nyata-nyata memmanifestasikan preferensi dan harapan warga negara. (c). Jabatan menampakkan apa yang diinginkan publik.

Tentang partisipasi warganegara dalam model demokrasi bertanggungjawab, dia mengemukakan, ada empat hal, yaitu: (1). menghendaki berbagai partisipasi politik warga negara. (2). mengasumsikan rakyat pada umumnya: secara rasional cerdas,

sepenuhnya memiliki informasi tentang isu-isu politik besar, dan pemilu menjadi dasar kinerja pejabat. (3). Pemilu memberikan arahan kebijakan yang jelas. (4). Pejabat mendengarkan publik, tetapi harus leluasa untuk bertindak secara independent.

Pembicara lain, Dwi Windyastuti, dalam makalahnya menjelaskan tentang sistem representasi. Sistem ini berjalan, jika partisipasi langsung sulit dicapai maka perlu mengembangkan cara untuk berpartisipasi secara tidak langsung, atau orang-orang yang dipilih oleh WN untuk bertindak bagi mereka. WN mendelegasikan ke salah satu anggotanya yang bertanggung jawab untuk membuat keputusan tertentu, orang yang dipilih mungkin merupakan delegasi dari geografis wilayah atau sejumlah orang tertentu atau kepentingan tertentu (representasi berdasarkan wilayah atau populasi atau kepentingan).

“Dalam demokrasi, perwakilan terpilih berpartisipasi dalam pembuatan undang-undang,” ujarnya. “Setelah disahkan, hukum adalah yang tertinggi sehingga bukan mereka yang membuat hukum sebagai yang tertinggi,” tambahnya.

Terkait sistem pemilu, dia pun beberapa pertanyaan, sebagai berikut: Jika ada lebih dari dua kandidat, apakah harus ada pemilihan kedua? (disebut *runoff*) untuk memilih antara dua pengambil suara tertinggi di pemilihan yang pertama? Apakah ada keadaan di mana lebih dari sekadar mayoritas sederhana? Seberapa besar seharusnya majelis perwakilan? Apakah sistem bikameral? Berapa banyak wakil yang harus dipilih dari



setiap daerah atau untuk apa? ukuran populasi?

Di sinilah, kata lebih lanjutnya, perlu kesetaraan. Lalu dia menjelaskan tentang kesetaraan, yang menurutnya ada 2 pandangan yang berbeda: (1). Kesetaraan penting vs pencapaian segala bentuk kesetaraan tidak mungkin; bahkan beberapa bentuk kesetaraan tidak dimungkinkan. (2). Dimensi Kesetaraan, yakni kesetaraan politik, kesetaraan di depan hukum, kesetaraan kesempatan, kesetaraan ekonomi, dan kesetaraan sosial.

Untuk mencapai kesetaraan perlu adanya kebebasan dan kemerdekaan. Dia lalu mengutip pendapat John Locke yang mengatakan, manusia terpisah dari semua pemerintah atau masyarakat, memiliki hak-hak tertentu yang tidak boleh dilepaskan atau diambil. Ditambahkan, hak alamiah manusia adalah perlindungan diri, setiap orang memiliki hak dasar sandang, pangan, papan, pendidikan, pekerjaan, dan pada dasarnya manusia memiliki kebebasan untuk mengekspresikan kemampuan dan potensinya.

Dwi Windyastuti juga menyoroti soal partisipasi warganegara. Dia mengungkapkan, masyarakat masih terbiasa pada pola lama, yaitu penyusunan peraturan tanpa partisipasi warga. Warga hanya menerima dan melaksanakan saja. Sebagian masyarakat hanya paham prosedur partisipasi dalam pemilu dibandingkan dengan aspek lain. “Keterbatasan warga negara berpartisipasi pada tahapan identifikasi masalah dan formulasi kebijakan (public hearing),” ujarnya. “Di abad digital semburan disinformasi, hoaks, ujaran kebencian melalui berbagai media sosial tidak mengedukasi masyarakat menjadi warga negara yang bertanggung jawab,” tambahnya. □



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI



Dr. H. Bambang Soesatyo, SE., SH., MBA.

Ketua MPR RI

Perkokoh Ketahanan Nasional dengan Kemandirian Pangan

SALAH satu faktor pembentuk ketahanan nasional adalah kemampuan negara-bangsa mewujudkan kemandirian pangan. Menyegarkan kembali kesadaran bersama akan hal ini sangatlah penting. Maka, rapuhnya ketahanan pangan nasional seperti saat ini tidak boleh lagi dibiarkan berlarut-larut, karena sejatinya Indonesia mampu mewujudkan kemandirian pangan.

Merealisasikan kemandirian Indonesia di bidang pangan harus terus-menerus diupayakan dari waktu ke waktu. Jangan lagi sekadar diomongkan atau hanya dijadikan slogan. Upaya merealisasikan kemandirian pangan menuntut semangat bekerja keras, fokus dan bersungguh-sungguh, didukung oleh kegiatan penelitian dan pengembangan (Litbang) yang progresif.

Perubahan iklim hendaknya tidak terus-menerus dijadikan alasan untuk pasrah pada fakta menurunnya produktivitas tanaman pangan. Bukankah semua negara menerima dampak atau eksese perubahan iklim? Pola hujan yang telah berubah mendesak Indonesia untuk inovatif. Maka, meningkatkan aktivitas Litbang bagi pola tanam dan diversifikasi pangan layak diprioritaskan.

Menyegarkan kesadaran bersama tentang pentingnya mengupayakan kemandirian pangan berpijak pada kewajiban dan keharusan negara-bangsa mewujudkan kepastian bahwa setiap warga negara memiliki akses terhadap ketersediaan bahan makanan bergizi dengan harga terjangkau. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Indonesia tahun ini sudah lebih dari 281,6 juta jiwa. Jadi, negara wajib menyediakan bahan pangan untuk jumlah orang sebanyak itu.

Semangat saling ketergantungan antar-negara yang membuka akses untuk impor bahan pangan jangan sampai mendorong Indonesia untuk meremehkan urgensi kemandirian pangan. Impor bahan pangan bisa menjadi tidak mudah karena alasan ketidakpastian global maupun perubahan Iklim serta perubahan pola hujan. Ketidakpastian global akibat konflik bersenjata akan mengganggu rantai pasok. Sedangkan iklim dan pola hujan yang tak menentu selalu berpotensi menimbulkan kerusakan areal tanam pada negara-negara produsen tanaman pangan.

Memang, impor bahan pangan tidaklah haram, tetapi akan selalu menjadi masalah serius jika kebutuhan pangan harus selalu dipenuhi dengan impor dalam jumlah atau volume yang tidak kecil. Ketika stok bahan pangan di dalam negeri menipis, akan selalu terjadi lonjakan harga. Masyarakat mencatat bahwa gejala harga bahan pangan, utamanya beras, menjadi pengalaman dan cerita yang selalu berulang. Lonjakan harga bahan pangan selalu menyebabkan ketidaknyamanan bagi semua orang.

Kesungguhan negara-bangsa merealisasikan kemandirian pangan akan menghadirkan manfaat yang berlipat ganda. Dengan perencanaan yang komprehensif akan terwujud pemberdayaan bagi puluhan juta petani tanaman pangan. Dan, ketika ragam bahan pangan dari berbagai daerah itu harus diolah dan kemudian didistribusikan ke seluruh pelosok tanah air, sudah barang tentu akan tercipta sangat banyak lapangan pekerjaan. *Trickle down effect* dari industri pengolahan bahan pangan dengan pendistribusiannya akan menyediakan lapangan kerja yang menjadi harapan belasan juta generasi milenial dan Gen-Z yang kini menganggur.

Menurut BPS, tercatat tak kurang dari 29,36 juta petani pada tahun 2023. Diakui bahwa data itu menggambarkan minimnya minat orang muda bekerja dan berbisnis di sektor pertanian tanaman pangan. Dalam satu dekade terakhir, jumlah petani Indonesia dilaporkan menurun sekitar 7,42%. Pada 2013, jumlah petani masih tercatat sekitar 31,70 juta. Menurunnya, jumlah petani dan minimnya generasi muda menggarap sektor pertanian tanaman pangan sudah pasti disebabkan terbentuknya persepsi bahwa sektor pertanian tanaman tidak prospektif.

Padahal, potensi sektor pertanian tanaman pangan dan industri pengolahannya di Indonesia sangatlah besar, karena pasarnya mencakup kebutuhan sehari-hari bagi lebih dari 280 juta jiwa. Potensi besar itu akan terwujud menjadi kenyataan jika negara-bangsa bersungguh-sungguh merealisasikan target kemandirian pangan. Kesungguhan itu idealnya ditunjukkan dengan kemauan politik, dan didukung oleh Litbang Pangan yang progresif. Alih lahan pertanian harus dihentikan. Bahkan sebaliknya, lahan pertanian tanaman pangan hendaknya terus diperluas dari waktu ke waktu.

Sektor pertanian tanaman pangan yang produktif akan mewujudkan kemandirian pangan dan kemakmuran bagi semua komunitas yang bekerja di sektor bersangkutan. Jika semua itu terwujud, kontribusi komunitas pertanian dan pengolahan tanaman pangan bagi aspek ketahanan nasional sangat signifikan. Stabilitas nasional akan selalu terjaga karena kebutuhan pokok rakyat selalu tersedia dalam jumlah yang lebih dari cukup dengan harga terjangkau.

Sayangnya, sudah menjadi fakta sejak lama bahwa aspek ketahanan pangan nasional terbilang rapuh karena belum bisa mandiri. Kerapuhan itu tercermin dari begitu seringnya keluh kesah banyak komunitas akan mahalnya harga bahan pangan. Kehidupan sehari-hari dirasakan tidak nyaman karena harga beberapa komoditas kebutuhan pokok lebih mahal dibanding waktu-waktu sebelumnya

Untuk menutup kebutuhan pokok rakyat, beberapa komoditas

bahan pangan harus diimpor, karena negara-bangsa belum memaksimalkan semua potensi nyata di dalam negeri. Tidak hanya beras, melainkan ada belasan komoditas pangan yang diimpor Indonesia. Antara lain kedelai, gula pasir, jagung, susu, daging hewan, sayur, buah, dan tepung terigu.

Sebagaimana diketahui, sepanjang 2024 ini, pemerintah sudah memastikan untuk impor 3,6 juta ton beras. Pada 2023, total impor beras mencapai 3,5 juta ton. Indonesia impor beras dari Vietnam, Thailand, Myanmar, Pakistan dan India. Total permintaan atau konsumsi masyarakat akan beras diperkirakan 30,9 juta ton, tetapi volume produksi dalam negeri sering lebih rendah dari total permintaan itu. Dikatakan bahwa defisit atau selisih antara total permintaan beras dengan produksi dalam negeri sekitar lima (5) persen. Kalau selisih itu benar, potensi gejolak harga mestinya bisa dihindari. Namun, kalau gejolak harga beras selalu berulang, itu pertanda ada masalah dalam produksi, manajemen stok dan pendistribusian.

Komoditas kebutuhan pokok lainnya yang juga harus selalu diimpor adalah kedelai sebagai bahan baku penganan tahu-tempe. Impor kedelai menjadi keharusan karena total volume produksi dalam negeri sama sekali tak mampu memenuhi permintaan. Data BPS per Desember 2023 menyebutkan bahwa volume produksi kedelai di dalam negeri hanya sekitar 555.000 ton, sedangkan total kebutuhan atau permintaan pasar lokal mencapai 2,7 juta ton. Idealnya, ada inisiatif membuat program peningkatan kapasitas produksi kedelai di dalam negeri.

Kini, ketika iklim berubah dan pola hujan tak menentu, perubahan itu hendaknya dimaknai sebagai alarm yang menyegarkan kesadaran bersama tentang urgensi kemandirian pangan. Harus ada tekad mengurangi ketergantungan akan bahan pangan impor demi kokohnya ketahanan nasional. Maka, cepat atau lambat, kemandirian pangan harus diwujudkan agar Indonesia tidak lagi impor beras, kedelai, gula pasir, jagung, susu, daging hewan, sayur, buah dan tepung terigu. □

Sarana Sanitasi Sekolah Sehat

Lestari Moerdijat: Demi Generasi Penerus Bangsa yang Berdaya Saing

Pemenuhan sarana sanitasi sekolah yang memadai bagian dari upaya mewujudkan generasi penerus bangsa yang berkarakter dan berdaya saing.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

SANITASI sekolah yang memadai penting direalisasikan demi mewujudkan lingkungan belajar yang bersih dan menumbuhkan disiplin hidup sehat bagi generasi penerus bangsa,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Ahad (14/7).

Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) sejatinya telah meluncurkan dokumen Peta Jalan Sanitasi Sekolah 2024—2030 sebagai landasan perencanaan bagi semua pihak untuk wujudkan sanitasi sekolah yang berkualitas di akhir tahun 2030.

Catatan Kemendikbudristek hingga 2022, baru sekitar 11,43% sekolah dari semua jenjang pendidikan di Indonesia yang memiliki

sarana sanitasi yang memadai.

Capaian itu masih sangat jauh dari target yang diharapkan bahwa seluruh anak mendapat ketersediaan akses air, sanitasi, dan higienitas atau water, sanitation, hygiene (WASH) 100% pada 2030.

Menurut Lestari, upaya untuk mewujudkan sanitasi sekolah yang memadai merupakan langkah strategis untuk mewujudkan generasi penerus bangsa yang berdaya saing.

“Mewujudkan lingkungan belajar dan budaya hidup sehat peserta didik merupakan bagian dari proses membentuk karakter setiap anak bangsa sejak dini di sekolah,” ujar Rerie, sapaan akrab Lestari.

Rerie, yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, berpendapat, masih relatif rendahnya pemenuhan sanitasi sekolah yang memadai di Indonesia

membutuhkan dukungan dari semua pihak demi terbangunnya lingkungan belajar dan budaya hidup sehat bagi setiap anak bangsa.

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berpendapat, membangun budaya bersih melalui pemenuhan sanitasi sekolah yang memadai juga merupakan bagian dari upaya kita meletakkan dasar untuk mewujudkan kesehatan jasmani dan rohani setiap anak bangsa.

Rerie berharap tumbuh gerakan bersama di tengah masyarakat untuk mewujudkan pola hidup sehat di berbagai kegiatan keseharian, termasuk di sekolah, sehingga proses pembangunan sumber daya manusia (SDM) nasional untuk melahirkan anak bangsa yang sehat, berkarakter dan berdaya saing dapat segera diwujudkan. □



Semula Kampung "Keling" Berubah Menjadi "Madras" **Sejarah Panjang Orang India Menetap di Medan**

Berawal menjalani kontrak sebagai buruh perkebunan tembakau di Sumatra Timur, ribuan orang India (Tamil) membentuk satu komunitas di Medan, Sumatra Utara. Generasi penerusnya tetap menjaga budaya asal usul mereka. Kebangkitan India di Asia Tenggara membuat sebutan Kampung Keling diganti menjadi Kampung Madras. Kampung Madras yang juga disebut sebagai Little India atau Bollywood Medan kini menjadi salah satu tujuan wisata dan kuliner.



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

HAMPARAN perkebunan tembakau begitu luas, membentang di Sumatra Timur di tahun 1880-an. Tak hanya itu, kualitas tembakaunya pun baik sehingga hasil panennya sangat terkenal di Eropa. Berbagai perusahaan pengelolaan tembakau dari Eropa, salah satunya Deli Maatschappij, berlomba meraih untung dari investasi di ratusan hektar perkebunan tembakau. Mereka tidak rugi menanamkan investasinya di sini, sebab saham yang ada menonjol di Bursa Efek Amsterdam.

Agar produksi tembakau cepat diekspor ke Eropa, mereka tidak hanya membutuhkan dana yang besar untuk mengelola, namun juga perlu tenaga kerja yang melimpah. Pada masa itu, penduduk di Sumatra Timur terbilang masih sedikit. Selain itu penduduk lokal enggan bekerja di perkebunan. Akibatnya, perusahaan pengelolaan tembakau kekurangan tenaga kerja.

Untuk memenuhi jumlah tenaga kerja di ladang, berbagai perusahaan pengelolaan tembakau dari Eropa, terutama Belanda, mendatangkan tenaga kerja dari luar Sumatra Timur. Maka, didatangkanlah pekerja dari Jawa, Cina, dan India.

Mendatangkan pekerja dari Cina rupanya tidak efisien, sebab biaya yang ditanggung terlalu mahal. Untuk mendatangkan pekerja yang dirasa lebih murah maka perusahaan-perusahaan tembakau lebih tertarik untuk mendatangkan pekerja dari India. Jacob Nienhuys, salah satu pemegang saham di Deli Maatschappij sampai memasang dan menyebarkan brosur saat pameran dagang di Kalkutta, India, pada tahun 1883/1884. Dalam brosur itu diumumkan mencari tenaga kerja untuk ditempatkan di perkebunan tembakau di Sumatra Timur.

Ternyata, lowongan kerja yang ada rupanya menarik minat kaum laki-laki di negara yang berada di Asia bagian selatan itu. Mereka pun berduyun-duyun mendaftarkan diri sebagai pekerja perkebunan. Antusiasme orang India dari etnis Tamil untuk bekerja di Sumatra Timur sangat tinggi. Dari catatan yang ada di tahun 1886 sudah ada 2.000 orang Tamil yang berada di Sumatra Timur.

Kedatangan mereka akhirnya mewarnai keragaman etnis di Sumatra Timur. Melihat hal demikian, meski Pemerintahan Kolonial



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Belanda untung dari segi pendapatan yang diperoleh dari hasil perkebunan tembakau, namun mereka juga khawatir kalau para pekerja yang didatangkan dari Jawa, Cina, dan India itu melakukan perlawanan atau pemberontakan untuk memperjuangkan kesejahteraan, upah, atau etnisitas mereka.

Agar kekuatan mereka tidak bersatu maka Belanda memisahkan wilayah tempat tinggal mereka. Tanah untuk mereka dikapling tanah

berdasarkan etnisitas. Orang-orang India (Tamil) ditempatkan di wilayah yang sekarang bernama Kampung Madras, Polonia, dan Sungga. Semua wilayah itu berada di Kota Medan, Sumatra Utara. Dari ketiga tempat, di Kampung Madras-lah orang-orang India banyak tinggal.

Kampung Madras yang beralamat di Jl. Zainul Arifin itu saat ini menjadi salah satu kawasan wisata dan kuliner yang identik





FOTO-FOTO: ISTIMEWA

dengan nuansa India. Selain disebut Kampung Madras, ada pula yang mengatakan sebagai *Little India* atau *Bollywood Medan*.

Dari catatan yang beredar, Kampung Madras memiliki luas 10 hektare. Kampung ini berada di irisan Kecamatan Medan Polonia dan Medan Petisah. Sebelum dinamakan Kampung Madras, kampung itu disebut dengan Kampung Keling.

Mengapa berubah nama menjadi Kampung Madras? Sejarawan Kota Medan, M. Azis Rizky Lubis, di [detik.com/sumut](https://www.detik.com/sumut), 4 Oktober 2023, menuturkan, saat itu ciri fisik orang Tamil berkulit hitam (*keling*). "Kampung Keling inikan kemudian menjadi identitas, karena warganya orang India, mohon maaf, banyak yang berkulit hitam. Nah, sebutan *keling* itu kan sebenarnya tidak hanya digunakan kepada orang-orang India saja," ujarnya.

Lebih lanjut di *web* itu diberitakan, sebab

nama Kampung Keling dirasa merendahkan dan rasis maka pada tahun 2008 Pemerintah Kota Medan menggantinya dengan nama Kampung Madras. "Sebutan Kampung Keling ini disesuaikan dengan penduduk yang menghuni kampung itu. Jadi, pada tahun 2008, Pemerintah Kota Medan sepakat untuk menggantikan nama kampung tersebut menjadi Kampung Madras. Alasannya, karena penyebutan Kampung Keling itu terkesan rasis," ujarnya.

Kampung Madras menjadi nama baru yang lebih cocok, sebab nama ini diambil dari asal muasal komunitas masyarakat Tamil dan Sikh dari Madras, India. Pergantian nama itu disambut keturunan orang Tamil dengan senang hati. "Sebutan *keling* itu sebenarnya sangat menyakitkan hati," kata Rajir (43), warga keturunan India, yang tinggal di Tanjungrejo, Medan. "Bagi saya sebutan itu tak bagus dan sangat kasar," kata Maduwen

(47), tukang parkir keturunan Tamil di Jalan Zainul Arifin. "Kata itu menyinggung hati," tambahnya seperti dikutip dari [kompas.com](https://www.kompas.com), 18/07/2008.

Alegesan Moses, tokoh warga India di Medan, dalam *web* yang sama, mengatakan, perkataan *keling* sejatinya merujuk pada kekuasaan Raja Kalingga (di India). Kamus Besar Bahasa Indonesia mencatat, istilah *Keling* diartikan sebagai orang berkulit hitam yang berasal dari India sebelah selatan. Menurut dia, istilah *keling* bertukar menjadi istilah yang menghina sejak pertengahan 1970-an.

Lebih lanjut dikupas di media online, *keling* identik dengan warga India yang berkulit hitam legam. Kata itu ternyata juga untuk menyebut warga India yang tinggal di Medan, baik yang berkulit putih terang, sawo matang, atau hitam legam, sangat merendahkan dan berkonotasi negatif.

Bahkan, kadang kala orang yang bukan keturunan India tetapi berkulit hitam pun disebut *keling*. Kata itu menjadi bahan olok-olokan yang sejatinya menyakitkan.

Perubahan nama menjadi Kampung Madras disambut suka cita. "Nah, sebutan itu rasanya lebih enak didengar," kata Maduwen dan Rajir yang merupakan generasi ketiga keturunan India. Pergantian nama dilakukan secara menyeluruh. Nama trayek angkutan kota yang lewat di Jalan Zainul Arifin dari Kampung Keling menjadi Kampung Madras. Mobil angkutan BK 1053 BG, misalnya, yang sebelumnya ditulis

Lebih lanjut dituliskan di media itu, penggantian nama Kampung Keling menjadi Kampung Madras dan warga Keling menjadi warga Tamil, menurut Ichwan, lebih berkaitan pada kebangkitan identitas kelompok India. Kebangkitan ini tak hanya terjadi di Indonesia, tetapi di Asia Tenggara. Penggantian nama juga terjadi di Malaysia. Pelabuhannya yang disebut nama Keling juga diganti.

Kembali ke masalah kedatangan orang-orang India di Sumatra Timur, mereka menjalani kontrak sebagai buruh perkebunan hingga beberapa generasi sejak kedatangan di tahun 1883. Meski di antara mereka ada

Sebagai komunitas yang berasal dari luar, mereka tetap mempertahankan dan menjaga budaya dan agama aslinya. Sebagai masyarakat yang beragama Hindu, mereka mendirikan kuil. Kuil pertama yang dibangun adalah Shri Mariamman. Kuil ini konon dibangun pada tahun 1884. Kali pertama dibangun tersusun dari papan-papan kayu. Baru pada tahun 1991 dipugar hingga bentuknya seperti saat ini, banyak hiasan berupa puluhan patung sebagai simbol dewa-dewa. Selain membangun Shri Mariamman, mereka juga membangun Kuil Subramaniam.

Tak hanya kuil sebagai penanda mereka orang Hindu India. Di sana juga tumbuh budaya kuliner dan perayaan hari agama sesuai dengan agama dan budaya yang dianut. Bila ke Medan kita akan menemukan di tempat-tempat kuliner dengan menu martabak kuah kari, kerang rebus, nasi briani, roti canai, dan martabak telur ala India. Menu-menu tersebut merupakan makanan dan jajanan yang berasal dari kampung asal-usul mereka, India.

Bila kita jalan-jalan ke Singapura dan Malaysia di kawasan yang disebut *Little India*, pada bulan Oktober hingga November, ada perayaan *Deepawali* atau *Diwali*. Saat perayaan, di kawasan ini terpasang aneka lampu dan lilin. Saat malam hari tampak kerlap-kerlipnya. Perayaan ini sebagai simbol harapan kehidupan yang diterangi cahaya dan kebaikan. Perayaan yang digelar selama 5 hari ini di Kampung Madras juga ada.

Bagi keturunan India yang beragama Islam, mereka pun tak melepaskan budaya mereka. Di sana juga ada Masjid Ghadiyah dengan gaya bangunan nuansa India. Dalam pendidikan, mereka mendirikan Perguruan Nasional Khalsa. Perguruan ini dikelola Yayasan Pendidikan Sikh Medan. Tempat ini dulu pernah terkenal karena merupakan satu-satunya sekolah dengan pelajaran dalam bahasa Inggris di Medan (Wikipedia.com).

Di Kampung Madras juga ada nama Jalan Calcutta dan Jalan Jawaharlal Nehru.

Data di tahun 2008 menyebutkan, jumlah warga keturunan India yang bermukim di Sumatra Utara berjumlah 70.000 orang dari jumlah penduduk provinsi itu yang mencapai sekitar 12 juta jiwa. □

AWGI dari berbagai sumber



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

trayek Sambu-Kampung Keling-Tanjung Sari diubah menjadi Sambu-Kampung Madras-Tanjung Sari.

Pendapat lain disampaikan oleh sejarawan Universitas Negeri Medan, Ichwan Azhari, di *kompas.com*, 18/07/2018, yang menyatakan istilah *keling* sejatinya tidak berkonotasi negatif. Istilah itu digunakan dalam banyak naskah Abad XVI dan tidak pernah ada masalah, namun dalam perkembangannya akhir-akhir ini, Ichwan mengakui, dalam interaksi sosial, istilah *keling* mengasosiasikan pendengarnya pada kelompok kelas sosial bawah yang identik dengan hal-hal yang kurang menyenangkan, seperti mabuk atau preman. *Keling* pun identik dengan warga India yang berkulit hitam legam.

yang memilih pulang ke India, namun banyak juga yang kerasan tinggal di Sumatra Timur hingga lebih memilih melanjutkan kontrak kerja. Tinggal lama di negeri orang membuat mereka melakukan perkawinan dengan sesama orang India dan beranak-pinak hingga membentuk kelompok masyarakat sendiri.

Mereka yang datang ke Indonesia pun tidak lagi didatangkan oleh perusahaan perkebunan tembakau, namun alasan merantau. Mereka yang datang ke Medan selepas Indonesia Merdeka adalah dari golongan pedagang yang berasal dari wilayah Punjab, Chetty, dan Bombay. Kedatangan orang-orang India yang bukan berasal dari etnis Tamil ini menambah keragaman orang-orang India di Medan.



Semalam di **Kampung Madras**

Meski Little India di Kota Medan tak sekental Little India di Singapura dan Malaysia, namun suasana, rasa, dan denyut orang-orang India di Kampung Madras masih ada. Mereka menjalankan berbagai macam aktivitas, mulai berdagang kacang rebus, martabak, hingga menjadi pemain sepakbola.



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

SETELAH melakukan perjalanan dari Jakarta lewat Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta yang ada di Cengkareng, Tangerang, Banten, akhirnya saya tiba di Kota Medan, Sumatra Utara. Untuk sampai di Kota Medan, tentunya, melalui Bandar Udara Internasional Kuala Namu yang ada di Deli Serdang, Sumatera Utara.

Untuk tidak menyia-nyiakan waktu berada selama di Medan, sore itu saya langsung memesan transportasi sepeda motor lewat aplikasi ojek online. Dengan arah perjalanan dari salah satu hotel yang berada di samping Lapangan Benteng menuju ke Kampung Madras atau *Little India*. Tak lama respon aplikasi untuk menemukan pengemudi ojek online. Dilihat dari tarifnya, sekitar Rp8.200, itu menunjukkan jarak ke Kampung Madras tidak jauh dari hotel tempat kami menginap.

Setelah menunggu di pintu keluar hotel, saya akhirnya dibawa oleh abang tukang ojek menuju ke Kampung Madras, lokasi yang memang hendak dituju. Sore itu suasana Kota Medan ramai seperti biasanya. Lalu lanang kendaraan roda dua, roda empat,

bahkan roda tiga (becak motor) melintas di jalan-jalan yang ada.

Tak lama kami memasuki Jl. Teuku Umar. Nuansa India sudah terasa di sini, terlihat deretan lembaga pendidikan dan tempat ibadah orang-orang India, yakni Perguruan Khalsa dan Gurdwara Sri Guru Nanak Dev. Kedua tempat itu dikelola oleh orang India yang beragama Sikh. Pesisir di samping Gurdwara, terdapat

Kuil Shri Mariamman. Kuil ini merupakan tempat ibadah orang Hindu Tamil.

Pesisir di depan Shri Mariamman ada restoran India. Di pintu tertulis *Little India Café & Resto*. Di rumah makan yang menyajikan menu-menu India tersebut ada spanduk yang isinya lowongan kerja untuk juru masak.

Berhenti persis di depan Shri Mariamman,



saya melihat kesibukan di Jl. KH. Zainul Arifin. Di sepanjang jalan inilah kawasan yang disebut Little India, sebab di ujung keluar masuk jalan itu ada Gapura *Little India*.

Sore itu di Jl. KH. Zainul Arifin terlihat ramai. Berbagai kendaraan melintas di sana. Saya menyusuri di sekitar kuil tertua di Medan itu. Di tembok bangunan terlihat berbagai relief yang menggambarkan agama, seni, dan budaya India. Terlihat di Shri Mariamman sore itu sepi, bisa jadi bukan saatnya untuk beribadah. Saya pun mencoba untuk masuk. Saat berada di pintu utama, seorang India yang melintas dengan naik sepeda, berhenti sejenak. Dengan posisi merapatkan kedua belah tangan dan berada di depan dada, ia membungkukkan badan, sepertinya ia

India di Kampung Madras tidak seperti dulu lagi alias jumlah mereka bekurang. Meski demikian, menurut dia, orang-orang India telah menyebar di berbagai kabupaten dan kota di provinsi itu. Banyak profesi yang digeluti orang-orang India di sana, “ada juga yang menjadi pemain sepakbola”, ujarnya. Ia lalu menyebut nama Vijay. Setelah dilacak di *google*, ternyata Vijay bukan pemain sembarangan, sebab ia pernah main di PSMS, Sriwijaya FC, Persebaya, Mitra Kukar, dan klub-klub lainnya, dan bahkan pernah menjadi pemain Timnas.

Sebagai pengurus Shri Mariamman, saat Jumat sore, kuil itu penuh jemaah hingga mencapai 350 orang. “Kalau acara agama lebih besar, jumlahnya lebih banyak lagi,”

Selepas Magrib, kerlap-kerlip lampu di Kampung Madras menjadikan kawasan itu begitu indah. Persis di samping Shri Mariamman terdapat pusat kuliner. Istimewanya, tempat kuliner ini menyajikan masakan halal khas India. Kawasan ini memang didominasi oleh orang-orang Muslim India. Terlihat di resto-resto terpasang tulisan Muslim India. Menu yang disajikan seperti nasi briani, roti cane, martabak india, teh tarik, dan menu lainnya.

Begitu saya datang, langsung didekati oleh seorang perempuan yang menggunakan hijab, berhidung mancung, dan bermata tajam. Dilihat dari fisiknya, ia seorang India. Ia menawarkan berbagai menu yang ada di restonya. Saya pun memesan nasi briani. Bumbu nasi ini begitu kuat terasa di tempat kuliner itu.

Selepas menikmati nasi yang harganya Rp 32.000 itu, saya menyusuri sepanjang Jl. KH. Zainul Arifin. Pada malam hari, kerap melihat orang-orang India melintas di sana. Di sepanjang jalan itu nuansa India memang sangat kentara. Saya melihat ada toko yang bernama Pandit & Sons. Pada malam hari, kerap melihat aktivitas mereka. Ada yang naik sepeda motor bersama anak dan istrinya, belanja, nongkrong, dan beribadah di kuil.

Dagangan mereka tak hanya masakan India, namun ada juga yang berjualan jagung rebus, kacang godok, dan martabak. Kursi-kursi di samping gerobak mereka dijadikan tempat ngobrol oleh orang-orang India. Bahkan, orang India dari Singapura dan Malaysia juga kerap datang ke Kampung Madras.

Terdengar suara azan Isya di Kampung Madras. Saya bergegas ke masjid di mana suara azan itu mengalun. Ketika saya melihat nama masjid, terbaca Ghadiyah. Saya langsung berpikir, “o ini masjid orang-orang India”. Begitu di dalam masjid, saya melihat tulisan bahwa masjid itu bernaung di bawah Yayasan Muslim India Sumatra Utara.

Dari perjalanan ke Kampung Madras, meski *Little India* di Kota Medan tak seramai dan ‘sekental’ *Little India* di Singapura dan Malaysia, namun di Medan ini masih ada jejak-jejak orang India yang sudah datang sejak tahun 1880-an. Di sini, di Kampung Madras, kita bisa menyaksikan mereka hilir mudik dengan berbagai aktivitas. □

AWGI dari berbagai sumber



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

sedang melakukan ritual menghormati kuil itu.

Dengan pelan-pelan, saya masuk ke Shri Mariamman. Terlihat ada seseorang yang tengah duduk bersila di depan meja kecil. Ia tengah asyik memainkan *handphone*. Dengan menyapa sapaan khas Medan, “Bang”, saya pun menyapa, “boleh saya masuk Bang?”. Dengan ramah, ia mempersilahkan masuk di kuil yang diresmikan oleh Gubernur Sumatra Utara Raja Inal Siregar pada tahun 1991 itu.

Pria yang bernama Saren itu mengaku bekerja di Shri Mariamman. Kalau dalam agama Islam, dia seperti marbot atau takmir masjid. Saren merupakan generasi ketujuh orang-orang India yang ada di Sumatra Utara. Dirinya mengakui, keberadaan orang-orang

ungkapnya. Sebagai orang India, dirinya mengakui bangga dengan asal usulnya. Saya ngobrol dengan Saren tentang banyak hal dan dia mengizinkan memotret bagian dalam kuil.

Setelah berbincang dengan Saren diras cukup, saya pamit. Keluar kuil, saya bertemu dengan Jayrat. Ia tengah berdiri di trotoar sambil mengamati jalan. Setelah berkenalan, dia mengatakan bahwa dirinya adalah tukang parkir di Jl. Teuku Umar dan Jl. KH. Zainul Arifin. Dia mengaku, dalam sehari bisa mendapat Rp100.000. Ia bercerita pernah tinggal di Jakarta selama 15 tahun, tinggal di Pasar Baru, yang sekarang juga menjadi kawasan *Little India*. Wabah Covid-lah yang membuat dirinya balik ke Kampung Madras.



Little India di Pasar Baru

Di Pasar Baru, Jakarta, juga terdapat komunitas India yang riwayatnya bisa jadi sama tuanya dengan yang ada di Medan. Komunitas orang India di Pasar Baru tumbuh seiring berdirinya pasar itu di tahun 1820. Mereka melakukan berbagai macam aktivitas perdagangan, kuliner, dan pengobatan. Meski sudah lama tumbuh dan hidup dengan budaya India di sana, namun baru dinyatakan sebagai Little India, pada masa Gubernur Anies, dan itu terjadi di akhir masa jabatannya, tahun 2022.



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

BERDIRINYA Pasar Baru pada tahun 1820 di Weltevreden (kawasan Gambir, Jakarta) memancing berbagai kelompok masyarakat untuk berdagang di sana. Sejak pasar itu berdiri berbagai etnis dari Betawi, Cina, India, serta etnis lainnya membuka lapak, toko, dan asongan di sana.

Ketelatenan pedagang dari India berdagang dan tinggal di ruko yang mereka huni dan mereka yang tinggal di sekitar pasar membuat di kawasan tumbuh budaya India, sehingga di kawasan yang sekarang ditempatkan sebagai cagar budaya ini ada ruas yang disebut *Little India*. Sudah sejak lama orang-orang India berjejak di sana, namun dideklarasikan sebagai *Little India* terbilang belum lama. Saat Anies Baswedan sebagai Gubernur Jakarta, di gerbang Jl. Pintu Air Raya, Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, didirikan gapura dengan ornamen dan gambar nuansa India. Gapura itu sebagai tanda bahwa

tempat itu merupakan kawasan *Little India*.

Saat peresmian kawasan *Little India*, 10 Oktober 2022, Anies Baswedan dalam sambutan mengatakan, di kawasan ini komunitas India banyak berkegiatan ekonomi dan beraktivitas. Dengan dibangunnya gapura disebut akan mempermudah bagi



siapa saja yang ingin menikmati pengalaman budaya India, sekaligus merasakan kekayaan budaya Jakarta dan bisa langsung mengunjungi kawasan *Little India*.

“Kami berharap dengan adanya Gapura *Little India* maka tempat ini menjadi representasi dari *subculture* yang ada di Jakarta. Kita berharap nantinya bagi siapa saja yang ingin mendapatkan pengalaman nuansa India bisa datang ke sini, merasakan keunikannya, dan merasakan betapa kayanya kota ini,” ujarnya seperti yang termuat di *detik.com*.

Lebih lanjut di web itu diberitakan, dirinya menyampaikan rasa terima kasih kepada masyarakat yang beraktivitas di *Little India*. Secara tidak langsung, menurutnya, mereka berkontribusi menggerakkan denyut perekonomian di Kota Jakarta. “Terima kasih telah menjadi bagian yang ikut menggerakkan denyut kegiatan di Jakarta, baik kegiatan perekonomian, kegiatan sosial, dan kegiatan kebudayaan”, ujarnya.



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Mengambil data dari *Wikipedia*, di Pasar Baru banyak bermukim orang India. Orang India berdagang menjual kain, alat olahraga, dan sepatu di Pasar Baru. Pada tahun 2002 ada sekitar 2.000 keluarga India yang terdaftar sebagai penduduk Jakarta, dan sebagian besar di antara mereka tinggal di pusat kota, khususnya di kawasan Pasar Baru dan Pintu Air. Di kawasan Pasar Baru juga terdapat tempat ibadah masyarakat India.

Dari data yang ada dan saat pengalaman jalan-jalan di Pasar Baru, di sana banyak toko tekstil maupun yang lainnya dikelola oleh orang-orang India. Disebut, salah seorang keturunan India yang bernama Lakhmi Mahtani menjalankan usaha berdagang tekstil. Usaha yang dirintis keluarganya secara turun-temurun itu sudah dimulai sejak 1932.

Di sela-sela bangunan toko, di sana ada

rumah-rumah orang-orang keturunan India. Diceritakan dalam rombongan tour wisata di Jakarta yang dimuat di *travel.tempo.co*, 11 Maret 2020, ada seorang yang bernama Mohini Gobindram Manwani yang membuka usaha jasa boga/katering. Di rumah perempuan yang berumur 79 tahun asal Haiderabad itu menyediakan aneka makanan dan minuman khas India, seperti chai tea, aloo rajma, dan chapati. Disebut rumah Perempuan yang akrab dipanggil Aunty Mohini itu kerap dikunjungi oleh orang-orang India yang ingin makan, terutama mereka yang bekerja di pertokoan Pasar Baru.

Di web itu diungkap, Mohini sudah tinggal di Jakarta sejak tahun 1963, tapi di Pecenongan. Kawasan yang tak jauh dengan Pasar Baru. Tinggal di Pasar Baru baru pada tahun 1974. Sebelum di Jakarta, ia pernah tinggal di Makassar, Sulawesi



Selatan.

Di *antaranews.com*, 3 April 2016, diceritakan di Pasar Baru ada klinik pengobatan tradisional India bernama Taj Mahal. Klinik itu berdiri sejak 1998. Di klinik itu berbagai penyakit seperti wasir, mata minus atau plus hingga tulang osteoporosis dikatakan bisa disembuhkan. "Di sini semua obatnya adalah ramuan alami India", ujar Poli (46). Poli merupakan generasi keempat yang menjalankan klinik.

Di kantor berita milik pemerintah itu lebih lanjut diceritakan, di satu rumah makan yang menyajikan makanan yang penuh bumbu rempah, seperti kari kambing, bebek masak kurma, gulai kepala ikan, asam udeung, pacri nanas. Cita rasa penuh rempah rumah makan itu dikatakan merupakan pengaruh India yang masuk ketika para pedagang datang ke Tanah Air di masa lampau.

Bila berkunjung ke sana juga akan menemukan Shalimar Indian Minimarket. Minimarket milik orang India itu sudah berdiri selama empat dekade. Di minimarket itu dijual berbagai bahan makanan India, seperti beras basmati, tepung gandum, bubuk kari, bumbu chicken tikka, dan barang lainnya seperti gelang dan kalung rudraksha (*jenitri*).

Di kawasan ini kaya kuliner India. Kita bisa mengunjungi Gokul Resto. Di tempat ini disajikan paratha (roti dari tepung terigu), mock chicken curry ('daging ayam' dibuat dari soya dan jamur), aloo mutter (kari kentang dan kacang hijau), papaddum (roti tipis dari tepung lentil hitam, tepung beras atau tepung kentang bertekstur seperti kerupuk), dan minuman seperti nimbu pani dan lemonade ala India.

Tak hanya kuliner dan pengobatan yang dikelola orang-orang India, namun ada juga yang berkaitan dengan agama atau keyakinan. Di kawasan ini ada Sai Study Group (SSG). SSG dikelola Yayasan Sri Sathya Sai Baba Indonesia. SSG katanya sering didatangi banyak orang yang memiliki latar agama yang tak sama. Mereka datang untuk mengikuti ajaran Sai Baba yang menjunjung pedoman "Love All Serve All".

Di kawasan ini juga ada Kuil Gurdwara Sikh. Kuil ini berdiri sejak tahun 1955 dan menjadi kuil terbesar kedua Kaum Sikh di Jakarta setelah Kuil Gurdwara yang ada di Tanjung Priok. □

AWGI dari berbagai sumber

Jainudin

Dai Muda

Apresiasi Generasi Muda Diberi Kesempatan Jadi Da'i



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

UNTUK berperan dalam membangun umat dan bangsa banyak sekali jalannya. Salah satunya dengan mengabdikan diri di masyarakat menjadi seorang da'i, yang akan berkhidmat di seluruh pelosok negeri di Nusantara.

Kami juga memberi apresiasi tak terhingga kepada Mahad Aly An-Nuaimy, tempat kami menimba ilmu sehingga kami bisa lulus mendapatkan wawasan agama untuk kemudian menjadi modal dasar kami dalam berkhidmat di masyarakat.

Kami berharap, semakin banyak pemerintah mendukung generasi muda untuk berkisah dalam pembangunan lewat pendidikan. Sebab, banyak sekali lembaga pendidikan yang sangat cakap dalam membina generasi muda.

Dalam hal ini kami juga berterima kasih kepada Bapak Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid, yang mendukung kami, mendukung kaderisasi da'i, sehingga da'i-da'i akan terus tumbuh dan lebih berkualitas lagi di kemudian hari. □

DER

Namsianto Wakhid

Ketua BEM ITB Ahmad Dahlan

Mahasiswa Muda Indonesia Bangkit Menyuarakan Kemanusiaan di Palestina

AKSI kekejaman Israel pada rakyat Palestina yang tidak berdosa semakin banyak menyentuh semua kalangan di berbagai belahan dunia. Semua sepakat bahwa kekejaman yang terjadi adalah kejahatan kepada kemanusiaan, jadi bukan lagi masalah agama atau negara.

Saya melihat banyak sekali para mahasiswa yang notabene adalah generasi muda dari berbagai perguruan tinggi terkenal di dunia, seperti Harvard, Oxford, Universitas New York, dan lainnya, yang bangkit menyuarakan dukungan kepada Palestina dan menuntut agar menyudahi aksi genosida rakyat Palestina oleh Israel.

Kami sebagai mahasiswa pastinya sangat tergerak, apalagi negara Indonesia adalah negara yang paling menentang aksi genosida tersebut. Untuk itulah, kami bersama kawan-kawan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari sekitar 100-an kampus, sepakat membentuk Forum Komunikasi Mahasiswa Bela Palestina (FKMBP) untuk membahas isu kemanusiaan di Palestina.

Namun, menurut saya, yang lebih baik lagi ada sinergitas— yang saat ini kita berusaha membangun dengan pemerintah dan lembaga negara— agar suara kita lebih terdengar nyaring di forum dunia. □



DER

Jenderal Polisi Hoengeng Iman Santoso

Polisi Teladan dan Kapolri

Panutan



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

PERINGATAN Hari Bhayangkara pada 1 Juli tahun 2024 berlangsung meriah, baik di pusat maupun daerah. Raut wajah bahagia terpancar dari seluruh jajaran anggota Kepolisian Republik Indonesia Republik Indonesia (Polri), diulang tahunnya yang ke-78 itu. Sayang, momen kebahagiaan peringatan Hari Bhayangkara tahun 2024 tersebut seolah menjadi jeda di tengah sorotan masyarakat terhadap kinerja kepolisian.

Maklum, saat ini Polri terus mendapat sorotan tajam setelah terkuaknya beberapa kasus yang mencengangkan. Seperti, pembunuhan terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat oleh Ferdy Sambo. Kasus peredaran narkoba yang melibatkan eks Kapolda Sumatera Barat Inspektur Jenderal Teddy Minahasa. Juga kasus pembunuhan Eki dan Vina Cirebon yang tengah dalam sorotan berbagai kalangan.

Kasus-kasus besar yang mencoreng nama baik Polri itu tak semestinya terjadi. Terlebih bila mengingat ada tokoh di jajaran polri yang turut membangun dan meleletakkan pondasi nilai-nilai serta etika bagi segenap anggota Kepolisian Republik Indonesia. Sebut saja, salah satunya, adalah Jenderal Hoengeng Iman Santoso.

Hoengeng adalah sosok polisi panutan yang pernah dimiliki Polri. Dia meniti kariernya

sebagai anggota kepolisian ketika bangsa Indonesia menghadapi pemberontakan beruntun. Tetapi, sejarah mencatat, Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) kelima yang menjabat selama tiga tahun (15 Mei 1968 - 2 Oktober 1971) itu dinilai merupakan salah seorang polisi terbaik, dan sulit dicariandingannya.

Pengakuan tersebut disampaikan oleh, salah satunya, Presiden RI ke-4 KH. Abdurrahman Wahid atau biasa disapa Gus Dur, yang punya cara tersendiri untuk menggambarkan Hoengeng sebagai sosok polisi yang jujur dan anti suap. Secara berkelakar Gus Dur menyatakan: "Hanya ada



tiga polisi yang tidak bisa disuap. Yakni, patung polisi, polisi tidur, dan Hoengeng."

Dalam buku berjudul "Hoengeng, Polisi Idaman dan Kenyataan" diceritakan bagaimana sosok polisi kelahiran Pekalongan 14 Oktober 1921 yang sangat sulit disuap. Berbagai cara ditempuh oleh mereka yang hendak menyogok, namun Hoengeng bergeming. Bukan satu atau dua kali upaya penyogokan dilakukan terhadapnya, tapi setiap kali upaya itu dilakukan selalu gagal. Bahkan, ketika mereka (penyogok) berusaha memberikan upeti melalui istrinya, tapi Hoengeng tetap bisa berkelit, lalu mengembalikan barang-barang pemberian sebagai suap itu kepada pemberi atau pengirimnya.

Beberapa penyogoknya juga berupaya memberikan suap itu dengan menggunakan istilah sebagai hadiah, lagi-lagi upaya itu tak berhasil. Hoengeng menolaknya dan mengembalikan semua hadiah itu kepada pemberinya. Bahkan, ada beberapa kasus, ketika hadiah itu sudah dikirim dan sampai di rumahnya, Hoengeng tetap mencari tahu siapa pengirimnya, dan mengembalikan seluruh hadiah beserta kemasannya kepada si pemberi.

Ada satu kasus yang bisa membuktikan betapa besar integritas seorang Hoengeng. Ceritanya, ketika Ia menyewa rumah, ternyata sang pemilik menolak dibayar. Namun, bukan Hoengeng namanya jika pasrah



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

dan hanya berucap terima kasih. Hoeng pun bersiasat agar bisa menunaikan kewajiban membayar rumah yang disewanya. Cara yang dipakainya, mengirim sewa rumah melalui wesel pos.

Pengatur Lalulintas

Dalam hal pekerjaan, loyalitas dan rasa tanggung jawabnya tak perlu dipertanyakan. Ia selalu berangkat lebih pagi daripada para

stafnya. Kemudian, ia akan pulang, setelah sebagian besar stafnya sudah meninggalkan tempat, kembali ke rumahnya masing-masing. Setiap hari, baik waktu berangkat maupun saat pulang, Hoeng selalu melewati jalan berbeda. Ini dilakukan, karena ingin mengetahui kehidupan masyarakat. Sekaligus, melihat kondisi lalu lintas selama di perjalanan. Bila di tengah jalan ia menemukan kemacetan, Hoeng tak segan-segan turun tangan



mengurai kemacetan, sekalipun masih memakai atribut sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

Dalam jabatannya sebagai Kapolri, Hoeng adalah sosok VIP yang memiliki beberapa keistimewaan. Nyatanya, tidak semua keistimewaan dia pergunakan. Seperti, Dia tidak mau menerima pengawasan. Dan, sebagai Kapolri juga tidak bersedia rumahnya dipenuhi dengan penjagaan.

Hoeng cukup merasa aman dengan dirinya sendiri. Ia beranggapan, pengawasan dan penjagaan rumah membuatnya berjarak dengan masyarakat. Padahal, bagi Hoeng, rumah juga berarti tempat pengaduan bagi masyarakat. Jika rumahnya dijaga ketat oleh petugas pengamanan, tidak akan ada masyarakat yang berani mendekat apalagi melakukan pengaduan. Tidak hanya pengawasan serta pengamanan, Hoeng juga menolak menerima pemberian mobil dinas. Ia merasa sudah cukup menggunakan mobil keluarga, tidak perlu ditambah lagi dengan mobil dinas.

Sejak menjadi orang nomer satu di jajaran Kepolisian RI, Hoeng muncul sebagai sosok Kapolri media darling. Di manapun ia selalu dikejar oleh para pencari berita. Hebatnya, Hoeng tidak pernah mengelak. Ia bahkan mau melakukan wawancara di luar kapasitasnya sebagai petinggi Polri. Apalagi, Hoeng juga merupakan anggota grup musik Hawaiian. Dan, itu pula membuat dia semakin dekat dengan kalangan masyarakat luas, termasuk jurnalis.

Pada hari-hari besar nasional dan keagamaan, Hoeng tak segan-segan turun ke jalan, untuk memberi rasa aman pada masyarakat dan mendekatkan diri ke warga. Agar antara polisi dan masyarakat tidak ada jarak. Bagi Hoeng, Kapolri tetap polisi, dalam keadaan tertentu dia juga harus mau bertugas sebagaimana pasukan polisi, termasuk memberi rasa aman kepada masyarakat. □

MBO

Pusat Data Sementara Nasional Dibobol

Pemerintah **Terkesan** Lempar Tanggung Jawab

Tidak diduga, peretas berhasil membobol Pusat Data Sementara Nasional (PDSN), sehingga merugikan banyak pihak. Mengapa ini bisa terjadi? Padahal, menurut wakil rakyat, segala kebutuhan kementerian sudah ditunaikan, mulai dari aturan hingga anggaran. Bahkan, ada wakil rakyat mengatakan, pemerintah tidak kompeten mengurus pembangunan sistem dan perlindungan data nasional. Lalu bagaimana semestinya? Berikut pendapat wakil rakyat yang peduli pada sistem dan data nasional.

Fahmy Alaydroes, Anggota MPR/DPR Fraksi PKS

SERANGAN ransomware terhadap Pusat Data Sementara Nasional (PDSN) ini melumpuhkan sejumlah layanan publik. Data 282 kementerian/lembaga (KL) terdampak oleh serangan ganas tersebut. Brain Cipher yang merupakan pelaku penyerangan ransomware ke Pusat Data Sementara Nasional (PDSN) berjanji akan membebaskan seluruh data yang disekap secara gratis.

Sambil memberi nasihat kepada pemerintah Indonesia agar menyiapkan SDM yang kompeten untuk urusan pengawalan data nasional yang sangat penting ini. Duh, betapa malunya kita. Pemerintah Indonesia dianggap tidak kompeten dan lalai/lemah dalam membangun sistem pengamanan data nasional.

Pernyataan yang disampaikan oleh Fahmy dalam rilisnya, lebih lanjut menyebutkan, masalah ini menjadikan wajah Pemerintah babak belur. Pertama, tidak mampu dalam membangun keamanan data nasional, mudah diretas dan dibobol tanpa sedikitpun ada perlawanan, atau ada cadangan/back up data. Langsung lumpuh.

Kedua, Pemerintah terkesan tidak malu, saling lempar tanggung jawab dan tidak ada pernyataan dan permintaan maaf sama sekali. Padahal kerusakan dan kerugian sudah begitu meluas dan mengganggu penyelenggaraan pelayanan publik.



FOTO-FOTO: ISTMENWA

Ketiga, pemerintah terkesan tidak kompeten (bodoh) dalam masalah pembangunan sistem data nasional dan perlindungannya. Enggan melibatkan banyak pakar dari kalangan anak-anak bangsa, alih-alih hanya melibatkan orang-orang dekat sekitar Istana. Sungguh tindakan nepotisme yang memalukan dan membahayakan negara dan bangsa.

Hal demikian menunjukkan wajah Pemerintahan yang tidak mau mendengar

kritik, abai pada sikap profesional dan ketidakmampuan melindungi negara dan bangsa dari ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan (ATHG), kewaspadaan bela negara yang paling mendasar. Semoga Pemerintahan yang akan datang tidak lagi mengulangi kebijakan dan tindakan yang memalukan dan sekaligus mengancam kedaulatan bangsa dan negara. □

AWG

Dave Laksono, Anggota MPR/DPR Fraksi Partai Golkar

BANYAK yang membingungkan kita, PDSN ini adalah salah satu proyek mercusuar dari pemerintahan saat ini. Pemerintah selama 10 tahun terakhir telah mendorong terciptanya ekonomi digital, transformasi digital, internet of things, industry 4.0, industry 5.0. Kemudian kita membangga-banggakan unicorn, decacorn, yang di mana Telkom juga invest dana di sana. Ungkapan ini disampaikan saat rapat kerja Komisi I DPR dengan Kominfo dan BSSN di gedung DPR RI.

Namun, kenapa masalah serangan malah terjadi sehingga hal ini justru banyak mengagetkan kita. Sepertinya, hampir setiap bulan atau bahkan lebih dari satu bulan sekali ada data yang bocor. Terakhir serangan yang bertubi-tubi adanya judi online di mana perputaran uangnya mencapai ratusan triliun rupiah. Dari sini, di mana PDSN kita yang di-hack sampai berhari-hari. Dari sini lalu ada kabar instansi negara yang prestisius bisa kebobolan. Kemudian dikatakan yang terkena serangan adalah data usang, data lama. Meski itu data lama, tetapi itu tetap data yang merupakan dokumen negara apalagi sekarang dengan Teknologi AI mudah membaca algoritma. Sehingga walau itu data lama, data usang, namun tetap bisa dibaca, ditarik kesimpulan, dan dari sini bisa dibaca langkah-langkah pemerintah ke depan seperti apa. Jadi jangan ada alasan itu data lama.

Menjadi pertanyaan, dari serangan ini,



kenapa tidak ada langkah cepat dalam penanggulangan ransomware ini. Dikatakan, serangan ini bukan hanya di Indonesia. Di sejumlah negara bahkan negara maju seperti Singapura dan Amerika Serikat, juga pernah terkena ransomware, namun penanganannya di sana dalam hitungan jam, tidak sampai harian, apalagi dalam waktu satu minggu baru bisa terselesaikan dan data-datanya cepat di-back up dan block sehingga tidak ada sampai hangus.

Dikatakan juga, dari sekian banyak instansi hanya 44 yang datanya bisa terselamatkan lainnya ter-lock akibat ransomware. Ini menyangkut data masya-

rakat dan data pribadi orang.

Kominfo meminta DPR untuk merevisi UU IT, itu sudah kita revisi hingga ketiga kalinya. Kominfo juga meminta DPR untuk menyelesaikan UU PDP, itu juga sudah kita selesaikan. Lalu perlu apa lagi? Untuk menjaga keselamatan data masyarakat, untuk bisa menjamin dunia digitalisasi bisa berjalan, apakah butuh undang-undang baru, apakah butuh tambahan dana lagi, butuh tambahan anggaran lagi. Anggaran Kominfo sejak dari TA 2019 hingga 2024 sudah lebih dari Rp 100 triliun. Lalu kekurangannya di mana? Apakah masalah SDM dan jaringan. □

AWG

Perubahan Nomenklatur Wantimpres Menjadi DPA

Syarief Hasan: Pemilihan Anggota DPA Tergantung Presiden Terpilih

Nomenklatur DPA memang pernah dipakai pada masa Orde Baru, tapi Syarief Hasan meyakini bahwa bukan berarti pemerintahan mendatang kembali ke pola-pola lama.



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

WAKIL Ketua MPR Sjarifuddin Hasan tidak mempermasalahkan rencana DPR RI untuk mengubah nomenklatur Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Adapun mengenai jumlah anggota DPA dan siapa yang masuk dalam DPA, Syarief Hasan mengatakan, diserahkan sepenuhnya kepada presiden terpilih, Prabowo Subianto.

“Kalau menurut RUU-nya seperti itu. Tetapi kembali lagi semuanya tergantung pada Presiden terpilih, karena DPA ini menjadi bagian dari pemerintahan,” kata Syarief Hasan, sapaan Sjaripunddin Hasan, di sela-sela kegiatan bersama Presiden Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono di Semarang, Jawa Tengah, Ahad (14/7/2024).

Hari itu, Syarief Hasan bermain golf

bersama SBY di Semarang Royale Golf, dilanjutkan nonton bareng laga voli antara Jakarta LavAni Allo Bank melawan Palembang Bank Sumsel Babel di GOR Jatidiri, Semarang.

Lebih lanjut dikemukakan oleh Syarief Hasan, seperti diketahui, Badan Legislasi (Baleg) DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Atas UU Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menjadi RUU inisiatif dan dibawa ke sidang paripurna untuk mendapatkan persetujuan.

Dalam Rapat paripurna DPR yang digelar pada Kamis, 11 Juli 2024, seluruh fraksi DPR sepakat untuk menjadikan RUU Wantimpres ini menjadi RUU inisiatif DPR. Setidaknya, ada tiga poin perubahan dalam RUU Wantimpres ini. Pertama, perubahan nomenklatur dari

Wantimpres menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Namun, fungsi kelembagaan dewan pertimbangan ini tidak berubah. Kedua, jumlah anggota DPA menjadi tidak terbatas dan menyesuaikan kebutuhan presiden. Ketiga, perubahan syarat menjadi anggota DPA.

Tekait perubahan nomenklatur Wantimpres menjadi DPA, Syarief Hasan menegaskan bahwa keberadaan institusi Wantimpres (yang nanti berubah menjadi DPA) merupakan bagian dari pemerintahan yang akan datang. “Jadi berapa banyak anggota DPA dan siapa saja yang masuk menjadi anggota DPA tergantung presiden terpilih. Silakan saja, karena ada undang-undang yang mengatur soal DPA ini,” katanya.

Nomenklatur DPA memang pernah dipakai pada masa Orde Baru, tapi Syarief Hasan meyakini bahwa bukan berarti pemerintahan mendatang kembali ke pola-pola lama. “Perubahan nomenklatur dari Wantimpres menjadi DPA hanya soal institusi yang sudah diatur dengan undang-undang dan tidak dikaitkan dengan kebijakan-kebijakan pada masa Orde Baru,” jelasnya.

Ketika ditanya apakah keberadaan DPA akan diisi mantan-mantan presiden atau wakil presiden, Syarief Hasan kembali menyatakan, semua tergantung pada presiden terpilih, Prabowo Subianto. “Sekali lagi semua tergantung pada presiden terpilih, karena DPA adalah lembaga yang berada di bawah presiden,” ujar Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Demokrat ini.

Syarief Hasan juga mengatakan, perubahan nomenklatur Wantimpres menjadi DPA tidak ada kaitannya dengan ide pembentukan presidential club yang pernah dilontarkan Prabowo Subianto. “Itu dua hal yang berbeda. DPA diatur dengan undang-undang. Sedangkan presidential club hanya organisasi yang sifatnya sukarela,” tutupnya. □

Terima Guru Besar Hukum Tata Negara UI

Bamsoet Dukung Perubahan Nomenklatur Wantimpres Menjadi DPA

KETUA MPR RI ke-16 sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo, mendukung rencana DPR RI mengubah nomenklatur Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Keputusan sudah diambil dalam Rapat Paripurna ke-22 masa persidangan V Tahun Sidang 2023-2024, Kamis (11/7/24), di mana seluruh fraksi DPR sepakat untuk menjadikan RUU Wantimpres menjadi RUU inisiatif DPR.

“Setidaknya terdapat 3 poin perubahan dalam RUU Wantimpres, yakni terkait perubahan nomenklatur Wantimpres menjadi DPA, perubahan jumlah anggota, hingga syarat menjadi anggota DPA. Selanjutnya, RUU tersebut akan dibahas DPR bersama pemerintah. Diharapkan bisa segera disahkan menjadi undang-undang dalam waktu dekat. Sehingga pada saat Prabowo - Gibran dilantik menjadi Presiden - Wakil Presiden RI, keberadaan DPA sudah ada dan bisa langsung dimaksimalkan untuk mendukung pemerintahan Prabowo - Gibran,” ujar Bamsoet usai menerima Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara Universitas Indonesia sekaligus Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi, Prof. Abdul Bari Azed, di Jakarta, Kamis (11/7/24).

Dalam pertemuan yang juga dihadiri Penasihat Ikatan Alumni Universitas Indonesia, Boyke Hendra, Ketua DPR RI ke-20 dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7 bidang Hukum & Keamanan ini menyatakan, mendukung apabila keberadaan DPA dimaksimalkan untuk mewujudkan gagasan Presidential Club yang pernah digagas Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Sehingga selain diisi para tokoh masyarakat dari beragam latar belakang dan disiplin ilmu, DPA juga bisa diisi oleh para mantan presiden dan juga bahkan mantan wakil presiden yang pernah memimpin Indonesia.

“Presiden diberikan kewenangan untuk memilih sendiri para anggota DPA sesuai kebutuhan. Siapapun yang dipilih merupakan



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

putera dan putri terbaik bangsa yang tidak hanya memiliki rekam jejak kenegarawanan, melainkan juga memiliki kearifan dalam melihat situasi kehidupan kebangsaan,” jelas Bamsoet.

Dosen Tetap Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Borobudur, Universitas Trisakti, Universitas Pertahanan RI dan Universitas Jayabaya, serta Pendiri Universitas Perwira Purbalingga (UNPERBA) ini menerangkan, selain memberikan dukungan terhadap DPA, Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Indonesia sekaligus Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi, Prof. Abdul Bari Azed, juga memberikan dukungan agar MPR RI bisa kembali memiliki kewenangan mengeluarkan Ketetapan MPR, baik yang bersifat *beschikking* dan *regeling*. Sesuai amanat ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

“Maka sebagai representasi dari prinsip *daulat rakyat*, MPR RI yang terdiri dari Anggota DPR dan DPD RI seharusnya tetap dapat diatribusikan dengan kewenangan subyektif superlatif dan kewajiban hukum, untuk mengambil keputusan atau penetapan

yang bersifat pengaturan guna mengatasi dampak dari suatu keadaan kahar fiskal maupun kahar politik yang tidak dapat diantisipasi dan tidak bisa dikendalikan secara wajar,” terang Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Perkumpulan Alumni Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjajaran (PADIH UNPAD) ini menekankan, kewenangan subyektif superlatif MPR RI melalui Tap MPR RI merupakan solusi dalam mengatasi berbagai persoalan negara tatkala dihadapkan pada situasi kebuntuan konstitusi, kebuntuan politik antarlembaga negara atau antarcabang kekuasaan, hingga kondisi kedaruratan kahar fiskal dalam skala besar.

“Misalnya, ketika terjadi kebuntuan politik antara lembaga kepresidenan dengan lembaga DPR RI, kebuntuan politik antara pemerintah dan DPR RI dengan lembaga Mahkamah Konstitusi (MK), serta jika terjadi sengketa kewenangan lembaga negara yang melibatkan MK. Mengingat sesuai asas peradilan yang berlaku universal, hakim tidak dapat menjadi hakim bagi dirinya sendiri, maka MK tidak dapat menjadi pihak yang berperkara dalam sengketa lembaga negara,” pungkas Bamsoet. □

Delegasi Ketua Parlemen Negeri Trengganu, Malaysia

Parlemen Malaysia dan Indonesia Perkuat Hubungan dan Peran, Termasuk Bela Palestina Merdeka

Parlemen Indonesia dan Malaysia bisa bekerjasama mendorong agar organisasi-organisasi Parlemen di berbagai level dunia menuntut negara-negara mereka untuk mendukung pemberian sanksi terhadap Israel.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

WAKIL Ketua MPR RI Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid, LC., MA., atau HNW menerima kunjungan Yang Dipertuan Dewan Undangan Negeri Trengganu Malaysia, Dato' Haji Mohd. Nor bin Hamzah dan delegasi,

Rabu (17/7/2024). Pertemuan berlangsung penuh keakraban di Ruang Kerja Wakil Ketua MPR, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Kedua pihak membahas hubungan antar kedua negara, mulai dari masalah pendidikan, politik,

ekonomi hingga dunia internasional.

Menyangkut masalah pendidikan, Dato' Haji Mohd. Nor bin Hamzah, dalam kesempatan itu menanyakan perihal kemajuan dunia pendidikan di Indonesia, termasuk kemungkinan menambah jumlah pertukaran pelajar antarkedua negara. Yang Dipertuan Dewan Undangan Negeri Trengganu mengisyaratkan keinginannya untuk memperbanyak jumlah pelajar dari Malaysia untuk belajar di Indonesia.

Menyinggung masalah politik, Haji Mohd. Nor bin Hamzah memuji keberhasilan Indonesia melaksanakan Pemilu 2024 dengan baik. Sekalipun perjalanan pemilu kali ini penuh dengan persoalan yang harus diselesaikan hingga ke Mahkamah Konstitusi. Ketua Parlemen di Trengganu itu berharap, Pilkada serentak yang akan segera dilaksanakan juga akan berlangsung lancar, sesuai harapan masyarakat.

Terkait kondisi dunia internasional, khususnya penyerangan Israel terhadap Palestina, Haji Mohd. Nor bin Hamzah





berharap, Indonesia sebagai negara muslim terbesar kedua di dunia bisa meningkatkan peran yang sudah dilakukan selama ini. Sementara Malaysia akan menjadi negara yang mendukung sikap dan perjuangan Indonesia untuk akhiri genosida di Gaza dan penjajahan Israel atas Palestina, dan berharap agar segera Negara Palestina merdeka segera terwujud.

Di akhir pertemuan, Haji Mohd. Nor bin Hamzah menyampaikan undangan kepada Wakil Ketua MPR untuk kunjungan balasan ke Malaysia, sekaligus menghadiri Konferensi Internasional yang akan diselenggarakan di Malaysia pada bulan Oktober 2024 akan datang.

Menyambut kehadiran tamunya, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menyampaikan bahwa dia merasa terhormat dengan kedatangan Ketua Parlemen di Trengganu, untuk kali yang kedua sekalipun dengan figur yang berbeda. Menurut Hidayat, sistem demokrasi di Malaysia sudah berkembang dengan baik. Sekalipun sistem demokrasi yang dibangun di sana memiliki kekhususan, dan karenanya tidak sama persis dengan yang dipraktikkan di Indonesia. Namun, menurut HNW, yang penting tetap berorientasi untuk meningkatkan kemaslahatan dan kemajuan Rakyat dan Negara, dengan terus membangun komunikasi yang lebih meluas bagi kemajuan demokrasi, juga

kehidupan berbangsa dan negara. Sekaligus menjadi solusi terhadap permasalahan yang ada, baik di tingkat lokal, regional, maupun global.

“Seperti Palestina yang adalah masalah global. Itu bisa jadi ajang pembuktian kemampuan kolaborasi antara Indonesia dan Malaysia yang memiliki sikap yang serupa terkait Palestina. Dato Sri Anwar Ibrahim (PM Malaysia) bahkan berkomitmen dukung sikap Presiden terpilih Prabowo Subiyanto untuk membantu Palestina, bahkan bersama-sama mengirim pasukan perdamaian bila ditugaskan oleh PBB.

Keinginan tersebut, menurut HNW, sangat bisa dilakukan. Apalagi negara-negara barat dan timur tengah sangat percaya pada Indonesia dan Malaysia. Baik karena sistem demokrasinya maupun Islam moderat yang berkembang di kedua negara. Untuk itu, baik Indonesia maupun Malaysia perlu melakukan maksimalisasi usaha, misalnya dengan mengajukan koreksi terhadap keterlibatan Israel di ajang olahraga internasional, baik dalam even Olimpiade maupun kegiatan sepakbola di bawah naungan FIFA. Seperti yang sudah dilakukan terhadap Afrika Selatan maupun Rusia.

Rusia, lanjut HNW, masih diberi sanksi tidak bisa ikut ajang olahraga dunia, karena menyerang Ukraina. Afrika Selatan pernah dilarang ikut Olimpiade karena politik apartheidnya. “Semestinya sanksi juga diberlakukan terhadap Israel. Karena Israel sudah lebih lama menginvasi Palestina, jumlah korbannya juga lebih banyak dibanding jumlah korban yang diakibatkan serangan Rusia. Apalagi, selain menginvasi, Israel juga melakukan genosida dan melanggar berbagai resolusi organisasi internasional. Dan, Israel juga melakukan politik apartheid,” papar HNW.

Jagi, tegas HNW, kalau Rusia dan Afrika Selatan sudah dijatuhi sanksi, semestinya FIFA dan Komite Olimpiade internasional juga menjatuhkan sanksi keikutsertaan Israel pada ajang olimpiade maupun kegiatan sepakbola di bawah FIFA. “Parlemen Indonesia dan Malaysia bisa bekerjasama mendorong agar organisasi-organisasi Parlemen di berbagai level dunia menuntut negara-negara mereka untuk mendukung pemberian sanksi terhadap Israel,” pungkas HNW. □



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Collaborative Parliament

Upaya Menghilangkan Persaingan DPR - DPD dan Penguatan DPD Tanpa Amandemen

“Jika collaborative parliament dilakukan maka upaya peningkatan atau penguatan DPD tidak perlu melalui amandemen UUD, tapi cukup diakomodir melalui UU MD3 dan UU P3 (Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,” jelas Fadel Muhammad.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

WAKIL Ketua MPR RI, Prof. Dr. Ir. Fadel Muhammad, mengungkapkan bahwa tantangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) selama ini adalah berupaya melakukan penguatan dan peningkatan kewenangan DPD melalui amandemen UUD, yang sampai saat ini selalu menemui kendala.

Namun, Pimpinan MPR RI dari Kelompok DPD RI ini mengatakan, ada satu konsep yang bisa melakukan itu semua, yakni penerapan Collaborative Parliament. Konsep ini mengacu kepada kolaborasi parlemen dalam sistem parlemen bikameral dalam berbagai tugas terkait kewenangan DPD yang terdapat pada Pasal 22D UUD NRI Tahun 1945.

“Collaborative Parliament juga untuk

membangun agar hubungan antara DPD dan DPR benar-benar saling melengkapi, bukan berkompetisi atau bersaing,” katanya.

Hal tersebut disampaikan Pimpinan MPR dari Kelompok DPD RI ini, dalam Dialog Publik Forum Gerakan untuk Rakyat (Guntur),





FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

bertema: 'Urgensi Penguatan Fungsi DPD RI dalam Perspektif Hukum Tata Negara' yang digelar Bidkumhankam PB HMI 2024-2026, di bilangan Tebet, Jakarta Selatan, Sabtu (27/7/2024).

Fadel Muhammad yang diundang secara khusus sebagai narasumber utama menjelaskan, bentuk saling melengkapi dalam collaborative parliament itu adalah, DPD fokus kepada pemerintah daerah yang memang sudah menjadi stakeholder-nya, serta menguatkan pembangunan daerah.

"DPD harus mengamati dan berbicara mengapa satu daerah misalnya,

perekonomiannya tidak berkembang, mengapa kemiskinan masih cukup tinggi, padahal anggaran ada. Intinya, DPD kembali kepada niat awal dibangun atau dibentuknya DPD itu sendiri. Sedangkan DPR, fokus kepada kebijakan pemerintah pusat," ujar anggota DPD Dapil Provinsi Gorontalo ini.

Dengan adanya pembagian tugas itu, lanjut Fadel Muhammad, DPD memiliki kewenangan lebih sekaligus mewakili parlemen seutuhnya terkait kepentingan daerah. DPD juga bisa melaksanakan paradigma local collaborative governance melakukan kolaborasi dengan Pemda dan

unsur lain untuk kemajuan daerah.

"Jika collaborative parliament ini dilakukan, maka upaya peningkatan atau penguatan DPD tidak perlu melalui amandemen UUD, tapi cukup diakomodir melalui UU MD3 dan UU P3 (Pembentukan Peraturan Perundang-undangan)," jelas Fadel Muhammad.

Konsep Collaborative Parliament sendiri, dikatakan Fadel Muhammad, muncul berkaca dari keberhasilan penerapan paradigma pelayanan publik lokal Collaborative Governance dengan nuansa Entrepreneurial Governance, yang dilakukannya saat menjabat sebagai kepala daerah, Gubernur Provinsi Gorontalo selama dua periode.

"Dalam penerapan paradigma tersebut, pemerintah daerah tidak boleh sendiri. Tapi, harus melibatkan stakeholders yang lain. Dari pengalaman saya saat menjadi gubernur Gorontalo, saya coba ketika itu menerapkan pikiran dan ide, di mana saya tidak sendirian tapi melibatkan berbagai elemen masyarakat. Di antaranya, melibatkan perguruan tinggi dan tokoh masyarakat sampai saya menemukan format pembangunan yang ideal diterima oleh semua pihak," terangnya.

Sedangkan nuansa Entrepreneurial Governance dalam paradigma collaborative governance itu, kemudian memberi faktor kesempurnaan tersendiri dalam pengelolaan daerah, terutama dalam penempatan dan pengelolaan anggaran daerah. □



Konsep Wisata Regeneratif

Harus Dikembangkan demi Pariwisata yang Berkelanjutan

Dorong pengembangan wisata berkonsep regeneratif dalam upaya meningkatkan kinerja pariwisata nasional yang lebih baik dan berkelanjutan.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

WAKIL Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, menyatakan, pengelolaan kawasan pariwisata yang berkelanjutan harus menjadi kepedulian bersama agar potensi wisata yang tersebar di seluruh Indonesia dapat dinikmati oleh generasi mendatang.

Rerie, begitu Lestari Moerdijat biasa disapa, menyampaikan hal itu dalam

keterangan tertulisnya, Selasa (23/7), menanggapi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang mengungkapkan bahwa dalam upaya menuju peringkat 20 besar dunia, pariwisata Indonesia harus menjalankan konsep wisata regeneratif, yang memiliki fokus pada pemulihan dan regenerasi lingkungan serta masyarakat lokal.

Tujuan utamanya adalah menjadikan sebuah destinasi wisata yang lebih baik

daripada kondisi awalnya.

Dalam konsep pariwisata yang regeneratif, menurut Rerie, dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan nyata yang melibatkan partisipasi wisatawan, seperti menanam mangrove, restorasi terumbu karang, hingga mengurangi sampah plastik.

Apalagi, ungkap Lestari, berdasarkan Sustainable Travel International, sektor pariwisata dan hospitality menghasilkan rata-rata 35 juta ton sampah per tahun, karena biasanya para wisatawan menghasilkan sampah sampai dua kali lipat jika dibandingkan penduduk lokal.

Menurut Rerie, pengembangan konsep wisata regeneratif harus segera diterapkan untuk mencegah munculnya timbunan sampah di kawasan wisata di tanah air.

Diakui Rerie, Indonesia memiliki banyak potensi kawasan wisata yang digemari wisatawan dari berbagai penjuru dunia. Namun, tegas Rerie, yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, upaya untuk menjaga kawasan wisata tetap memiliki daya tarik dan terawat dengan baik juga harus dilakukan.

Menurut Rerie, menjaga kawasan wisata tetap bersih dan indah dengan melibatkan masyarakat sekitar dan wisatawan, merupakan langkah strategis dalam mewujudkan pariwisata yang berkelanjutan.

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu sangat berharap, para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah mampu menggalang kolaborasi yang kuat dalam merealisasikan pengembangan sektor pariwisata nasional yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, sehingga dampak positif pengembangan wisata dapat dinikmati secara merata di tanah air. □



Terima Perwakilan Syarikah Arab Saudi

Yandri Susanto Dorong Saudi Perbaiki Ekosistem Penyelenggaraan Haji

Dalam penyelenggaraan haji, jamaah haji reguler Indonesia sebaiknya dilayani oleh beberapa syarikah.



WAKIL Ketua MPR, Yandri Susanto, menyatakan bahwa perlu adanya kesepakatan dari pemerintah Saudi Arabia dan Indonesia untuk peningkatan kualitas pelayanan penyelenggaraan ekosistem haji. Sebagai jamaah haji terbanyak di dunia sebaiknya Indonesia tidak hanya ditangani oleh 1 (satu) Syarikah.

“Jamaah haji reguler Indonesia sebaiknya dilayani oleh beberapa syarikah dalam penyelenggaraan haji,” jelas Yandri Susanto

Demikian disampaikan Yandri Susanto di Ruang Kerja Lantai 9 Gedung Nusantara III MPR/DPR Senayan, Jum’at 26 Juli 2024, usai menerima perwakilan Syarikah dari Saudi Arabia Syech Jameel Bondagi dan Syech Zuheir Sedayu.

“Perlu adanya syarikah atau pihak lain yang diberikan tanggung jawab dalam melayani jamaah Indonesia. Sehingga dalam evaluasi dapat terlihat mana yang terbaik dari sisi pelayanan, tenda, konsumsi, serta kesesuaian dengan rukun haji,” lanjut Yandri.

Kemudian Yandri juga menyampaikan bahwa sebaiknya Pemerintah Saudi dan Indonesia bersepakat agar 1 (satu) bulan sebelum musim haji tidak lagi mengeluarkan

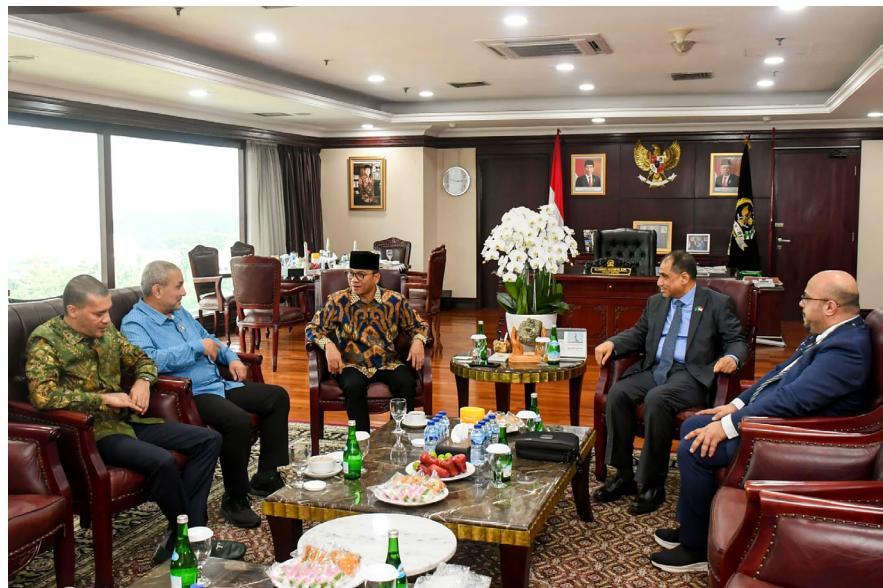


FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

visa ziarah atau sejenisnya.

“Penggunaan visa ziarah dan sejenisnya bisa menyebabkan kekacauan puncak haji di armuzna. Karena, jamaah dengan visa ziarah tidak terdata sebagai jamaah yang resmi,” jelas Yandri.

Dalam kesempatan tersebut Yandri juga menyoroti adanya calon jamaah yang ternyata memiliki permasalahan dengan hukum di Saudi. Sehingga ia mendorong agar

pemerintah Saudi memberikan daftar WNI yang memiliki masalah hukum kepada Kedutaan Saudi di Jakarta. Sehingga sejak awal dapat terdeteksi apabila ada masalah visa nya tidak bisa diterbitkan.

“Di lapangan masih ditemui calon jamaah yang visanya keluar, namun pernah bermasalah dengan hukum di Saudi. Hal ini sangat merugikan secara mental dan psikis calon jamaah tersebut,” tutup Yandri. □



Dr. H. Bambang Soesatyo, SE., SH., MBA.

Ketua MPR RI

Bermartabat Jika Menyoal Kurangnya Tenaga Pendidik

BICARA permasalahan pendidikan di Indonesia tentu tidak akan ada habisnya, karena sangat sulit menemukan akar permasalahannya. Sementara kita sangat memahami, pendidikan merupakan hal terpenting negara dapat berkembang dengan cepat. Sebuah negara besar akan memperlakukan pendidikan sebagai prioritas utama. Karena melalui pendidikan, kemiskinan masyarakatnya akan terhapuskan dan tergantikan dengan kesejahteraan. Namun, dalam proses pengembangan pendidikan di Indonesia, kita masih menghadapi banyak permasalahan di setiap tahapannya. Permasalahan ini hanya dapat diselesaikan dengan partisipasi seluruh pemangku kepentingan. Tidak berjalan sendiri-sendiri dengan pikiran dan ego sektoralnya.

Tulisan Prof. Abdul Haris, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi RI, di sebuah harian nasional tentang 'Kebesaran Guru Besar' sangat menarik. Menurut Prof. Haris, Guru Besar adalah kata yang tak terpisahkan dari dosen, berasal dari kata 'docent' dalam bahasa Belanda berarti guru. Sementara sebutan Profesor berasal dari bahasa Latin yang artinya seseorang yang dikenal oleh publik berprofesi sebagai pakar atau sering disingkat dengan 'Prof'. Di Indonesia profesor merupakan seorang dosen dan/atau peneliti yang biasanya dipekerjakan oleh lembaga-lembaga/institusi pendidikan perguruan tinggi (universitas, institut ataupun sekolah tinggi). Gelar Profesor sering disebut juga Guru Besar merupakan jabatan fungsional, bukan gelar akademis. Ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 1 Butir 3, menyebutkan bahwa profesor atau guru besar adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi.

Prof. Haris benar, bahwa Profesor atau Guru Besar di Indonesia patut bersyukur karena pengangkatannya dilakukan oleh negara berdasarkan usulan perguruan tinggi. Artinya, mereka di angkat untuk kepentingan bangsa dan negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Namun, seringnya perubahan peraturan yang selalu menjadi dilema antara upaya memperbanyak jumlah guru besar berkualitas untuk memenuhi rasio jumlah dosen dengan pengetatan aturan yang berpotensi menghambat tercapainya rasio guru besar yang ideal.

Harus diakui jumlah Profesor atau Guru Besar di Indonesia masih sangat sedikit. Kurang dari 6.000 dari total keseluruhan dosen yang berjumlah sekitar 300.000 orang dari 4.000-an Perguruan Tinggi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dari jumlah itu, yang terdaftar di Science and Technology Index (Sinta) milik Kemenristekdikti hanya sebanyak 4.200-an orang. Jadi, terdapat sebanyak 1.000-an Profesor atau Guru Besar yang tak terdaftar di Sinta.

Perguruan Tinggi (PT) di Indonesia idealnya memiliki rasio Profesor (Guru Besar) sebanyak 20% dari jumlah dosen yang ada. Namun, hal tersebut belum dapat dipenuhi oleh hampir semua perguruan tinggi di Indonesia. Selain sulitnya persyaratan untuk mengajukan jabatan Guru Besar, antara lain minimal memiliki jurnal internasional bereputasi, para dosen juga masih disibukkan dengan jam mengajar dan kegiatan administratif dalam rangka pengembangan institusi, sehingga persyaratan untuk menjadi guru besar masih sulit dipenuhi para dosen, selain proses pengurusan yang dirasakan para dosen tidak sederhana dan birokrasi belum mendukung.

Data dari Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah III DKI Jakarta menunjukkan total profesor di LLDikti III jumlah Guru Besar kurang proporsional dibandingkan total dosen.

Sungguh bermartabat jika saat ini kita harus lebih peduli dan menunjukkan kemauan untuk menyoal darurat kekurangan tenaga pendidik, daripada mempertontonkan sikap ego sektoral yang pada akhirnya menjadi kontra produktif bagi upaya kita dalam membangun bangsa.

Hari-hari ini, tidak lagi menjadi rahasia umum, Indonesia dibayangi darurat kekurangan tenaga pendidik pada semua jenjang pendidikan. Fakta ini mestinya menjadi prioritas masalah yang menuntut kepedulian semua pihak demi masa depan anak dan remaja.

Per September 2023, pejabat Kemendikbudristek (Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi) memublikasikan data perkiraan tentang potensi kekurangan tenaga guru. Sepanjang tahun 2024 ini, Indonesia kekurangan 1,3 juta tenaga guru, karena banyaknya guru yang memasuki usia pensiun. Per 2022-2023, ada 3,3 juta guru di sekolah negeri. Dari jumlah itu, per tahunnya, diperkirakan tak kurang dari 70.000 guru akan pensiun. Upaya menambah tenaga guru dalam jumlah signifikan akan sulit terwujud. Alasannya, sebagai profesi, menjadi guru kurang

diminati orang muda. Jika tidak segera dihadirkan kebijakan yang solutif, Indonesia akan terperangkap pada situasi darurat kekurangan guru.

Kecenderungan yang sama juga menggejala di perguruan tinggi. Kesenjangan jumlah dosen dan mahasiswa sudah lama menjadi fakta di sejumlah perguruan tinggi. Minimnya penambahan jumlah dosen berbanding terbalik dengan jumlah mahasiswa baru yang terus bertambah setiap tahunnya. Dan, sejauh ini, belum ada kebijakan yang mengarah pada upaya penambahan jumlah dosen. Sebaliknya, pemerintah pada 2021 justru menghadirkan larangan bagi perguruan tinggi negeri (PTN) mengangkat dosen tetap non-ASN.

Larangan yang mulai berlaku sejak Desember 2021 itu dituangkan dalam Surat Edaran Kemendikbudristek No.68446/A.A3/TI.00.02/2021 tentang pemberian Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) bagi dosen non-ASN di PTN. Larangan ini malah membuat bingung komunitas kampus karena akan muncul sejumlah masalah jika ketentuan ini diimplementasikan.

Pada 2022, tercatat tak kurang dari 326,5 ribu dosen. Lebih dari 100.000 dosen mengajar di PTN, dan sebagian besar mengajar di PT Swasta (PTS). Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), penyebaran dosen tidak merata. Jawa Timur memiliki jumlah dosen terbanyak dengan 43.827, Jawa Barat 40.720 dosen, dan Jakarta 30.327 dosen. Paling sedikit di Kalimantan Utara dengan jumlah 700 dosen. Sebuah riset terdahulu menemukan fakta bahwa banyak perguruan tinggi yang memiliki ratio tidak sehat. Riset itu menemukan fakta, satu dosen bisa mengajar 100 mahasiswa. Bahkan, ada juga temuan satu dosen mengajar 750 mahasiswa.

Selain kurangnya tenaga pendidik, kurikulum pendidikan pun justru sering menimbulkan masalah bagi guru dan murid. Pasti menimbulkan masalah karena kurikulum yang terus diubah-ubah. Sejak 2004 — dengan kurikulum berbasis kompetensi— hingga 2020 dengan Kurikulum Merdeka Belajar, sudah dilakukan empat kali perubahan kurikulum. Tetapi, sebagaimana sudah dipahami semua pihak, muatan kurikulum pendidikan yang terus diubah-ubah itu sama sekali tidak responsif dengan kebutuhan anak dan remaja era terkini, yang dinamika hidup kesehariannya melekat pada akses Internet dan teknologi digital. Memprihatinkan karena sosialisasi pemahaman akan Industri 4.0 hingga Artificial Intelligence (AI) sangat minim. Muatan kurikulum yang tidak relevan itu menyebabkan anak dan remaja menghadapi ketidaktentuan untuk menetapkan minat dan membangun kompetensi demi masa mereka.

Pun, telah diingatkan berkali-kali bahwa digitalisasi pada berbagai aspek kehidupan sudah barang tentu menghadirkan tantangan baru yang cukup rumit bagi kegiatan belajar-mengajar dalam dunia pendidikan. Karakter dan kebutuhan siswa era terkini atau Gen-Z dan Generasi Alpha sangat berbeda dengan generasi terdahulu. Digitalisasi melekat pada anak dan remaja era sekarang. Konsekuensinya, komunitas guru dan dosen pun harus lebih melek teknologi agar dapat menjawab kebutuhan siswa. Respons pemerintah terhadap urgensi kompetensi digital para guru pun sangat

lamban, bahkan terlihat minimalis.

Pada Mei 2023, seorang pejabat Kemendikbud menyajikan data bahwa dari total jumlah guru di Indonesia, baru 40% yang melek Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Sedangkan 60% sisanya digambarkan masih gagap dengan perubahan di era digital sekarang. Faktor ini menyebabkan derajat literasi digital pada masyarakat, utamanya komunitas anak dan remaja, tergolong rendah.

Pada hal, sudah sejak tiga dekade lalu, pemerintah dan masyarakat mengenal digitalisasi. Semua mengenal digitalisasi dengan hadirnya internet dan ragam perangkat telepon digital, mobile data hingga teknologi jaringan nirkabel atau Wifi (wireless fidelity). Kegagalan merespons perubahan dengan kurikulum pendidikan yang tidak relevan menyebabkan hampir 10 juta Gen-Z kini berstatus pengangguran, karena tidak memiliki kompetensi sesuai kebutuhan pasar kerja era sekarang.

Jumlah pelajar Indonesia periode 2023-2024 mencapai 53,14 juta siswa, dan 24,04 juta di antaranya adalah siswa sekolah dasar (SD). Pemerintah, melalui Kemendikbudristek, mestinya sigap dengan menyediakan dan memberi akses seluas-luas kepada anak dan remaja untuk bisa mendalami ketrampilan digital sejak dini. Sebab, masa depan digitalisasi Indonesia ada di pundak anak dan remaja saat ini.

Jangan lupa bahwa Indonesia sedang butuh jutaan pekerja yang punya kompetensi digital. Bank Dunia pada tahun 2019 memperkirakan Indonesia butuh sekitar sembilan (9) juta tenaga kerja dengan keterampilan digital hingga tahun 2030. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) juga membuat perkiraan yang sama. McKinsey & Company pada 2019 juga telah mengingatkan bahwa per tahunnya, Indonesia akan butuh tambahan sekitar 600.000 pekerja dengan ketrampilan digital untuk mendukung dan melayani pertumbuhan ekonomi digital yang terus berkembang.

Kalau anak dan remaja ingin belajar untuk mengembangkan talenta digital-nya, mereka bertanya kepada siapa dan belajarnya di mana? Masyarakat merasakan bahwa informasi tentang hal ini sangat minim. Kominfo memang punya program Digital Talent. Sayangnya, sosialisasi program digital Talent Kominfo itu sangat minim sehingga tak mampu menjangkau 53,14 juta siswa yang tersebar di seluruh Indonesia.

Itulah sebagian masalah yang kini menyelimuti dunia pendidikan nasional. Masalah kurangnya tenaga pendidik, kompetensi digital para guru hingga masalah kurikulum yang tidak responsif dengan perubahan. Bagi mereka yang peduli akan martabat dan masa depan anak-remaja, sangat relevan untuk selalu menyoal rangkaian masalah tersebut. Kalau hanya sekedar mengubah-ubah peraturan terus-menerus dan meninggikan ego sektoralnya, ya sulit untuk mencapai tujuan nasional pendidikan kita. Alih-alih bisa mencapai rasio jumlah guru dan dosen di Indonesia serta rasio guru besar di perguruan tinggi, malah bisa jadi sebaliknya. Dalam beberapa tahun mendatang Indonesia akan menghadapi paceklik guru, dosen, dan guru besar dalam jangka waktu yang lama. □

Sosialisasi Empat Pilar MPR di Alexandria Islamic School

Idris Laena
Sosialisasi Empat Pilar untuk
 Menumbuhkan Cinta Tanah Air



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

KETUA Badan Penganggaran MPR RI, Dr. Ir. H.M. Idris Laena, MH., menyebutkan, para siswa perlu diberikan pemahaman sejak dini tentang nilai-nilai kebangsaan, yakni Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Pemahaman terhadap nilai-nilai kebangsaan kepada para siswa itu untuk menumbuhkan cinta Tanah Air.

“Kepada para siswa, baik tingkat SMP maupun SMA, perlu diberikan pemahaman sejak dini tentang nilai-nilai kebangsaan, yakni Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika,” katanya dalam acara Sosialisasi Empat Pilar MPR di Alexandria Islamic School, di Bekasi, Jawa Barat.

Menurut Idris Laena, pemahaman yang diberikan kepada para siswa sejak dini itu akan menumbuhkan rasa cinta Tanah Air. “Dengan demikian pemahaman sejak dini nilai-nilai kebangsaan, yakni Pancasila, UUD NRI tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, kepada para siswa akan menumbuhkan rasa cinta Tanah Air Indonesia,” ujar Idris Laena yang juga Ketua Pembina Yayasan BPLI-Alexandria Islamic School dalam keterangannya, Kamis (11/7/2024).

Sosialisasi Empat Pilar MPR kepada siswa SMP dan SMA Alexan-





dria Islamic School ini merupakan salah satu kegiatan prasasi menghadapi tahun ajaran baru 2024-2025. Kegiatan prasasi yang secara umum dikenal dengan MPLS (Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah) Alexandria Islamic School ini diisi dengan berbagai kegiatan.

Kegiatan MPLS di Alexandria Islamic School bukan hanya sekedar pengenalan lingkungan, tetapi juga untuk menggali potensi dari para siswa yang baru masuk. Menurut Ketua Yayasan BPLI-Alexandria Islamic School Tania Laena, BSc., MBA., para siswa harus mampu menggali potensi dirinya.

“Sehingga ketika lulus dan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dan juga ketika masuk dalam dunia kerja maka akan mampu bersaing dan mengharumkan nama Alexan-

dria Islamic School sebagai alamamater,” katanya pada saat penutupan prasasi siswa baru tahun ajaran baru 2024-2025.

Untuk menggali potensi dari siswa baru Alexandria Islamic School, pada acara penutupan prasasi ditampilkan pagelaran

seni dan budaya mengambil tema “The Wonderfull Indonesia”. Acara ini dihadiri perwakilan Diknas Kota Bekasi dan Kanwil Agama Kota Bekasi, serta pimpinan yayasan, antara lain Dr. Astrid Laena, SH., MH.; Lily Masniary BSc., dan H. Tafsirudin, SE. □



Sosialisasi Empat Pilar Bersama Central Kristen Indonesia

HNW: Keberagaman Agama Justru Membuat Bangsa ini Kuat dan Bersatupadu



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

RATUSAN umat Kristen yang terhimpun dalam Central Kristen Indonesia (CKI) sejak pukul 08.00 WIB, hari Senin (22/7/2024), memenuhi Gedung Nusantara V, di Komplek MPR/DPR/DPD Senayan, Jakarta. Mengenakan seragam celana hitam dan kemeja putih, mereka hadir di kompleks parlemen dalam rangka mengikuti Sosialisasi Empat Pilar MPR, yaitu: Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Sosialisasi ini terasa istimewa karena pematerinya adalah politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang terdiri dari: Wakil Ketua MPR Dr. H. Muhammad Hidayat Nur Wahid, Lc., MA., (HNW) dan anggota MPR/DPR Dr. H. Mardani Ali Sera, M.Eng.

Sedahkan dari pihak Pimpinan CKI hadir: Ketua Umum DPP CKI Brigjen Pol (Purn) Dr. Karel Albert Rahalu, Sekjen CKI Pdt Dr. Herry Saragih, Ketua CKI DPD Jakarta Pdt. Kol (Purn) Robert Haposan, serta ketua-ketua CKI Jawa Tengah dan Banten.

Selaku pembicara, HNW menyatakan, Sosialisasi Empat Pilar MPR yang diselenggarakan hari itu adalah sosialisasi bersejarah, karena mendapat kunjungan kehormatan dari para pimpinan dan anggota

CKI. Meski, dia mengakui, sudah terbiasa bertemu dan menerima beragam komunitas Kristiani. "Kami juga pernah melakukan sosialisasi di Manado, Sulawesi Utara, atas undangan Komunitas Kristiani di sana," katanya.

Jadi, jelas HNW, mereka yang mendapat sosialisasi datang dari beragam profesi, seperti kalangan pemuda, ormas, dan komunitas lainnya. "Menerima dari beragam delegasi membuktikan MPR merupakan rumah untuk seluruh rakyat Indonesia," tutur pria yang juga Ketua Badan Wakaf Pondok Mondern Darussalam Gontor itu.

Sosialisasi, menurut HNW, diperuntukan bagi seluruh warga bangsa, baik yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Bila HNW sudah mengungkapkan sosialisasi digelar bersama dengan berbagai kampus, sekolah, kelompok agama, ormas, profesi, komunitas, maka dalam kesempatan itu dirinya juga menceritakan pengalaman melakukan sosialisasi saat di luar negeri.

Dia lalu menceritakan, pada suatu saat ia bersama delegasi melakukan kunjungan ke kantor PBB di Geneva, Swiss. Selepas mengunjungi kantor berhimpunnya negara-negara di dunia itu, ia berkunjung ke Kantor

IPU (Inter Parliamentary Union), wahana berhimpunnya parlemen dari berbagai negara. Markas IPU juga di Geneva.

Saat di IPU, alumni Universitas Madinah, Saudi Arabia, itu menjelaskan, tugas dan kewenangan MPR, salah satu adalah melakukan Sosialisasi Empat Pilar. "Mendapat pemaparan demikian, Pimpinan IPU merasa kaget karena ada negara yang mengurus warganya demikian cermatnya, sampai-sampai ideologi dan konstitusi disosialisasikan. Dan, "Indonesia merupakan satu-satunya negara di dunia yang Parlemennya melakukan itu," paparnya.

Islam dan Kebangsaan

Empat Pilar MPR, sebut HNW, merupakan warisan sikap kenegarawanan para pendiri bangsa. Bangsa ini didirikan oleh Bapak dan Ibu Bangsa. HNW lalu menunjuk fakta yang membuktikan Indonesia tidak hanya didirikan oleh Bapak Bangsa, namun juga oleh Ibu Bangsa. HNW menyebut, dua dari anggota BPUPK, adalah kaum perempuan. Kedua Ibu Bangsa itu adalah Raden Nganten Siti Sukaptinah Sunaryo Mangunpuspito, dan Mr. Hj. Raden Ayu Maria Ulfah. "Dua-duanya aktivis perempuan," ujarnya.

Maria Ulfah, tambah HNW, adalah perempuan pertama dari Indonesia yang mendapat gelar master hukum di masa kolonialisme Belanda. Ia lulusan Universitas Leiden. Selanjutnya ia menjadi menteri sosial.

Bapak dan Ibu Bangsa itu, kata HNW, memberikan warisan kenegarawanan. Warisan kenegarawanan yang diturunkan ke anak dan cucu hingga saat ini adalah disepakatinya Pancasila sebagai dasar negara, UUD Tahun 1945 sebagai konstitusi negara, NKRI sebagai bentuk negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara. "Empat hal tersebut dilahirkan dengan perdebatan yang begitu akrab dan hangat," katanya.

Lebih lanjut, HNW mengungkapkan, Bapak dan Ibu Bangsa dalam dinamika yang ada saling memberi, menerima, mendengarkan,

dan bisa memutuskan pendapat secara bersama. Hal demikian merupakan dinamika positif yang luar biasa, keteladanan yang sangat merakyat, yang harus menjadi inspirasi kita sehingga selamat dan merdekalah Indonesia dengan disepakatinya Pancasila, UUD Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika melalui proses yang sangat demokratis.

Dalam mencari rumusan dasar negara, dalam sidang-sidang BPUPK, 29 Mei hingga 1 Juni 1945, muncul pikiran-pikiran kebangsaan yang disampaikan oleh Soekarno, Mohammad Yamin, dan Soepomo. Soekarno berpidato dengan menyampaikan

BPUPK pun membentuk Panitia 8. Panitia ini diketuai oleh Soekarno.

Melihat komposisi Panitia 8 yang tidak proporsional maka Soekarno dengan kenegarawanannya membentuk Panitia 9, sebab bila masih berjumlah 8 orang maka hal demikian tidak menyelesaikan masalah karena tidak adil dan tidak akan menghadirkan suatu kompromi, sebab komposisinya timpang.

Di Panitia 9 ada empat dari kalangan nasionalis non-agama dan lima dari kalangan nasionalis agama. Dari kalangan nasionalis non-agama adalah Soekarno, Mohammad Hatta, Mohammad Yamin, dan Achmad

Pancasila, namun saat itu masalahnya belum selesai sebab Sila I yang masih mengandung 7 kata, yakni: ‘.....dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya’ mendapat respon keberatan dari perwakilan Indonesia bagian timur. Salah satu tokoh yang merasa keberatan dengan 7 kata itu adalah Mr. Latuharhary.

Meski ada keberatan, menurut HNW, hal demikian tidak membuat bangsa ini pecah. Bapak dan Ibu Bangsa tetap mampu dan mau mencari solusi. Salah satu anggota Panitia 9, yakni Bung Hatta, bertemu dengan tokoh-tokoh umat Islam, kemudian menyampaikan tentang masalah ini. “Tanpa berlama-lama 4 tokoh umat Islam itu memahami dan menyepakati untuk mengubah 7 kata dalam Piagam Jakarta menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa,” ujarnya. “Sikap umat Islam yang menerima penghapusan 7 kata membuat bangsa ini selamat dari perpecahan, dan disepakatilah rumusan akhir dari Pancasila, yang disahkan pada 18 Agustus 1945, dan termaktub dalam alinea ke 4 Pembukaan UUD 45,” tambahnya.

“Jadi, keterbukaan, kebersamaan, keberanian berpendapat, menerima pendapat, berdialog secara dewasa, mencari dan menyepakati maslahat terbesar bagi bangsa dan negara, itulah yang menjadi keteladanan dan kenegarawan yang diwariskan Bapak & Ibu Bangsa dan menjadi solusi atas berbagai masalah bangsa,” tegasnya.

HNW lebih lanjut mencontohkan banyak peristiwa bisa tersolusikan berkat adanya faktor di atas, seperti kembalinya bentuk negara ke NKRI. “Ketua Fraksi Islam Masyumi di Parlemen, Mohammad Natsir, dengan dukungan dari kelompok Katolik, Kristen, dan yang lainnya, berjasa mengembalikan bentuk negara dari RIS ke NKRI, sesuai cita-cita Indonesia Merdeka,” ujar pria asal Jawa Tengah itu.

Karenanya, HNW berkesimpulan dan berharap agar keberagaman agama tidak membuat bangsa ini pecah atau terpisah, namun justru bisa makin kuat dan bersatu padu. “Agama yang menjadi Sila Pertama Pancasila dan ketentuan UUD 45, menjadi solusi masalah bangsa dan bukan sebaliknya,” pungkasnya, yang disambut sangat antusias oleh ratusan peserta Sosialisasi dari Center Kristen Indonesia. □



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

gagasan dasar negara yang terdiri dari lima sila, yaitu: Kebangsaan, Kemanusiaan, Demokrasi, Keadilan Sosial, dan Ketuhanan.

Anggota BPUPK yang berasal dari latar golongan Islam menghendaki atau mengusulkan dengan pendekatan yang demokratis. Dengan didasari bahwa bangsa ini mayoritas penduduknya beragama Islam maka golongan Islam mengusulkan agar Islam menjadi dasar negara.

Dua usulan yang mengemuka waktu itu adalah kebangsaan dan Islam tidak membuat rapat BPUPK mengalami deaclock, tidak saling menegasikan atau saling memusuhi. Untuk mencari titik temu maka dibentuklah panitia khusus. Dr. Radjiman W sebagai Ketua

Soebardjo. Sedang dari kalangan nasionalis agama adalah Alexander Andries (AA) Maramis, Abikoeso Tjokrosoejoso, Abdoel Kahar Moezakir, Agus Salim, dan Kiai Haji Abdul Wahid Hasjim. “Lima dari kelompok nasionalis agama, empat Muslim, satu kristiani yakni AA Maramis”, ungkap HNW.

HNW dengan tegas mengatakan, dirinya tidak menggunakan istilah kelompok nasionalis dan agama sebab hal demikian akan menimbulkan kesalahan di pikiran orang. Bila menggunakan istilah itu seolah-olah yang nasionalis tidak beragama, yang beragama tidak nasionalis. “Itu pendapat yang tidak tepat,” paparnya.

Meski berbeda golongan dan agama, akhirnya Panitia 9 menyepakati Pancasila sebagai dasar negara. Meski sudah sepakat

Pelepasan Da'i Nusantara Tepian Negeri 2024

HNW Berpesan Agar para Da'i Bersemangat Menyebarkan Kebaikan dan Tak Takut Melakukan Ijtihad



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

DI GEDUNG Nusantara V, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/7/2024), berlangsung acara Pelepasan Da'i Nusantara Tepian Negeri 2024. Acara pelepasan itu dihadiri oleh Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid (HNW). Sebanyak 49 da'i lulusan Mahad Aly An-Nuaimy angkatan 18, lima belas orang di antaranya hafidz (penghapal Alquran), ditempatkan di berbagai kabupaten dan kota dari Aceh hingga Papua untuk masa khidmat 2024-2025.

Kepada para da'i tersebut, HNW berpesan, agar para da'i dalam menyebar kebaikan dengan penuh semangat, dan jangan takut melakukan ijtihad. "Ijtihad penting saya tekankan, sebab di era sekarang, zamannya era modernisasi internet apalagi pasca Pandemi Covid, terlalu banyak berbagai permasalahan bermunculan," ujar HNW. Politisi PKS ini menunjuk contoh masalah dekadensi moral dan darurat pornografi yang terjadi di kalangan generasi muda. Karena itulah, menurut HNW, sangat diperlukan ijtihad yang kuat, tapi jangan berlebihan. "Ijtihad akan membuat Anda mudah melakukan terobosan-terobosan dalam konteks mewujudkan Islam yang

membawa kebaikan ke seluruh negeri," ujar Pimpinan MPR dari Fraksi PKS ini.

Dalam kesempatan tersebut, HNW juga mengingatkan para da'i bahwa ada beberapa hal penting perlu disegarkan kembali dalam ingatan kita semua. Yakni, jangan sekali-kali melupakan sejarah atau Jas Merah, Jangan sekali-kali menghilangkan jasanya para ulama atau Jas Hijau, dan paling terbaru Jas Hitam atau Jangan sekali-kali menghilangkan posisi strategis dari para mubaligh.

HNW punya alasan kenapa hal seperti itu

perlu disampaikan dan disegarkan kembali. Sebab, katanya, kita harus mengimplementasikan apa yang ditegaskan Alquran 'Wa zakkir fa innaz-zikra tanfa'ul-mu'miniin.' Selain itu, karena banyak upaya untuk mengaburkan sejarah dan relasi antara dakwah kita, tabligh kita dengan Indonesia kita. "Seolah-olah Indonesia ini steril dan tidak ada hubungannya dengan dakwah, tidak ada hubungannya dengan mubaligh, dengan ulama, dengan peran umat Islam, dan dengan partai-partai Islam. Seolah-olah



Indonesia ini turun dari langit dan jadilah Indonesia,” terang HNW. Padahal, katanya, peran Islam sangat luar biasa.

Lebih lanjut, HNW menegaskan kembali bahwa sangat penting buat para da’i, mubaligh, dan kita semua untuk memahami, dalam konteks Islam kita dan Indonesia kita, ada satu kondisi kesatuan dan sinergitas yang kuat. Tidak ada satu barrier atau pemisah, apalagi dikotomi yang membuat kita antipati terhadap negeri di mana kita berada. Justru ketika Indonesia sedang tidak baik-baik saja, bahkan ibu pertiwi sedang menangis, justru semakin penting umat Islam dengan para da’i-nya untuk maju ke depan melanjutkan peran mensejarah dari para da’i dan para tokoh Islam dalam menyelamatkan Indonesia,” ucapnya.

HNW memberikan sebuah ilustrasi

sejarah. Kalau tidak ada peran dari tokoh Islam, seperti KH. Hasyim Asy’ari dengan Resolusi Jihad-nya, atau tegasnya tanpa melalui fatwa jihad-nya tentu akan mempersulit bangsa Indonesia dalam upaya memperoleh kemerdekaan. Begitu pula kalau tidak ada peran dari para tokoh Islam lainnya, seperti Ki Bagus Hadikusumo (Ketua PP Muhammadiyah pada waktu itu), Mr. Kasman Singodimejo, Mr. Mohammad Hasan, dan juga KH. Wahid Hasyim, terkait kejadian bersejarah pada tanggal 18 Agustus 1945 seputar rancangan Mukaddimah UUD 1945 entah bagaimana pula masa depan Indonesia. Serta bagaimana nasib Indonesia tanpa mosi integral-nya Mohammad Natsir. Bisa jadi tidak ada lagi NKRI,” katanya.

Hal-hal seperti itu, lanjut HNW, sering dilupakan. Padahal, itu semua adalah fakta

sejarah. “Sekali lagi saya harapkan, ikrar para da’i yang sudah dibacakan tadi, mudah-mudahan akan menjadi simpul untuk menguatkan kembali antara ke-Islaman kita, dakwah kita dengan ke-Indonesiaan kita,” tandasnya.

Acara Pelepasan Dai Nusantara juga dihadiri Sekretaris Yayasan An-Nuaimy, Mustafa Kamal, Direktur Mahad Aly An-Nuaimy, Itang Rusmana, beserta jajaran manajemen, segenap pengurus, dewan guru, para donatur, juga para alim ulama serta para tokoh masyarakat.

Sebagai informasi, hingga tahun 2024, Mahad Aly An-Nuaimy, telah menempatkan sekitar 861 da’i tersebar di seluruh penjuru Indonesia. Dari jumlah itu, sebanyak 208 dai hafiz Qur’an. □

DER

Sarasehan Kehumasan MPR RI

MPR Perlu Kolaborasi dengan Perguruan Tinggi untuk Peningkatan Komunikasi Publik MPR

MAJELIS Permusyawaratan Rakyat (MPR) bekerjasama dengan Universitas Triatma Mulya, Bali, menggelar Sarasehan Kehumasan MPR RI, Menyapa Sahabat Kebangsaan, dengan tema: “Peran MPR RI dan Perguruan Tinggi dalam Meningkatkan Komunikasi Publik”. Dalam sarasehan ini, Kepala Biro Humas dan Sistem Informasi Setjen MPR, Anies Mayangsari Muninggar, SIP., ME., mengungkapkan, pada era informasi digital ini kerjasama dan kolaborasi dengan perguruan tinggi menjadi penting.

“Pentingnya komunikasi publik karena peran Humas adalah untuk mengomunikasikan berbagai informasi ataupun kinerja dari Pimpinan MPR, kelembagaan MPR, maupun Kesekjenan MPR,” katanya dalam Sarasehan Kehumasan MPR RI Menyapa Sahabat Kebangsaan di Universitas Triatma Mulya, Bali, Selasa (2/7/2024).

Sarasehan Kehumasan MPR ini dihadiri Rektor Universitas Triatma Mulya, Dr. I Ketut Putra Suarhana, MM.; Wakil Rektor I Dr. Ni Luh Putu Agustini K, SE., MM.; Wakil Rektor III Dr. I Ketut Sutapa, MM.; Dekan Fakultas Pariwisata Nengah Subadra, SS., M.Par.,



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Ph.D.; dan mahasiswa Universitas Triatma Mulya.

Dalam kesempatan ini dilakukan penandatanganan kerjasama antara Setjen MPR RI dan Universitas Triatma Mulya yang ditandatangani oleh Kepala Biro Humas dan Sistem Informasi MPR dan Rektor Universi-

tas Triatma Mulya.

Anies menyatakan bahwa Biro Humas dan Sistem Informasi MPR ingin mendapat masukan dari perguruan tinggi mengenai komunikasi publik yang harus dilakukan lembaga parlemen, khususnya MPR. “Sebagai sistem pendukung kelembagaan



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

MPR, Sekretariat Jenderal MPR perlu meningkatkan komunikasi publik,” ujarnya.

Anies menambahkan, Pimpinan MPR periode 2019-2024 akan berganti dengan Pimpinan MPR periode 2024-2029 pada awal Oktober 2024. Setiap periode Pimpinan MPR mempunyai kehendak dan tuntutan yang berbeda dengan Pimpinan MPR periode sebelumnya. “Termasuk soal bentuk komunikasi publik untuk meningkatkan citra positif bagi kelembagaan MPR RI. Agar MPR lebih dekat lagi dengan masyarakat, dan MPR memiliki citra yang lebih baik lagi di mata masyarakat,” katanya.

Ketika menjadi narasumber dalam Sarasehan Kehumasan ini, Anies juga mengungkapkan, Biro Humas dan Sistem Informasi MPR mempunyai program-program yang kemudian bisa lebih mendekati kelembagaan MPR dengan masyarakat dan memberikan citra positif kelembagaan MPR. “Sehingga perlu kolaborasi Sekretariat Jenderal MPR RI bersama perguruan tinggi sangat penting. Karena masukan dari perguruan tinggi bisa meningkatkan komunikasi publik MPR RI kepada masyarakat,” jelasnya.

Untuk penguatan komunikasi publik, lanjut

Anies, MPR telah membuat strategi komunikasi seperti melalui media sosial (*Youtube, facebook, instagram, twitter, dan TikTok*). “Kami perlu mendapat masukan mengenai komunikasi publik yang tepat melalui media sosial sehingga bisa menjangkau kalangan milenial. Kami masih mencari formulasi yang tepat komunikasi publik yang tepat untuk kalangan milenial,” imbuhnya.

Anies menjelaskan, beberapa implementasi komunikasi publik yang sudah dilakukan MPR, yaitu survei kepuasan masyarakat tentang kinerja MPR, penerimaan kunjungan delegasi (sekolah dan universitas) ke MPR, layanan PPID, pelaksanaan Forum Komunikasi Publik dan Sarasehan Kehumasan, website mpr.go.id, dan media sosial.

Sementara Wakil Rektor III Dr. I Ketut Sutapa, MM., juga selaku narasumber dalam sarasehan tersebut, menguraikan tentang peran perguruan tinggi untuk meningkatkan komunikasi publik. Menurut Ketut Sutapa, perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam meningkatkan komunikasi publik, yaitu membangun citra positif, meningkatkan keterlibatan masyarakat, dan memperkuat hubungan dengan pemangku kepentingan.

“Peran perguruan tinggi untuk meningkatkan komunikasi publik, antara lain melalui pendidikan dan pelatihan, keterlibatan masyarakat, fasilitas, dan sumber daya, seminar dan workshop,” katanya. □



Seminar Perpustakaan

Anies Mayangsari Muninggar: Mempersiapkan Pustakawan Menyongsong Masa Depan

RATUSAN mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara (FIBUSU) pada Jumat, 12 Juli 2024, memenuhi Gedung Serbaguna Prof. H.T.Amin Ridwan, Ph.D., Komplek Kampus USU, Jl. Universitas No.19, Medan, Sumatra Utara. Kehadiran para mahasiswa di gedung yang direnovasi pada tahun 2007 itu adalah dalam rangka mengikuti Seminar Perpustakaan yang diselenggarakan oleh Perpustakaan Setjen MPR RI bekerjasama dengan Fakultas Ilmu Budaya USU.

Dengan mengambil tema: 'Artificial Intelligence (AI) Sebagai Teknologi Pengelolaan Pengetahuan untuk Perpustakaan Masa Depan: Tantangan Atau Ancaman Bagi Pustakawan,' seminar yang dimulai pukul 09.00 WIB itu dihadiri oleh Kepala Biro Humas dan Sistem Informasi Setjen MPR, Anies Mayangsari Muninggar, S.Ip., M.E; Pustakawan Madya Perpustakaan MPR, Yusniar, S.H.; dan Pustakawan Perpustakaan MPR. Sedangkan dari pihak tuan rumah hadir Dekan FIBUSU Prof. Dr. Dra. T. Thyrhaya Zein, M.A.; Wakil Dekan III FIBUSU Mhd. Pujiono S.S., M.Hum., Ph.D.; serta para dosen dan para mahasiswa FIBUSU.

Kepala Biro Humas dan Sistem Informasi Setjen MPR, Anies Mayangsari Muninggar,



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

dalam leporannya mengatakan, perpustakaan merupakan jembatan untuk menguasai ilmu pengetahuan. Perpustakaan juga merupakan sarana untuk dapat meningkatkan akses informasi. Untuk lebih meningkatkan fungsi perpustakaan di masa depan maka Perpustakaan MPR— yang dalam kesempatan ini bekerja dengan FIBUSU— menggelar seminar di kampus tertua di Sumatra Utara itu.

“Bagi kami, seminar ini sangat penting. Karena untuk menyongsong masa yang

akan datang, sumber daya pustakawan perlu ditingkatkan,” tegas Anies Mayangsari. Untuk itu, dia berharap, melalui seminar ini, Perpustakaan MPR khususnya mendapat masukan dari akademisi, pustakawan, dan pakar teknologi IT terkait hadirnya AI.

Masukan dari mereka menjadi bekal Perpustakaan MPR untuk merespon bagaimana seharusnya perpustakaan ketika harus berhadapan dengan teknologi yang semakin maju dan canggih, khususnya teknologi AI. “Kira-kira apa sih tantangan





FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

yang akan kami hadapi dan solusi yang bagaimana mesti dilakukan dalam menghadapi tantangan dan ancaman yang ada,” ujarnya.

Hadirnya teknologi AI dalam perpustakaan, menurut Anies Mayangsari, sulit dihindari dan mau tak mau harus dihadapi. “Bila menghadapi kedua hal tersebut maka yang perlu ditingkatkan adalah perpustakaan, baik kompetensi pustakawan maupun sarana dan prasarana yang dimiliki,” ujarnya.

Selanjutnya, Anies juga menjelaskan tentang kompleks Parlemen di Senayan, Jakarta. Di Komplek Parlemen, terdapat tiga lembaga negara, yakni: MPR, DPR, dan DPD. Masing-masing lembaga negara mempunyai perpustakaan. Dari seminar inilah Anies Mayansari yakin, kegiatan itu sangat

bermanfaat untuk menjadikan Perpustakaan MPR sebagai salah satu sumber informasi dan data bagi masyarakat untuk mengetahui tentang sistem ketatanegaraan dan konstitusi.

Ketika Perpustakaan MPR menjadi sumber informasi dan data maka mahasiswa dari berbagai tingkatan bila hendak melakukan penelitian dan kajian, dapat menjadikan Perpustakaan MPR menjadi salah satu sumber data dan informasi untuk mengkaji sistem ketatanegaraan dan konstitusi.

Anies juga berharap, dengan adanya seminar ini dapat meningkatkan minat baca masyarakat, terutama bagi mahasiswa yang semangat belajarnya masih tinggi. “Semangat belajar yang tinggi dan diiringi

dengan minat baca mampu membuat langkah ke depan yang lebih sukses,” tegasnya.

Kegiatan yang dilakukan hari itu tidak sebatas seminar, namun juga ada acara penandatanganan kerjasama antara FIBUSU dan Perpustakaan MPR. Dengan adanya kerjasama ini, diharapkan dapat memperluas jaringan akademisi dan kolaborasi penelitian, serta pengembangan sumber daya yang profesional. “Kerja sama untuk meningkatkan peran perpustakaan guna membuka akses yang lebih luas bagi civitas akademika dan masyarakat,” tuturnya.

Kepada civitas akademika FIBUSU, Anies mengharapkan, bagi yang ingin mendapatkan informasi data ataupun buku terkait Ketetapan MPR dan risalah, dipersilahkan datang ke Perpustakaan MPR. “Silahkan datang ke Perpustakaan MPR secara langsung atau bisa melalui online lewat perpus.mpr.go.id,” ungkapnya.

Lebih lanjut disampaikan, jika ingin mengakses buku digital MPR silahkan mengakses melalui handphone android, sudah ada aplikasi playstore MPR Digital Library. “Bapak, Ibu, dan mahasiswa silahkan mengakses di sini,” tuturnya. “Bila ingin mengakses tulisan-tulisan MPR bisa mengakses di mprdigitallibrary.moco.co.id.

Sementara itu Prof. Thyrhaya Zein dalam sambutannya mengatakan, AI merupakan bidang ilmu pengetahuan yang memungkinkan komputer untuk meniru pikiran manusia. Kemajuan zaman membuat manusia tidak bisa lepas dari AI. “Dengan adanya Teknologi AI justru membantu kita. Jadi, tinggal bagaimana caranya menggunakannya,” tuturnya.

Untuk itu, kata Prof. Thyrhaya Zein, manusia harus menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Teknologi ini harus bisa dimanfaatkan dalam berbagai keperluan, seperti menganalisa data penelitian, penyusunan laporan, dan membantu dalam pengelolaan perpustakaan. “Oleh karena itu belajar dan memahami AI suatu keharusan bagi pustakawan dan mahasiswa,” tegasnya.

Dia juga berharap, kerja sama antara Perpustakaan MPR dan FIBUSU ini ditindaklanjuti dengan program-program lain yang menasar pada Tri Darma Perguruan Tinggi. □



Syarief Hasan Dorong Badan Kehormatan MPR Segera Dibentuk



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

WAKIL Ketua MPR Sjarifuddin Hasan mendorong MPR untuk segera membentuk Badan Kehormatan atau Majelis Etik MPR. Badan Kehormatan atau Majelis Etik MPR perlu dibentuk untuk mengadili pimpinan atau anggota MPR jika melakukan pelanggaran etik ketika menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai anggota MPR.

“Memang sebaiknya MPR segera membentuk Badan Kehormatan MPR atau Majelis Etik MPR,” kata Syarif Hasan usai bersama Presiden Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono menyaksikan pertandingan bola voli antara Jakarta LavAni Allo Bank melawan Jakarta STIN BIN di GOR Jatidiri, Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (13/7/2024).

Syarief Hasan mengungkapkan, pembentukan Badan Kehormatan MPR ini menjadi salah satu bahasan dalam Rapat Gabungan (Ragab) antara Pimpinan MPR dengan pimpinan fraksi dan kelompok DPD beberapa waktu lalu. “Dalam Rapat Gabungan itu ada aspirasi untuk segera merealisasikan pembentukan Badan Kehormatan MPR,” tutur Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Demokrat ini.

Menurut Syarif Hasan, Badan Kehormatan MPR ini tetap diperlukan meskipun sudah ada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) di DPR atau Badan Kehormatan di DPD. Sebab, MPR mempunyai tugas dan kewenangan yang berbeda dengan DPR dan DPD. “Kewenangan, fungsi, dan tugas anggota MPR berbeda dengan

kewenangan dan tugas anggota DPR atau anggota DPD, sehingga Badan Kehormatan MPR tetap diperlukan,” jelasnya.

Syarief Hasan memberi contoh ketika Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) memberikan sanksi ringan berupa teguran tertulis kepada Ketua MPR Bambang Soesatyo. “Seseorang yang sedang menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai anggota MPR tetapi diadili lembaga negara lain (DPR). Padahal kedua lembaga itu, MPR dan DPR, masing-masing mempunyai kewenangan, tugas, dan fungsi yang berbeda. Sehingga kalau ada pengaduan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai anggota MPR maka diselesaikan Badan Kehormatan MPR, bukan lembaga lain. Jadi, saya kira Badan Kehormatan MPR ini diperlukan,” terangnya.

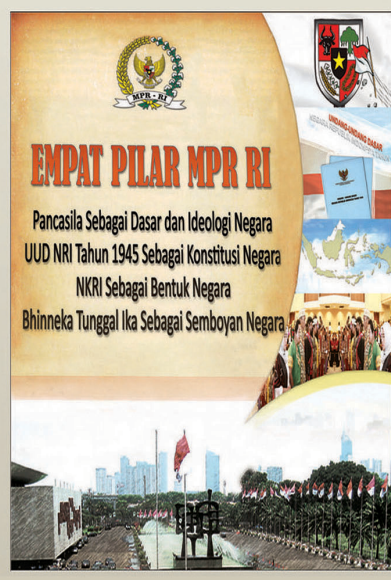
Dia berharap Badan Kehormatan MPR atau Majelis Etik MPR ini bisa terbentuk pada MPR periode ini (2019-2024). “Pembentukan Badan Kehormatan MPR ini masih memerlukan pembahasan mendalam, sedangkan MPR periode ini (2019-2024) masih punya waktu beberapa bulan lagi. Mudah-mudahan bisa segera direalisasikan pada MPR periode ini,” katanya.

Pembentukan Badan Kehormatan MPR atau Majelis Etik MPR ini bisa dimasukkan dalam perubahan Tata Tertib MPR. Maka, selain badan kelengkapan MPR seperti Pimpinan MPR, Badan Sosialisasi, Badan Pengkajian, dan Badan Anggaran, ada juga Badan Kehormatan MPR. □



Implementasi Sila-sila Pancasila

-  - Berhenti saling menyakiti, mulailah saling menghargai
- Berhenti saling merendahkan, mulailah menghormati perbedaan
- Berhenti takabur, mulailah bersyukur
-  - Stop marah-marah, mulailah bersikap ramah
- Berhenti memaki, mulailah memakai hati
- Berhenti curiga, mulailah menyapa.
-  - Berhenti berseteru, mulailah bersatu
- Berhenti memaksakan, mulailah berkorban
- Berhenti mencari perbedaan, mulailah bergandeng tangan
-  - Berhenti silang pendapat, mulailah mencari muafakat
- Berhenti besar kepala, mulailah berlapang dada
- Berhentilah bersilat lidah, mulailah bermusyawarah
-  - Berhenti malas, mulailah bekerja keras
- Stop diskriminasi, mulailah toleransi
- Berhenti menang sendiri, mulailah berbagi



MPR Terima WTP ke-15 untuk LHP tahun 2023



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

PELAKSANA tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal MPR RI Siti Fauziah, SE., MM., menerima sertifikat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tahun 2023 dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI. Penyerahan sertifikat WTP dilakukan oleh Kepala Auditorat IIIA BPK dalam suatu acara di Ruang Rapat Setjen MPR, Gedung Nusantara III, Lantai 5, Komplek MPR/DPR RI Senayan, Jakarta, Rabu (17/7/2024).

Bagi Setjen MPR RI, perolehan predikat WTP

dari LHP tahun 2023 ini merupakan capaian WTP ke-15 secara berturut-turut. Prestasi tersebut, menurut Siti Fauziah, terasa sangat manis, karena catatan yang diberikan oleh BPK terhadap LHP 2023 mengalami penurunan dibanding tahun-tahun sebelumnya. "Itu membuktikan kinerja Setjen MPR semakin membaik," katanya.

"Catatan-catatan yang diberikan BPK itu lebih banyak berupa masalah administrasi. Sebagian aset MPR yang ditanyakan belum ditemukan letak penyimpanannya. Dan, itu masih diupayakan pencariannya, karena

memang tidak hilang, tetapi belum ditemukan, atau belum diketahui disimpan di mana," ungkap Siti Fauziah.

"Memang, masih banyak PR, khususnya masalah administrasi. Tetapi, sekali lagi, bukan karena hilang apalagi disalahgunakan. Catatan dari BPK itu muncul, karena kita memang harus memperbaiki sistem administrasi yang kita miliki," kata Bu Titi.

Ke depan, Siti Fauziah berharap, seluruh jajaran bisa melaksanakan segala tugas dengan baik, agar capaian yang didapat tahun ini bisa ditingkatkan. □



Forum Konsultasi Publik di Bogor

Siti Fauziah menegaskan, Setjen MPR Tidak Anti Kritik

PELAKSANA tugas Sekretaris Jenderal MPR RI, Siti Fauziah SE., MM., menegaskan, pihaknya tidak anti kritik. Sebaliknya, Sekretariat Jenderal MPR selalu terbuka terhadap kritik. Terlebih kritik atau masukan yang sifatnya, bertujuan memperbaiki pelayanan publik.

Bu Titi, sapaan Siti Fauziah, menyatakan hal itu ketika membuka Forum Konsultasi Publik (FKP) MPR RI, di Universitas Djuanda Bogor, Kamis (18/7/2024). FKP yang diselenggarakan oleh MPR bekerjasama dengan Universitas Djuanda Bogor itu membahas tema: 'Peran Humas Dalam Peningkatan Pelayanan Publik Melalui Penerimaan Delegasi dan Keterbukaan Informasi melalui Website.'

Dalam FKP tersebut tampil tiga narasumber, yaitu: Anies Mayangsari Muningsari, S.I.P., ME., (Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi MPR RI), Wafiestrietman Corris, ST., MTI., (Kepala Sub Bagian Sistem Informasi MPR RI), dan Dr. Sapridin, S.Sos., M.Si.

Lebih lanjut, Siti Fauziah menyatakan, bagi Sekretariat Jenderal MPR, kritik dan masukan ibarat obat. Bisa jadi kritik itu terasa pahit, tetapi di balik itu terkandung unsur yang membuat Kesetjengan MPR semakin sehat dan kuat. Karena itu, dia berharap, dengan banyaknya kritik akan berdampak positif



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

terhadap Setjen MPR, yaitu meningkatkan kualitas kinerja lembaga MPR.

"Kami legowo terhadap semua masukan. Apalagi masukan yang sifatnya memperbaiki dan mengantisipasi agar tidak ada kesalahan lagi. Kami juga sadar membutuhkan banyak masukan dari semua pihak untuk perbaikan kinerja kami di masa depan," kata Siti Fauziah.

Oleh karena itu, menurut Bu Titi, untuk mendapat kritik dan masukan yang baik,

pihaknya rela menjemput bola, turun ke masyarakat, khususnya di dunia kampus. Harapannya, agar kritik yang diterima lebih berkualitas, bisa menutupi kekurangan yang masih ada pada Setjen MPR.

"Kami sudah banyak mendapat pandangan dan masukan dari kampus, tetapi kami belum puas. Kami akan terus menjangkau lebih banyak perguruan tinggi lagi, dan membuka diri untuk dikritik," tegas Bu Titi. □





FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Dr. Ir. H.E. Herman Khaeron, M.Si., Anggota MPR Fraksi Partai Demokrat

DPR Membuka Ruang Masukan dan Pandangan dalam Pembahasan Revisi UU tentang Wantimpres

RAPAT Paripurna DPR RI Ke-22 Penutupan Masa Persidangan V Tahun 2023-2024 pada Kamis, 11 Juli 2014, menyetujui Revisi UU No. 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden atau UU Wantimpres menjadi RUU usul inisiatif DPR RI. Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus. “Dapat disetujui menjadi Rancangan Undang-Undang usul inisiatif DPR RI?” tanya Lodewijk yang disambut jawaban setuju oleh para anggota DPR RI yang menghadiri rapat paripurna.

Sebelumnya sembilan fraksi DPR menyetujui Revisi UU No. 19 Tahun 2006 itu menjadi usul inisiatif DPR dalam rapat pleno atau pengambilan keputusan yang digelar Badan Legislatif DPR pada Selasa, 9 Juli 2024. Penyusunan revisi UU Wantimpres hanya membutuhkan waktu satu hari di Baleg dan langsung dibawa ke paripurna.

Ada tiga poin perubahan dalam RUU Wantimpres. Pertama, perubahan nomenklatur dari Wantimpres menjadi DPA. Namun, fungsi kelembagaan dewan pertimbangan itu tidak berubah. Kedua, jumlah anggota DPA menjadi tidak terbatas (dari sebelumnya hanya 8 orang) dan

menyesuaikan kebutuhan presiden. Ketiga, perubahan syarat menjadi anggota DPA.

Dalam revisi itu, anggota DPA boleh merangkap sebagai pengurus partai politik, pemimpin ormas, lembaga swadaya masyarakat, yayasan, BUMN, atau swasta, dan pejabat struktural di perguruan tinggi. Selain itu, ada perubahan lain, yaitu menjadikan DPA sebagai lembaga negara sejajar dengan lembaga negara lainnya.

Revisi UU No. 19 Tahun 2006 tentang Wantimpres yang mengubah nomenklatur Wantimpres menjadi DPA ini menimbulkan polemik di masyarakat. Untuk mengetahui lebih jauh soal revisi ini, berikut penuturan anggota MPR Fraksi Partai Demokrat yang juga anggota Baleg DPR RI, Herman Khaeron. Petikannya.

DPR menyetujui Revisi UU No. 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden atau UU Wantimpres menjadi RUU usul inisiatif DPR RI. Salah satu revisi UU itu adalah mengubah nomenklatur Wantimpres menjadi DPA. Apa sebenarnya urgensi melakukan revisi UU tentang Wantimpres ini?

Wantimpres yang nomenklaturnya diubah

menjadi DPA ini harus menjadi lembaga agung, karena memberi nasihat kepada jabatan tertinggi, yaitu kepala pemerintahan atau kepala negara. Karena itu, lembaga yang memberi nasihat harus lembaga yang agung. Kedua, keanggotaan DPA ini harus sesuai dengan kebutuhan presiden. Di negeri ini banyak tokoh dan orang-orang yang mampu memberikan nasihat dan pertimbangan sehingga keanggotaan DPA jangan dibatasi. Sebelumnya, keanggotaan Wantimpres dibatasi hanya delapan orang. Makanya, sekarang keanggotaan DPA disesuaikan dengan kebutuhan presiden. Hanya itu urgensi perubahan UU ini. Selebihnya fungsi dan tugas Wantimpres yang nomenklaturnya diubah menjadi DPA tetap sama.

Sebelumnya revisi UU No. 19 Tahun 2006 ini tidak masuk dalam Prolegnas prioritas, dan revisi UU ini disepakati fraksi-fraksi sebagai usul inisiatif DPR dalam waktu yang relatif cepat. Bisa dijelaskan?

Untuk pembentukan sebuah perundang-undangan itu ada undang-undangnya sehingga ada tahapan-tahapan untuk membuat undang-undang. Apakah

rancangan UU yang tidak masuk Prolegnas prioritas bisa dibahas di DPR? Hal itu bisa dilakukan, karena UU itu memang dibutuhkan oleh negara, dan DPR setuju, kemudian dibahas bersama dengan Menkumham. Dalam setiap perjalanan tahunan pelaksanaan Prolegnas prioritas ada evaluasi. Terpenting adalah pemerintah dan DPR setuju, maka rancangan atau revisi UU yang sebelumnya tidak masuk dalam Prolegnas prioritas bisa dimasukkan dalam Prolegnas prioritas.

Mengapa persetujuan revisi UU tentang Wantimpres menjadi UU usul inisiatif DPR tidak membutuhkan waktu lama? Karena, memang perubahan atau revisi UU Wantimpres itu hanya menyangkut tiga hal saja. Pertama, perubahan nomenklatur dari Wantimpres menjadi DPA. Tetapi fungsi dan tugasnya tetap sama, yaitu memberikan pertimbangan atau nasihat kepada presiden. Kedua, keanggotaannya disesuaikan dengan kebutuhan presiden. Ketiga, kelembagaannya menjadi lembaga negara. Jadi, perubahannya hanya tiga hal itu. Selebihnya, semua pasal-pasal sama dengan UU No 19 Tahun 2006.

Rapat paripurna DPR telah memutuskan revisi UU tentang Wantimpres ini menjadi usul inisiatif DPR, maka sekarang tergantung pada pemerintah, bagaimana pemerintah merespon terhadap UU usul inisiatif DPR ini.

Sekali lagi revisi UU Wantimpres ini masih menjadi RUU inisiatif DPR dan karenanya sangat bergantung kepada daftar inventarisasi masalah (DIM) dari pemerintah untuk kemudian dibahas nanti dalam pembahasan tingkat II, jika pemerintah sudah merespons dan mengirimkan Suspres-nya ke DPR.

Apakah revisi UU No. 19 Tahun 2016 tentang Wantimpres ini merupakan keinginan pemerintahan Presiden Joko Widodo atau presiden terpilih Prabowo Subianto? Mengapa bukan pemerintah yang mengusulkan revisi UU ini?

Usul inisiatif itu bisa datang dari pemerintah dan bisa juga dari DPR. Aspirasi untuk meminta revisi UU bisa dari mana-mana. Usul perubahan UU tentang Wantimpres ini datang dari berbagai pihak. Kami di Baleg menerima berbagai usulan itu. Ada usulan terkait perubahan nomenklatur Wantimpres, kita terima. Itulah yang kemudian dibahas di Baleg. Karena itu, Baleg DPR menampung aspirasi terhadap perubahan nomenklatur, aspirasi ini dibahas dan kemudian menjadi usul inisiatif dari DPR. Kalau kemudian revisi UU tentang Wantimpres ini sudah disetujui fraksi-fraksi maka berarti kami menganggap

sudah mewakili seluruh entitas.

Saya kira ini perubahan UU tentang Wantimpres ini adalah aspirasi dari berbagai pihak. Karena perubahan ini menyangkut institusi, maka juga berbicara tentang kepentingan orang banyak. Dan, tidak ada perubahan yang substansial dalam UU ini kecuali perubahan nomenklatur, dan perubahan terhadap jumlah keanggotaan. Saya kira ini memberikan keleluasaan kepada presiden untuk nanti menentukan siapa saja nanti yang akan memimpin dan menjadi anggota di DPA.

Banyak kalangan yang menilai perubahan atau revisi UU Wantimpres ini agar nanti DPA diisi mantan presiden atau mantan wakil presiden, seperti gagasan sebelumnya tentang Presidential Club. Apa pendapat Bapak?

Kalau ada pernyataan spekulasi seperti



itu silakan saja. Siapa saja boleh berpendapat, termasuk para pakar. Silakan saja. Sebenarnya tugas dan fungsi Wantimpres sama seperti yang sekarang dibuat dalam nomenklatur DPA. Hanya mengubah dua pasal yang krusial, yaitu tentang nomenklatur dan mengubah terhadap keanggotaan. Selebihnya sama seperti UU No. 19 tahun 2006.

Apakah DPA nantinya menjadi lembaga negara seperti lembaga negara lainnya. Artinya, seperti bentuk DPA pada masa Orde Baru? Bukankah lembaga DPA sudah dihapus dalam amendemen UUD 1945?

Iya, DPA nanti setingkat lembaga negara. Dan, memang benar DPA sudah dihapuskan dalam UUD karena sekarang tidak ada lembaga tinggi negara melainkan lembaga

negara. Karena itulah, pembentukan lembaga-lembaga baru yang setara diperbolehkan sepanjang itu menjadi kepentingan dan bisa berjalan efektif dalam mendukung tugas-tugas negara.

Revisi UU No. 19 tentang Wantimpres yang mengubah nomenklatur Wantimpres menjadi DPA telah menimbulkan polemik di masyarakat. Apa tanggapan Bapak?

Saya sampaikan bahwa revisi UU Wantimpres adalah usul inisiatif DPR yang disahkan di rapat paripurna DPR dan sudah dikirimkan kepada presiden. Ketika revisi UU sebagai usul inisiatif DPR masuk pada putusan paripurna tentu sudah disetujui semua fraksi dalam pengambilan keputusan di tingkat Baleg, karena Baleg sebagai pelaksana dari penyusunan undang-undang atau revisi UU tentang Wantimpres ini. Dan, kemudian nanti masih ada pembahasan. Kita tunggu saja DIM dari pemerintah nanti.

Dalam pembahasan nanti kami juga mengadakan jajak pendapat, dan terus menerima masukan dan pendapat dari berbagai pihak. Kita tunggu saja karena revisi UU tentang Wantimpres ini masih dalam tahap usul inisiatif. Kemudian nanti kita akan melihat bagaimana DIM (Daftar Inventaris Masalah) dari pemerintah.

Revisi UU Wantimpres ini adalah usul inisiatif DPR dan sudah diputuskan seluruh fraksi dalam rapat pengambilan keputusan di Baleg dan di rapat paripurna, kemudian draf revisi UU telah dikirim ke pemerintah untuk mendapatkan DIM dari pemerintah. Kami sekarang menunggu Surpres dari pemerintah, dan setelah itu tentu ada pembahasan. Kalau kemudian ada masukan-masukan dari ahli, praktisi, stakeholder, kami di DPR juga terbuka. Silakan nanti memberi masukan dan pandangan dalam pembahasan tingkat II.

Karena itu, menurut saya, daripada menjadi polemik di publik, DPR juga membuka ruang, membuka diskusi-diskusi publik, dan nanti pada akhirnya dalam pembahasan tingkat II dengan pemerintah, maka disitulah kita rembukan kembali.

Kalaupun masih ada yang keberatan dengan revisi UU ini masih banyak waktu yang nanti dipergunakan untuk bisa memberikan masukan-masukan. Apalagi sekarang dengan amendemen UUD NRI Tahun 1945, ada Mahkamah Konstitusi. Kalau seandainya UU ini dianggap menabrak UUD NRI Tahun 1945 misalnya, nanti revisi UU Wantimpres sudah ditetapkan menjadi UU dalam paripurna tingkat II, menurut saya masih ada ruang yang cukup untuk bisa mempersoalkan UU ini di MK. □



Susilo Bambang Yudhoyono

Akan Tampil pada Pagelaran Musik

Pestapora 2024



FOTO-FOTO: STIMEWA

PRESIDEN ke-6 Republik Indonesia, **Susilo Bambang Yudhoyono**, biasa disapa SBY, akan bernostalgia dengan kegemaran masa mudanya. Rencananya, SBY akan tampil sebagai salah satu artis mengisi pagelaran musik Pestapora 2024 di Jiexpo Kemayoran, Jakarta, pada 20-22 September 2024.

Pada masa mudanya SBY dikabarkan pernah membuat grup band, dan dia sendiri berperan sebagai pemain bas, selain vokalis.

Dalam web resmi *pestapora.com* diberitakan bahwa nama SBY

pada pesta musik tersebut masuk di line-up sejajar dengan para penyanyi ternama ibu kota, seperti Ungu, Voice of Baceprot, Tulus. Bersama komposer Tohpati, dalam konser itu, SBY akan ditampilkan di panggung utama pada hari pertama membawakan lima lagu.

“Saya didaulat para seniman dan musisi untuk ikut berkontribusi. Mereka mengharapkan saya membawakan lagu-lagu ciptaan saya yang sudah dinyanyikan oleh artis nasional,” kata SBY. □

DER

Raih RA Kartini Award 2024

DIA adalah dokter kecantikan dan juga seorang influencer. Namanya **dr. Reza Gladys**. Pada 28 Juni 2024 perembut hebat kelahiran Cianjur, Jawa Barat, 16 Desember 1998, yang memiliki lebih 1 juta follower ini, meraih 'RA. Kartini Award 2024' kategori Doctor Entrepreneur dalam suatu acara di Ritz-Carlton, Jakarta.

RA. Kartini Award adalah penghargaan untuk perempuan Indonesia yang sukses di bidang pemerintahan, ekonomi serta bisnis, pendidikan, teknologi, dan sosial budaya. Salah satu parameter sehingga dia dinilai layak menerima award adalah aktivitasnya sebagai seorang dokter dan influencer di media sosial yang menarik dan berdampak baik buat masyarakat,

Dokter Reza menyebut, prestasi dan penghargaan yang diraihinya selama ini adalah hasil jerih payahnya sendiri. Ia tak pernah menyenggol urusan maupun bisnis orang lain. "Saya meyakini berlari meraih bintang tanpa harus menabrak pelari lain. Kuncinya, fokus pada diri sendiri. Intinya, lakukan yang terbaik," katanya. □

DER



Reza Gladys



Harashta Haifa Zahra

Dinobatkan sebagai Miss Supranational 2024

MODEL dan aktivis lingkungan **Harashta Haifa Zahra** dinobatkan menjadi Miss Supranational 2024 edisi ke-15 dalam Grand Miss Supranational 2024 di Nowy S'cz, Polandia Kecil, Polandia, 6 Juli 2024. Puteri Indonesia 2024 kelahiran Garut, Jawa Barat, 5 September 2003, ini berhasil meraih gelar bergensi itu setelah menyisihkan perwakilan dari berbagai negara, termasuk Amerika Serikat, Republik Ceko, dan Brazil

Pada malam penobatan itu, Harashta yang akrab disapa Tata, mempersembahkan tari Jaipongan, dan memainkan alat musik kecapi, dan ternyata mendapat sambutan meriah dari audiens. "Banyak yang menyukai budaya Indonesia lho!...", ujar Tata dalam keterangan pers-nya di Pelataran GBK Jakarta, Kamis (18/7/2024).

Tata menyatakan, sebagai Miss Supranational, dia akan memperkenalkan kepada dunia tentang kekayaan budaya Indonesia yang beragam. "Saya juga akan memperkenalkan pariwisata di Indonesia yang indah-indah," ujarnya. □

DER



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Selebar Cinta di Malioboro pada Malam 1 Suro

*Pulang ke kotamu
Ada setangkep haru dalam rindu
Masih seperti dulu
Tiap sudut menyapaku bersahabat, penuh
selaksa makna*

*Terhanyut aku akan nostalgia
Saat kita sering luangkan waktu
Nikmati bersama
Suasana Jogja*

DUA BAIT tembang itu adalah bagian dari lirik lagu berjudul 'Yogyakarta.' Lagu tersebut digubah dan dipopulerkan oleh grup musik Kla Projct. Seperti Kla Project, lirik lagu yang mereka ciptakan itu juga sudah melegenda. Hebatnya, lagu berjudul Yogyakarta mampu membangkitkan ingatan akan keramahan Kota Gudeg.

Sebagai kota wisata, Jogja memang berbeda dengan kota-kota lainnya. Jogja memiliki banyak destinasi wisata yang tak akan pernah selesai orang untuk mengunjunginya. Salah satu legenda wisata di Kota Yogya adalah Jalan Malioboro, sebuah ruas jalan yang membelah Kota Yogya, membentang dari titik nol (perempatan

Kantor Pos) di ujung selatan hingga rel kereta di ujung utara.

Maliboro adalah salah satu destinasi wisata yang akan terus menempel dengan nama Yogyakarta. Keberadaannya ibarat dua sisi mata uang dengan Keraton Yogyakarta. Keduanya tak akan terpisahkan dan tiada mungkin terlupakan. Sehingga muncul perumpamaan, seseorang belum dapat dikatakan berkunjung ke Yogya jika belum menikmati eksotika Malioboro.

Malioboro termasuk nama satu dari tiga nama jalan yang berada pada poros Garis

Imajiner Keraton Yogyakarta. Ketiga ruas jalan tersebut terdiri dari: Jalan Margo Utomo (semula Jalan Pangeran Mangkubumi), Jalan Malioboro, dan Jalan Margo Mulyo (semula Jalan A. Yani). Secara mistis dipercayai, poros Garis Imajiner Keraton Yogyakarta ini menghubungkan Gunung Merapi-Keraton-Pantai Selatan.

Sebagai salah satu wajah Yogyakarta, gerak aktivitas di Malioboro selalu berubah mengikuti zaman dan kebutuhan. Dulu, kawasan Jalan Malioboro masyhur sebagai kawasan lapak kakilima dengan beraneka





FOTO-FOTO: ISTIMEWA

barang souvenir. Mulai dari baju, kaos, sandal, ikat pinggang, dompet, topi, hingga produk kerajinan tangan, memenuhi emperan toko yang membuat pejalan kaki haus bersusah melewati kawasan tersebut.

Setelah beranjak malam, atau setelah pukul 21.00 WIB, kawasan di sepanjang Malioboro berganti suasana. Pedagang souvenir menghilang berganti lapak-lapak kuliner. Beraneka macam kudapan tradisional khas Yogya diujakan secara lesehan di sana. Kuliner juga menjadi daya tarik para wisatawan yang berkunjung ke Yogya. Apalagi, di sana juga menjadi ladang mencari rezeki untuk para pengamen jalanan.

Kini kedua pemandangan yang menghiasi emper Malioboro (pedagang souvenir dan kuliner) sudah tidak ditemukan di kawasan itu. Para pedagang kini disediakan tempat tersendiri, yang di antaranya diberi nama Teras Malioboro. Jadi, meski deretan pedagang kakilima dan aneka kudapan tidak lagi terlihat jelas seperti dulu, tetapi daya tarik Malioboro tak berubah. Dia laksana selemba cinta yang setia dan tak akan musnah, meski ada banyak perubahan yang terjadi di sana.

Jadi, meski semua pedagang tergusur, tetapi mereka masih bisa mangais rezeki di kawasan itu tapi lokasinya berbeda. Bahkan,

selain teras Malioboro ada juga pasar sore dan swalayan, yang kesemuanya tak pernah sepi dari pengunjung. Bahkan, kondisi Malioboro kini memberi nafas bagi para pemilik toko untuk mendapatkan pembeli. Karena sebelum para pedagang kakilima dipindahkan, teras toko-toko mereka digunakan oleh para pedagang kakilima menjadi lapak dagangan mereka.

Teras Malioboro

Yang pasti, orang yang pernah berkunjung ke Malioboro, terbersit keinginannya untuk kembali ke sana satu saat nanti. Seperti juga dirasakan wartawan Majalah Majelis MPR. Tak ingin berlama-lama menahan rasa rindu, pada momen libur sekolah, tepatnya malam minggu berbarengan dengan malam 1 Suro kami menghabiskan waktu semalaman, untuk menyusuri kawasan Malioboro, mulai dari Tugu Yogyakarta hingga perempatan Kantor Pos.

Hasilnya sungguh mencengangkan. Di kawasan sepanjang 2,5 Km itu setidaknya terdapat empat pasar, dan itu membuat kami tercengang. Karena, dua buah Teras Malioboro, Pasar Sore, dan Pasar Modern kesemuanya penuh pengunjung, padahal saat itu jam pada gawai kami menunjuk pukul 24.00 WIB.

Lebih mencengangkan lagi, karena malam sudah selarut itu bukan hanya pasar yang

masih ramai, tetapi jalanan di sana masih penuh orang berlalu lalang. Imbasnya jalanan macet. Praktis puluhan ribu anggota masyarakat, baik lokal maupun pelancong, seolah tak ingin berpisah dengan suasana Malioboro.

Di malam yang sudah selarut itu kebisingan Malioboro tetap terjaga. Salah satunya berasal dari alunan musik serta lagu para seniman jalanan, yang tetap bersemangat untuk menghibur para pejalan kaki. Peluh di tubuh mereka sudah membasahi baju dan celana. Namun, mereka masih bernyanyi dengan riang gembira.

Di malam 1 Suro di Malioboro terus berlanjut hingga dinihari, di tengah hingar bingar tampak muda mudi yang saling berpasangan. Mereka tak mau berjauhan, mereka juga saling berjanji setia, untuk saling setia dan mencitai.

Begitulah kisah malam 1 Suro yang Majalah Majelis temui di Malioboro. Selain kemeriahan, Malioboro juga memiliki kisah mistik yang terus hidup di hati masyarakat Yogyakarta. Peralnya. itulah jalan sekaligus poros yang menghubungkan antara Keraton Yogyakarta, Gunung Merapi, dan Pantai Selatan. Jadi, yang pasti, Malioboro memberi makna buat mereka yang berkunjung ke Yogyakarta. □

MBO

Riyanta, SH

Dari Penjual Gethuk, Akhirnya *Berjuang di Gedung Parlemen*



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

RIYANTA, SH., adalah sosok yang kemudian memilih menjadi seorang politisi karena didorong oleh keinginannya untuk membantu rakyat yang lemah. Keinginannya itu, sebelum mengabdikan dirinya sebagai wakil rakyat di Senayan, diawali menjadi seorang advokat atau pengacara. Maka, sebagai seorang advokat, dia berkesempatan mendampingi rakyat kecil, terutama mereka yang tersangkut kasus hukum, terutama masalah pertanahan, perceraian, dan kasus lain.

Bukan hanya sebagai advokat, sosok yang kini terjun sebagai politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan ini membantu rakyat kecil dengan berkecimpung di organisasi sosial kemasyarakatan. Dia menjadi Ketua Umum Gerakan Anti Mafia Tanah, dan Ketua Umum Jalan Lurus yang dilakoni hingga kini. Selama melakukan pendampingan kepada rakyat kecil yang kurang mampu, misalnya untuk biaya operasional, kadangkala dia rela merogoh kocek pribadi.

Perhatiannya kepada rakyat kecil bahkan terus membara hingga saat ini, saat dia mengabdikan diri sebagai anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan. Ada satu hal yang sangat mengganggu pikirannya terkait nasib rakyat kecil yang menjadi perhatiannya, yakni tentang peristiwa yang menjadi hangat pasca Pilpres 2024 lalu. Hal yang dimaksud oleh Riyanta adalah soal program makan siang gratis untuk anak-anak Indonesia.

Belakangan, kata Riyanta, program makan siang gratis itu selalu berubah-ubah, terutama nominal makan siang gratis yang akan disalurkan, semula Rp 15.000 per anak lalu berubah menjadi Rp 7.500 per anak. Riyanta berpendapat, semestinya program untuk

rakyat kecil harus dipikirkan baik-baik agar rakyat tidak kecewa, karena merasa hanya dijanjikan tanpa realisasi.

“Program itu kan hanya janji-janji saat kampanye. Ya, jika terpilih maka harus dilaksanakan. Tapi, jika keuangan negara tidak memungkinkan, ya jangan dipaksakan, nanti rakyat kecewa. Apalagi, hanya Rp 7.500 dapat menu makanan apa, apa cuma air teh?,” katanya. Menurut Riyanta, seharusnya anggaran yang ada disesuaikan saja, misal untuk beli bibit untuk pertanian saja. Itu bermanfaat untuk rakyat, bisa dikonsumsi sendiri atau dijual.

Sejak Kecil Terbiasa Prihatin

Sensitivitasnya kepada penderitaan rakyat kecil memang imbas dari pengalaman masa kecil, dan didikan serta lingkungan tempat Riyanta dilahirkan dan dibesarkan. Pemilik nama lengkap Riyanta, SH., ini lahir dari pasangan Kariyo Utomo dan Hj. Kaminem di Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada 25 Mei 1960.

Riyanta kecil tumbuh sebagai anak desa yang terbiasa hidup prihatin. Riyanta teringat masa kecilnya, untuk membantu ekonomi keluarga, dia sempat berjualan gethuk di seputar alun-alun Kendal. Tapi, hal itu tidak membuatnya berkecil hati dan patah semangat dalam meraih cita-cita untuk kehidupan yang lebih baik. Yang paling diingatnya adalah ayahnya selalu berpesan untuk tetap memegang cita-cita setinggi langit dan selalu berupaya keras mewujudkannya.

“Saya waktu kecil itu juga sudah terbiasa makan tiwul. Ternyata, makanan yang dianggap remeh itu biasa saja menurut saya. Buktinya, sampai besar begini saya sehat-sehat saja, dan intelektualitas saya bagus saja,” katanya seraya tertawa.



Suami dari Nunung Haryati dan ayah tiga anak (Paramita Atika Putri, Beni Laksono dan Alfiya Jannata) ini mengenyam pendidikan dasarnya di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Ngijon 3, Sleman (lulus tahun 1974). Lalu, melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) Godean (lulus tahun 1977), kemudian melanjutkan Pendidikan Tamtama POLRI Gelombang II Tahun 1978/1979 di Banyubiru, Ambarawa, Jawa Tengah. Lalu, menamatkan sekolah lanjutan atas di SMA Paket C Parang Garuda (lulus 2006). Selepas itu, ia melanjutkan studi S1 Hukum di Universitas 17 Agustus 1945 Semarang (lulus tahun 2011).

Fokus Berwiraswasta

Pada awalnya, tak terbersit dalam pikiran Riyanta untuk menjadi seorang legislator tingkat pusat atau anggota DPR RI. Pilihan awalnya dalam berkarier adalah menjadi seorang anggota polisi. Untuk mewujudkan hal itu, ia kemudian mengikuti Pendidikan Tamtama POLRI Gelombang II Tahun 1978/1979 di Banyubiru, Ambarawa, Kabupaten Semarang.

Setelah lulus dan meraih pangkat Bharada, Riyanta bertugas di Polsek Winong, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Di saat bertugas sebagai anggota polisi inilah, Riyanta menemukan tambatan hatinya, seorang perempuan cantik bernama Nunung Haryati yang lalu

dinikahinya.

Pada tahun 1992, Riyanta mengeluarkan keputusan yang akan mengubah karier dan jalan hidupnya. Ia memutuskan keluar dari dinas kepolisian dengan pangkat terakhir Koptu (Kopral Satu), karena ingin menekuni bisnis. Riyanta ingin fokus mengembangkan perusahaan kecilnya, yang dia bangun pada tahun 1986 bernama UD. Rachmad Jati yang bergerak di bidang angkutan, kontraktor, dan bahan-bahan bangunan lainnya.

Dengah ketekunannya, usaha kecilnya terus berkembang. Riyanta pun kembali membangun sebuah usaha pada tahun 1990 berbendera CV. Mita Cipta Timber bergerak dalam bidang penggergajian kayu dan penjualan kayu di Jepara.

Kemudian, pada Tahun 1996, ia mendirikan PT. Wirastama Graha Mandiri bergerak dalam bidang Developer dan Kontraktor, serta Usaha Pelayaran Rakyat. Selang satu tahun kemudian dia juga mendirikan sebuah perusahaan yang diberi nama PT. Grafika Karya Mandiri, sebuah perusahaan bergerak dalam bidang Konsultan dan Kontraktor.

Legislator PDI Perjuangan Dapil Jawa Tengah III yang meliputi Kabupaten Pati, Rembang dan Blora serta Kabupaten Grobogan ini juga aktif berorganisasi, baik profesi maupun sosial, di antaranya sebagai Ketua Perhimpunan Pengrajin Kayu Sekitar Muria (1989-



2001), Ketua KADIN Kabupaten Pati (1999-Sekarang), Bendahara GAPENSI Kabupaten Pati (2001-2006). Ketua MAI Kabupaten Pati (2001-Sekarang).

Menjadi Wakil Rakyat

Sebagai alumni Fakultas Hukum Untag (2012), Riyanta menekuni profesi Pengacara. Sebagai Pengacara, Riyanta banyak membantu masyarakat yang punya permasalahan terkait sengketa lahan. Salah satu permasalahan klasik yang sering dialami oleh masyarakat adalah ketika berhubungan dengan para mafia tanah.

Pengalamannya sebagai seorang Pengacara dan pernah pula bertugas sebagai seorang anggota polisi ternyata kelak banyak berhubungan dengan tugas-tugasnya sebagai Anggota Komisi II DPR RI, terutama berhubungan langsung dengan isu pertanahan.

Dari hasil pemikiran dan perenungan, ternyata Riyanta ingin lebih memaksimalkan potensi dirinya untuk lebih membantu rakyat kecil dengan cakupan yang lebih luas, yakni dengan menjadi seorang politisi lalu menjadi wakil rakyat di Parlemen Pusat.

Riyanta kemudian memilih bergabung menjadi kader PDI-Perjuangan, partai yang dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri, puteri Bung Karno sang Proklamator Kemerdekaan Republik Indonesia sebagai awal memulai karir politiknya. Menjadi politisi, kata Riyanta,



adalah visinya untuk mengabdikan pada masyarakat dan negara.

“Saya ingin agar kita selalu menjaga dan memelihara kerukunan di semua lini kehidupan. Dengan hidup rukun, niscaya kita dapat terus bersatu dan bersama membangun bangsa ini lebih maju lagi,” ujarnya.

Pada kontestasi Pemilu Legislatif tahun 2019, Riyanta maju mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI Dapil Jateng III yang meliputi Kabupaten Grobogan, Kabupaten Pati, Kabupaten Blora, dan Kabupaten Rembang. Dia calon nomor urut dua, dalam Pemilu 2019, meraih suara sebanyak 36.570 suara, setelah Imam Suroso. Dan, yang terpilih dan dilantik sebagai anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan untuk periode 2019-2024 adalah Imam Suroso.

Namun, ternyata takdir berkata lain. Riyanta kemudian bisa duduk sebagai wakil rakyat melalui Penggantian Antar Waktu. Pada hari Selasa, 7 Desember 2021, Riyanta ditetapkan sebagai anggota DPR RI Pengganti Antar Waktu (PAW) berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 137/P tahun 2021 tentang Peresmian Pengangkatan Antar Waktu Anggota DPR RI dan Anggota MPR RI.

Pelantikan dilakukan oleh Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekku) Sufmi Dasco Ahmad, dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta. Riyanta menggantikan rekannya, Imam Suroso, yang meninggal dunia pada 27 Maret 2021 karena terkena Covid-19. Saat ini Riyanta mengemban tugasnya sebagai anggota DPR RI di Komisi II, dan secara otomatis





juga anggota MPR RI.

Sebagai anggota MPR, Riyanta juga konsisten menjalankan tugasnya, salah satu dan yang utama adalah melakukan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI ke berbagai daerah di Indonesia. Seperti Sosialisasi Empat Pilar MPR RI yang digelar pada 5 Juni 2022 di desa Karanganyar, Kecamatan Geyer, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah.

Acara sosialisasi ini terbilang unik, bahkan boleh dikata baru pertama kali di Indonesia, setidaknya yang pernah dilakukan oleh MPR. Acara sosialisasi Empat Pilar MPR biasanya dilakukan di dalam gedung ataupun hotel, tapi kali ini dilakukan di tengah penduduk desa yang jauh dari pusat keramaian. Acara juga diisi dengan pagelaran seni tari yang merupakan budaya setempat. Dalam acara kesenian ini, Riyanta, SH., pun ikut menari dan menyanyikan lagu “Ojolamis,” lagu kesukaanya.

“Budaya sangat perlu dipertahankan dan dilestarikan, karena merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang harus dibanggakan dan dijaga,” ujar Riyanta.

Masih soal perjuangannya untuk membantu rakyat kecil. Selaku anggota DPR RI, usaha Riyanta mendampingi mereka yang berurusan dengan kasus pertanahan tidak kendur. Melalui organisasi Gerakan Anti Mafia Tanah, membuktikan bahwa dia konsisten berjuang membantu rakyat. Artinya, sebagai wakil rakyat, dia konsisten dan semaksimal mungkin membantu rakyat.

Saat ini, Riyanta tampaknya ingin berkiprah untuk rakyat melalui eksekutif. Ia memberanikan diri ikut kontestasi Pemilihan Gubernur



Jawa Tengah Periode 2024-2029 pada Pilkada 2024 nanti. Riyanta akan berduet dengan Ketua DPD Gerindra Jawa Tengah, Sudaryono, sebagai Wakil Gubernur Jateng.

“Saya dari legislatif ke eksekutif demi masyarakat, khususnya masyarakat Jawa Tengah. Sebab, masih banyak hal yang perlu dibenahi dan ditingkatkan di 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, mulai dari infrastruktur hingga kemiskinan. Sebagai kader partai besar PDI Perjuangan, saya harus berani selama tujuannya demi untuk memajukan rakyat,” katanya. □

DER

Biodata

Nama Lengkap : **Riyanta, SH.**
 Agama : Islam
 Tempat, tanggal lahir : Sleman, 25 Mei 1960
 Istri : Nunung Haryati

Pendidikan

- SDN Ngijon 3 (1969 - 1974)
- SMPN Godean (1975 - 1977)
- Pendidikan Tamtama POLRI Gelombang II (1978-1979)
- SMA Paket C Parang Garuda (2006)
- S1 Hukum Univ. 17 Agustus 1945 Semarang (2007-2011)

Karir

- Anggota Polri (1979–1992)
- Anggota PAW DPR-MPR RI (2021–sekarang)
- Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (2021–sekarang)

Organisasi

- Wakil Ketua PP POLRI Kabupaten Pati
- Ketua Perhimpunan Pengrajin Kayu Sekitar Muria (1989-2001)
- Ketua KADIN Kabupaten Pati (1999-Sekarang)
- Bendahara GAPENSI Kabupaten Pati (2001-2006)
- Ketua MAI Kabupaten Pati (2001-Sekarang)
- Ketua ASPANJI Kabupaten Pati (2003-Sekarang)
- Ketua ARDIN (2003-2004)
- Ketua ASPP Kabupaten Pati (2003-Sekarang)
- Wakil Ketua DPD HIPPI Provinsi Jateng (2007-Sekarang)
- Ketua Umum Gerakan Jalan Lurus
- Ketua Umum Gerakan Anti Mafia Tanah

Jadikan Pilkada Pesta Demokrasi Bagi Rakyat

PEMILU Presiden dan Pemilu Legislatif telah usai. Segenap rakyat Indonesia telah memiliki presiden dan wakil presiden terpilih, demikian pula halnya dengan wakil-wakil mereka di parlemen. Namun demikian, hajatan politik elektoral belum selesai. Lima bulan ke depan, rakyat Indonesia masih harus memenuhi hak dan kewajiban politiknya untuk berpartisipasi dalam Pilkada yang merupakan bagian integral dari rezim Pemilu di Indonesia. Sedikitnya terdapat 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota di seluruh Indonesia yang akan menggelar Pilkada secara serentak pada 27 November nanti. Pilkada sebagai gelaran terakhir dari rangkaian Pemilu 2024 ini sudah seyogyanya dijadikan sebagai pesta demokrasi bagi rakyat.

Dinamika Historis

Saya hendak mengajak sidang pembaca berkontemplasi sejenak secara historis mengenai proses pemilihan pemimpin daerah di Indonesia. Semata-mata agar kita semua mensyukuri proses yang kita miliki dan jalani hari ini. Sejarah membuat kita selalu belajar, mawas diri, dan tidak lupa. Pada masa kolonialisme dan imperialisme Belanda di Indonesia, pemilihan pemimpin di level daerah sangat ditentukan oleh rezim kolonial. Pemimpin pada level provinsi adalah pemerintahan kolonial, sedangkan di bawahnya, yakni kabupaten/kota adalah pribumi-pribumi yang mendapatkan kepercayaan dari rezim kolonial untuk memerintah saudara sebangsa dan setanah air mereka. Kondisi ini memberikan pemaknaan bahwa kolonialisme di masa lalu telah mengorbankan hak politik bangsa Indonesia. Elit lokal didudukkan sebagai “boneka politik” untuk berhadap-hadapan dengan saudara sebangsanya sendiri.

Ketika Indonesia memasuki fase kemerdekaan, proses pemilihan pemimpin di level lokal sedikit jauh lebih baik dibandingkan rezim kolonial imperial Belanda. Gubernur sebagai pemimpin di level provinsi diangkat oleh presiden sebagai eksekutif tertinggi, sedangkan pemimpin kabupaten sebagai wilayah administratif di bawah provinsi dipilih oleh menteri dalam negeri. Kondisi ini mengandung makna bahwa pada masa itu, dengan segala dinamika politik yang berlangsung, sirkulasi elit di level daerah atau lokal belum sepenuhnya demokratis. Nilai-nilai demokrasi yang menjunjung tinggi daulat rakyat belum terimplementasi dengan baik. Politik top-down sangat kental terasa. Situasi ini masih bisa kita maffumi mengingat pada masa itu kita masih

berposes sebagai bangsa dan negara. Setidaknya apa yang terjadi pada masa itu menjadi pelajaran historis yang bisa kita ambil hikmahnya bagi penguatan demokrasi saat ini.

Di era orde baru, anasir-anasir demokrasi mulai menguat, meskipun belum dijalankan seutuhnya. Pileg untuk wakil rakyat di parlemen, baik pusat maupun daerah, dijalankan secara langsung dengan rakyat sebagai pemilih. Namun, tidak dengan Pilpres dan pemilihan kepala daerah. Rezim yang berlaku adalah rezim Pemilu representatif untuk level eksekutif, dalam hal mana presiden, wakil presiden, gubernur, bupati, dan walikota dipilih oleh parlemen di level masing-masing. Yang menjadi “cacat demokrasi” pada waktu itu adalah belum adanya batasan periode waktu berkuasa untuk presiden dan wakil presiden, serta dijalankannya dwi fungsi ABRI yang berdampak pada dikaryakannya pejabat militer aktif sebagai pejabat kepala daerah. Situasi pada era orde baru ini bisa dikatakan sebagai “setengah demokrasi”, yakni demokrasi yang belum sepenuhnya dijalankan sesuai kaidah.

Era pasca reformasi menjadi momentum dan titik balik pelaksanaan politik elektoral di level daerah yang sesuai dengan norma demokrasi. Ketika amandemen konstitusi mengamanatkan presiden dipilih langsung oleh rakyat, maka Pilpres 2004 menjadi momentum pelaksanaannya. Hal ini juga berlaku di level daerah ketika Pilkada secara langsung dengan rakyat sebagai voters digelar pertama kali pada 2005, di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Demokrasi berjalan pada jalurnya secara sempurna. Rakyat di daerah diberikan kebebasan untuk menentukan pilihannya secara merdeka pada dua aras Pemilu, yakni legislatif dan eksekutif. Baik kepala daerah maupun anggota parlemen di daerah memiliki legitimasi masing-masing karena langsung dipilih oleh rakyat. Sistem checks and balances menjadi lebih hidup karena terbuka ruang dialektika yang lebar antara eksekutif dan legislatif. Konsekuensi negatifnya tentu ada, seperti munculnya dual legitimacy antara kepala daerah dan anggota parlemen karena masing-masing mengklaim mendapatkan legitimasi langsung dari rakyat.

Proses historis yang saya sampaikan di atas setidaknya menebalkan rasa syukur kita terhadap proses demokrasi yang telah berjalan. Apa yang kita miliki hari ini merupakan proses panjang nan berliku. Demokrasi bukanlah barang instan yang bisa diwujudkan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Kokohnya rezim Pilkada Indonesia hari ini merupakan buah manis dari komitmen bangsa untuk memeluk demokrasi. Selain perubahan mekanisme Pemilu dari

Oleh:
Dr. K.H. Jazilul Fawaid, S.Q., M.A.,
Wakil Ketua MPR RI



representatif menjadi langsung, ada faktor pendukung lainnya yang eksis, yakni kebijakan regulatif dalam bentuk otonomi daerah, UU Pemerintahan Daerah, dihapuskannya dwi fungsi ABRI, serta komitmen untuk mewujudkan pemerataan pembangunan sebagai tantangan ekonomi Indonesia. Kritik terhadap sentralisasi pemerintah di masa lalu menjadi sumbu penyulut munculnya separatisme GAM dan OPM. Ketimpangan menganga lebar antara Jawa dan luar Jawa. Ini hanya bisa dijumpai apabila daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri, serta rakyat daerah diberikan keleluasaan untuk memilih pemimpinnya sendiri secara langsung melalui Pemilu.

Tantangan dan Peluang

Tantangan pelaksanaan Pilkada 2024 saat ini sejatinya tidak mudah, terlebih lagi apabila kita melihatnya dalam kerangka pembangunan nasional jangka panjang. Pembangunan nasional di sini adalah pembangunan yang bersifat holistik, sinergis dan kolaboratif antara pembangunan fisik dan pembangunan manusia. Ketiadaan haluan negara dalam proses pembangunan nasional kerap kali menimbulkan ketidak-ajegan dalam kerja-kerja rezim yang memerintah. Seringkali antara satu rezim dengan yang lainnya tidak berkesinambungan dan saling menegasikan. Demikian pula halnya dengan kolaborasi antara pusat dan daerah yang kerap terkendala karena visi misi yang berbeda antar-level pimpinan. Argumentasi yang dipakai adalah dipilih langsung oleh rakyat. Klaim legitimasi ini menimbulkan perbenturan satu sama lain. Tak heran jika ada program kerja pemerintah di level pusat berbeda dengan level provinsi, demikian pula halnya dengan level provinsi yang berbenturan dengan level kabupaten/kota.

Tantangan lainnya adalah kontribusi pemerintahan daerah terhadap penguatan ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi pada level nasional dikontribusi oleh pertumbuhan ekonomi di level daerah. Apabila ada sumbatan atau kendala dalam memacu pertumbuhan ekonomi di level daerah, maka berpengaruh secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi di level nasional. Indonesia adalah negeri yang kaya akan sumber daya alam. Otonomi daerah menjadi jendela bagi masing-masing daerah untuk mengoptimalkan kapasitas dan kontribusi mereka masing-masing. Namun demikian, apa yang seharusnya terjadi tidak senyatanya terwujud. Papua misalnya, meskipun kaya sumber daya alam, tapi masih berstatus sebagai wilayah administratif yang perlu ditingkatkan kesejahteraannya. Ada

problematika yang melekat pada rezim pemerintahan daerah, jamaknya adalah tata kelola yang belum sepenuhnya mengakomodasi prinsip good and clean governance.

Terlepas dari berbagai tantangan tersebut, ada juga peluang-peluang yang perlu kita optimalkan bersama. Partai politik sebagai pilar demokrasi semakin besar kontribusinya dalam perbaikan sistem dan tata kelola politik pemerintahan. Dinamika dan sikap politik ada aras Pilpres dan Pileg tidak selalu berjalan paralel dengan dinamika daerah. Sederhananya, meskipun satu parpol tidak berkoalisi dengan parpol lain di Pileg, akan tetapi peluang koalisi terbuka pada Pilkada. Bagi mereka yang skeptis, ini disebut sebagai pragmatisme politik. Namun dalam kaca mata politik kemaslahatan, yang terjadi adalah kapasitas dan kebijaksanaan parpol dalam menangkap aspirasi dan dinamika yang berkembang di level daerah. Parpol yang matang akan lebih mendengar aspirasi rakyat mengenai kandidat mana yang prospektif untuk diusung, sehingga perbedaan sikap pada aras Pemilu lainnya bisa dijumpai. Peluang lainnya adalah besarnya postur generasi muda sebagai voters pada Pilkada nanti. Dinamika sosiopolitik ini perlu dengan cermat disikapi oleh parpol. Dibukanya kesempatan oleh banyak parpol bagi tokoh-tokoh muda untuk berpartisipasi dalam Pilkada sejatinya merupakan bentuk kepekaan dan kebajikan yang dimiliki oleh parpol sebagai pilar demokrasi.

Saya pribadi berharap bahwa gelaran Pilkada 2024 ini menjadi ajang pesta bagi seluruh rakyat Indonesia. Rakyat yang memiliki hak pilih harus menunaikan kewajibannya untuk memberikan suara di bilik suara sebagai bentuk partisipasi politik. Rakyat sebagai pemilih jangan sungkan untuk berpartisipasi sejak dini dalam proses penjaringan calon oleh parpol. Mereka berhak menyuarakan dukungan bagi figur-figur yang mereka anggap kompeten. Mereka juga berhak untuk mengkritisi jika ada parpol yang mengusung calon-calon yang bermasalah secara hukum. Bagi pemerintahan terpilih ke depan, Pilkada ini menjadi momentum untuk mengakselerasi program-program yang telah dicanangkan. Target pertumbuhan ekonomi yang dipatok 8% oleh presiden terpilih Prabowo Subianto akan lebih mudah tercapai apabila dalam Pilkada kali ini terpilih figur-figur yang mumpuni dalam mengelola potensi sumber daya alam daerah, sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi di daerah semaksimal mungkin yang berkontribusi pada pemenuhan target pertumbuhan ekonomi nasional. □

Bedah Buku Prof Paiman Raharjo

Bamsoet Ingatkan Penyakit Masyarakat “Susah Lihat Orang Senang, Senang Lihat Orang Susah”



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KETUA MPR RI ke-16 sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengapresiasi hadirnya buku “Pikiran dan Ide Prof. H. Paiman Raharjo.” Menjadi saksi perjalanan kehidupan Prof. Paiman, yang mengawali karier sebagai tukang sapu, kemudian melanjutkan pendidikan hingga lulus S3 (program doktoral) di UNPAD, dan akhirnya sukses menjabat sebagai Rektor Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama). Saat ini, Prof. Paiman dipercaya sebagai Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Dalam kesempatan tersebut Bamsoet mengingatkan penyakit masyarakat yang kerap menghambat kesuksesan seseorang yang harus dihindari. Yaitu, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah.

Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, dengan mengutip pemikiran Barbara Tuchman Wertheim, seorang sejarawan dan penulis Amerika Serikat, yang telah dua kali memenangkan penghargaan

Pulitzer. Barbra mengungkapkan bahwa “Buku adalah pembawa peradaban”. Buku melingkupi segenap aspek kehidupan kita: ia dapat menjadi sahabat, pembimbing, transformator, dan sekaligus rumah tempat bernaung bagi ribuan ide dan gagasan. Oleh karenanya, buku akan

menjadi legasi pemikiran yang tidak akan lekang oleh waktu, yang akan terus diwariskan dari generasi ke generasi.

“Di dalam buku ini terdapat tulisan inspiratif hasil berbagai pertemuan Prof. Paiman dengan berbagai kalangan, baik di kantor, di jalanan, di angkringan, dan lainnya. Dari obrolan tersebut, Prof. Paiman mengakui bahwa siapa pun orangnya, tanpa melihat pangkat dan tingkat pendidikan, mereka juga memiliki pemikiran tersendiri tentang dunia politik, pendidikan, karier, persahabatan, dan sebagainya, yang adakalanya sangat unik. Berbagai pemikiran yang unik-unik itulah yang ada di dalam buku ini,” ujar Bamsoet saat membuka Bedah Buku “Pikiran dan Ide Prof. Paiman Raharjo,” di



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

kantor Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Jakarta, Kamis (4/7/24)

Hadir, antara lain Wakil Menteri Pertanian RI Harvick Hasnul Qolbi, Pakar Komunikasi Politik Prof. Effendi Gazali, Pj. Gubernur Lampung Samsudin, Pjs. Ketua Umum PB HMI Sukrin, dan Ketua Bidang Otda PB HMI Maryadi Sirat.

Ketua Komisi III DPR RI ke-7 bidang Hukum dan Keamanan ini menjelaskan, sebagaimana disampaikan Prof. Paiman dalam buku ini serta dibuktikan dalam perjalanan karirnya, bahwa kesuksesan tidak pernah bersifat diskriminatif, atau memihak berdasarkan strata ekonomi, kelas sosial, atau berbagai label atributif sosial lainnya. Kesuksesan akan menjadi milik siapa saja yang mau bekerja keras, pantang menyerah, serta menyandarkan diri pada nilai-nilai dan norma agama.

“Dari buku ini kita bisa belajar bahwa hidup itu seperti maraton, yang harus dijalani dan dinikmati setiap prosesnya. Bukan lari sprint yang hanya berorientasi pada perolehan hasil yang serba cepat. Hidup meniscayakan kita untuk melewati proses yang panjang untuk

mencapai sebuah kesuksesan. Tidak bisa secara serta merta, apalagi dengan menghalalkan segala cara,” jelas Bamsuet.

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI (Ormas Pendiri Partai Golkar) dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menerangkan, dalam konteks ke-Indonesiaan, buku ini juga mengajak untuk berkontemplasi, bahwa jurang kesenjangan sosial-ekonomi masih menjadi realitas sosial yang harus disikapi dengan bijaksana. Persoalan lain yang mengemuka, bahkan dalam kehidupan bermasyarakat yang ada di sekitar, masih sering dijumpai contoh perilaku yang tidak bertanggung jawab, tidak jujur, dan diskriminatif, yang “terlanjur” dianggap lazim sebagai fenomena sosial.

“Dalam konteks pembangunan di Indonesia, buku ini juga mengajak pembaca untuk menata dan meneguhkan kembali orientasi pembangunan nasional. Misalnya, sebagai negara agraris dan kepulauan, arah pembangunan Indonesia tidak seharusnya hanya cenderung pada pembangunan negara industri saja. Sebutan negara agraris bagi negara yang masih menggantungkan impor hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan pangan, tentunya menjadi suatu paradoks,” terang Bamsuet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum FKPP/ Kepala Badan Bela Negara FKPP ini menambahkan, sedangkan dalam konteks kehidupan politik di tanah air, keteladanan perilaku dari para elit politik masih menjadi persoalan tersendiri. Tidak jarang, syahwat politik dapat membutakan mata hati para elit politik, yang terus merasa haus akan kekuasaan. Sehingga tidak sadar kapan harus menghentikan ambisi politiknya, demi kepentingan yang lebih besar.

“Pesan moral yang dapat kita jadikan cerminan dari buku ini adalah, bahwa jalan kehidupan tidak selamanya mulus, terkadang kita dihadapkan pada berbagai tantangan yang menghadang. Di sisi lain, kita pun tidak boleh bersikap apatis dan pesimistis, karena masih banyak tokoh masyarakat dan tokoh bangsa, yang kisah perjalanan hidupnya dapat kita jadikan inspirasi, seperti kisah Prof. Paiman,” pungkas Bamsuet. □



Agar Presiden Tidak Jatuh Bangun

Agar terjadi stabilitas politik maka masa jabatan Presiden harus bersifat tetap. Dalam konstitusi hal demikian sangat mungkin, sebab sistem kekuasaan yang ada bukan sistem parlementer. Untuk menuju ke sana perlu sistem presidensial yang kuat. Ada beberapa langkah yang perlu dilakukan, salah satunya adanya parliamentary threshold atau ambang batas pemilu legislatif.

PENATAAN sistem presidensial menjadi salah satu alasan kuat (*raison d'être*) untuk mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Ungkapan demikian disampaikan oleh Ketua Badan Pengkajian MPR, Drs. Djarot Saiful Hidayat, MS., dalam sambutannya di buku berjudul: *Penataan Sistem Presidensial*.

Sistem presidensial bagi Badan Pengkajian merupakan bahasan dan hal yang penting sehingga isu tersebut dibukukan dalam seri kajian ketatanegaraan. Buku setebal viii + 108 halaman itu terbagi dalam 3 bab. Masing-masing bab terdiri dari beberapa sub-bab dan di antara sub-bab yang ada terbagi lagi dalam beberapa *point*.

Dari semua bab yang ada, di Bab III-lah pembaca dijelaskan tentang bagaimana dan mengapa sistem presidensial perlu diperkuat. Djarot dalam sambutan mengatakan, selama empat kali perubahan UUD, dari tahun 1999 hingga 2002, diarahkan memperkokoh sistem presidensial sebagai bentuk purifikasi dari sistem sebelum perubahan UUD. Pilihan ini, menurut Politisi PDI Perjuangan itu, dilatarbelakangi untuk menciptakan stabilitas eksekutif, demokrasi yang lebih besar, dan pemerintahan yang lebih terbatas. "Stabilitas pemerintahan yang diwujudkan adanya masa jabatan eksekutif yang bersikap tetap (*fixed term office*) dan eksekutif tidak dapat dijatuhkan karena alasan politik oleh Parlemen", ujarnya.

Alasan yang demikian sangat mungkin, sebab di halaman 81 dijelaskan, berbeda dengan sistem pemerintahan parlementer di mana posisi eksekutif sangat tergantung kepada dukungan Parlemen.

Untuk menuju ke sana, di halaman 89 sub-bab C. *Upaya Strategis Penguatan Sistem Presidensial*, diuraikan menjadi beberapa *point* untuk mendukungnya, yakni: (1). *Penyederhanaan Sistem Kepartaian*. (2). *Mempertahankan Cara Penyelenggaraan Pemilu legislatif dan Presiden Secara Serentak/Pemilu Serentak (Concruent Election)*. (3). *Parliamentary Threshold yang Efektif*. (4). *Pengaturan Persyaratan Pengajuan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden*.

(5). *Perubahan Syarat Keikutsertaan Sebagai Peserta Pemilu*.

Dari sekian hal di atas, *point* 3 yang sangat menarik. Di halaman 97 dijelaskan, basis penentuan ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) cenderung lebih berbasis pada perkiraan ambang batas nasional dari pemilu yang dipraktikkan. Dalam Pasal 414 ayat (1) UU. No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dijelaskan, *partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan kursi anggota DPR*.

Dari sini dapat diartikan, partai politik yang tidak memperoleh minimal 4% suara dalam pemilu tidak berhak memiliki kursi di Parlemen. Ambang batas yang diterapkan ini (rupanya) tidak memiliki dampak signifikan, kecuali mencegah penambahan jumlah partai.

Lebih lanjut diuraikan, jumlah ideal partai politik yang mendukung terciptanya sistem multipartai moderat terdapat 3 hingga 5 partai politik yang bersaing memperebutkan suara pemilih yang berada di tengah, namun demikian untuk kasus Indonesia, sistem multipartai moderat perlu mempertimbangkan kondisi masyarakat Indonesia yang heterogen. Oleh sebab itu, jumlah partai politik di

Parlemen tidak bisa dibatasi 3 hingga 5 partai politik, tetapi perlu dibuat lebih moderat menjadi sekitar 5 hingga 6 partai politik untuk menjaga derajat keterwakilan (*representativeness*).

Untuk mencapai 5 hingga 6 partai politik, dalam buku itu disarankan sebagai berikut: mengingat ambang batas parlemen yang ditetapkan oleh undang-undang sebesar 4% tidak memiliki dampak signifikan maka sebenarnya ambang batas parlemen baru efektif apabila naik secara bertahap sampai titik ideal, yakni 9,6%. Pemberlakuan ambang batas parlemen di titik ini akan berdampak secara cepat mendorong lahirnya multipartai moderat antara 5 hingga 6 partai politik yang memiliki wakil di parlemen. □

AWG





MPR
RUMAH KEBANGSAAN
PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA
DAN KEDAULATAN RAKYAT





MPR
RUMAH KEBANGSAAN
PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA
DAN KEDAULATAN RAKYAT



EMPAT PILAR MPR RI

Pancasila Sebagai Dasar dan Ideologi Negara
UUD NRI Tahun 1945 Sebagai Konstitusi Negara
NKRI Sebagai Bentuk Negara
Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Semboyan Negara

INI BARU
INDONESIA
DARI PAPER UNTUK NEGARA

